

LAPORAN HASIL EVALUASI RPJPD PROVINSI NTB 2005-2025



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penyajian Dokumen Evaluasi	5
BAB II PENJABARAN RPJPD PROVINSI NTB 2005-2025.....	6
2.1 Visi dan Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi NTB 2005-2025	6
2.1.1. Visi.....	6
2.1.2. Misi.....	7
2.1.3. Sasaran Pokok Pembangunan Daerah	8
2.2 KETERKAITAN VISI DAN MISI DAN PENTAHAPAN RPJPD PROVINSI NTB 2005-2025 DENGAN PERIODESASI RPJMD	26
I. Periode RPJMD ke-1	27
II. PERIODE RPJMD ke-2.....	35
III. PERIODE RPJMD ke-3	42
IV. PERIODE RPJMD ke-4	51
V. PERIODE RPJMD ke-5	59
BAB III CAPAIAN KINERJA RPJPD PROVINSI NTB 2005-2025	62
3.1 Capaian Kinerja Indikator Makro Daerah	62
3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator dan Target RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025.....	64
3.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Periodisasi RPJMD	68
3.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2005- 2025	147
BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	229
4.1 Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja.....	229
I. Periode RPJMD Tahun 2003-2008	229
II. Periode RPJMD Tahun 2009-2013	231
III. Periode RPJMD Tahun 2013-2018	233
IV. Periode RPJMD Tahun 2019-2023	239
4.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja.....	243
V. Periode RPJMD Tahun 2003-2008	243
VI. Periode RPJMD Tahun 2009-2013	244
VII. Periode RPJMD Tahun 2013-2018	246
VIII. Periode RPJMD Tahun 2019-2023.....	248
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT	251
5.1 Kesimpulan	251
5.2 Rekomendasi Dan Tindak Lanjut	253

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Misi, Sasaran, Kebijakan/Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2003-2008	32
Tabel 2. 2 Misi, Sasaran, Kebijakan/Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2009-2013	40
Tabel 2. 3 Misi, Sasaran, Kebijakan/Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2013-2018	45
Tabel 2. 4 Misi, Sasaran, Kebijakan/Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2019-2023	53
Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Provinsi NTB Berdasarkan Periode RPJMD	63
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator dan Target RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025.....	64
Tabel 3. 3 Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025	66
Tabel 3. 4 Kebijakan Pembangunan dalam Renstrada NTB Tahun 2003-2008	69
Tabel 3. 5 Pencapaian Indikator Kinerja RPJPD pada Periode RPJMD ke-1	74
Tabel 3. 6 Pencapaian Kinerja RPJPD pada Periode RPJPD ke-1 Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	76
Tabel 3. 7 Pencapaian Indikator Kinerja RPJPD pada Periode RPJMD ke-2	82
Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja RPJPD pada Periode RPMPD ke-3 Berdasarkan Aspek Pembangunan.....	112
Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Periode RPJMD ke-3 Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	113
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Periode RPJMD ke-3 Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.....	114
Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Periode RPJMD ke-3 Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah.....	115
Tabel 3. 12 Target dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2019-2022	135
Tabel 3. 13 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama pada Periode RPJMD ke-1.....	150
Tabel 3. 14 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Hukum dan Aparatur pada Periode RPJMD ke-1	153
Tabel 3. 15 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Politik pada Periode RPJMD ke-1	155
Tabel 3. 16 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Periode RPJMD ke-1	155
Tabel 3. 17 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ekonomi pada Periode RPJMD ke-1	156
Tabel 3. 18 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Periode RPJMD ke-1.....	158
Tabel 3. 19 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama pada Periode RPJMD ke-2.....	162
Tabel 3. 20 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Hukum dan Aparatur pada Periode RPJMD ke-2	166

Tabel 3. 21 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana pada Periode RPJMD ke-2	168
Tabel 3. 22 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ekonomi pada Periode RPJMD ke-2	170
Tabel 3. 23 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Periode RPJMD ke-2.....	172
Tabel 3. 24 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama pada Periode RPJMD ke-3.....	176
Tabel 3. 25 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Hukum dan Aparatur pada Periode RPJMD ke-3.....	181
Tabel 3. 26 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Politik pada Periode RPJMD ke-3.....	183
Tabel 3. 27 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Periode RPJMD ke-3	184
Tabel 3. 28 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana pada Periode RPJMD ke-3	185
Tabel 3. 29 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ekonomi pada Periode RPJMD ke-3	187
Tabel 3. 30 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Periode RPJMD ke-3.....	189
Tabel 3. 31 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada Periode RPJMD ke-3	192
Tabel 3. 32 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama pada Periode RPJMD ke-4.....	195
Tabel 3. 33 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Hukum dan Aparatur pada Periode RPJMD ke-4.....	200
Tabel 3. 34 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Politik pada Periode RPJMD ke-4.....	202
Tabel 3. 35 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Periode RPJMD ke-4	203
Tabel 3. 36 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana pada Periode RPJMD ke-4.....	204
Tabel 3. 37 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ekonomi pada Periode RPJMD ke-4	206
Tabel 3. 38 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Periode RPJMD ke-4.....	208
Tabel 3. 39 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada Periode RPJMD ke-4	212

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periode RPJMD ke-1	28
Gambar 2. 2 Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periode RPJMD ke-2	36
Gambar 2. 3 Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periode RPJMD ke-3	42
Gambar 2. 4 Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periode RPJMD ke-4	51
Gambar 2. 5 Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periode RPJMD ke-5 atau RPD Tahun 2024-2026	61
Gambar 3. 1 Tingkat Capaian Tujuan Pembangunan pada Periode RPJMD ke-4	133
Gambar 3. 2 Tingkat Capaian Sasaran Pembangunan pada Periode RPJMD ke-4..	134

KATA SAMBUTAN

Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 menjadi salah satu tolok ukur kinerja Pembangunan Daerah selama 20 Tahun. Dokumen ini merefleksikan hasil dari evaluasi atas upaya kita bersama dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi NTB melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Kita berharap laporan ini juga mencerminkan komitmen kita dalam transparansi dan akuntabilitas. Dalam setiap langkah pembangunan, pasti terdapat rintangan dan kesuksesan. Melalui buku laporan evaluasi ini, kita dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih bijaksana. Dalam perjalanan pembangunan, tentu ada tantangan dan hambatan, namun juga ada keberhasilan yang patut kita syukuri bersama. Evaluasi ini bukanlah akhir dari perjalanan kita, melainkan sebuah titik awal untuk langkah pembangunan selanjutnya yang lebih matang dan terarah.

Partisipasi semua stakeholder seperti mitra-mitra Pembangunan, dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota dalam proses pencapaian kinerja Pembangunan harus terus dijaga dan ditingkatkan agar target-target Pembangunan dapat dicapai secara optimal. Mari kita terus berkolaborasi, berinovasi, dan berupaya keras demi masa depan Nusa Tenggara Barat yang lebih cerah, maju, dan sejahtera untuk semua. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Semoga buku laporan ini dapat menjadi referensi bagi kita semua dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, mari kita tetap bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Mataram, Juli 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas telah diselesaikannya Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025. Laporan ini disusun atas amanat dari Pasal 250 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi atas pencapaian kinerja pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2005-2025, dan dalam kaitannya dengan periodisasi masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama kurun waktu kurang lebih 20 tahun ini, ditentukan oleh berbagai macam dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTB, termasuk oleh adanya kejadian yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan secara wajar, yaitu bencana gempa bumi dan pandemic covid-19. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang dalam prosesnya akan melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih atas pihak-pihak yang sudah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Mataram, Juli 2023

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB,

Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si.
NIP. 19651231 199403 1 153

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

RPJPD Provinsi NTB sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, atau terhitung sejak tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2025. Dengan akan berakhirnya RPJPD Tahun 2005-2025 dan akan dilaksanakannya pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara serentak maka perlu dilakukan evaluasi terhadap RPJPD dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD berikutnya yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang ikut pemilihan kepala daerah secara serentak, hal ini diperkuat dengan

Pelaksanaan evaluasi RPJPD Provinsi NTB 2005-2025 juga sebagai tindak lanjut Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024; tindak lanjut Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, calon Kepala Daerah menyusun visi, misi dan program berpedoman pada RPJPD; tindak lanjut Pasal 18 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN serta periodisasi RPJPD 2005 – 2025 akan berakhir pada tahun 2025; serta tindak lanjut Pasal 250 ayat (3) dan Pasal 298 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dilaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJPD dengan tujuan yaitu untuk mengetahui realisasi antara sasaran pokok dan arah kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi NTB 2005-2025 dapat dicapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan; dan hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.

Pelaksanaan evaluasi RPJPD secara teknis mengikuti pedoman dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/Sj tentang Pelaksanaan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 mencakup pelaksanaan 4 Periode RPJMD. Jika RPJPD Tahun 2005-2025 bersifat kuantitatif, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 berpedoman pada Formulir 1. Sedangkan Jika RPJPD Tahun 2005-2025 bersifat kualitatif, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 dilakukan dengan Mengubah target sasaran pokok pada tiap periode/tahapan dan/atau arah kebijakan yang masih bersifat kualitatif tersebut menjadi data kuantitatif ke dalam indikator yang relevan dengan mempedomani formulir 5; dan menggunakan hasil evaluasi hasil RPJMD dalam periode 2005 sampai dengan 2025 dengan mempedomani formulir 6.

Secara substansi, pelaksanaan evaluasi RPJPD dilakukan melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen dan lain-lain, dan dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, dicatat dalam kertas kerja evaluasi terhadap hasil RPJPD. Namun demikian, pengambilan kesimpulan akhir Evaluasi agar tetap dapat menjelaskan ketercapaian Visi dan Misi Daerah. Adapun data yang disajikan dalam dokumen laporan evaluasi RPJPD ini salah satunya

memuat indikator makro pembangunan daerah Provinsi NTB selama 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2005-2025. Capaian indikator makro yang dianalisis berdasarkan dengan capaian kinerja awal periode dibandingkan dengan capaian akhir periode, yang ditunjukkan dengan capaian kinerja indikator makro yang tersedia pada tahun berjalan yakni tahun 2022. Sedangkan untuk menilai rata-rata capaian kinerja pada setiap periodisasi RPJMD digunakan data hasil evaluasi terhadap Hasil RPJMD Tahun ke-5.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan Evaluasi RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/Sj tentang Pelaksanaan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003 – 2008
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2013
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dan capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen dari hasil pelaksanaan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005 – 2025 mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Evaluasi ini juga menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi 4 (empat) periode RPJMD dalam rangka menilai pencapaian rencana pembangunan jangka Panjang daerah.

Adapun Tujuannya adalah untuk menilai adalah untuk menilai realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan target-target pembangunan yang telah ditetapkan serta menilai capaian sasaran RPJMD pada setiap periodenya. Disamping itu juga untuk memastikan pencapaian visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah provinsi NTB dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.

Hasil evaluasi kemudian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk periode berikutnya.

1.4. Sistematika Penyajian Dokumen Evaluasi

Penyajian Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/Sj tentang Pelaksanaan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan dilaksnaakannya evaluasi hasil RPJPD

BAB II PENJABARAN RPJPD PROVINSI NTB 2005-2025, memuat visi, misi, dan sasaran pokok RPJPD provinsi NTB 2005-2025, pentahapan RPJPD Provinsi NTB 2005-2025 serta keterkaitannya kedalam 4 (empat) periodisasi RPJMD

BAB III CAPAIAN KINERJA RPJPD PROVINSI NTB TAHUN 2005-2025, memuat penjabaran dan analisis capaian kinerja Pemerintah Daerah yang mencakup capaian kinerja indikator makro daerah, capaian kinerja berdasarkan target RPJPD Provinsi NTB 2005-2025, capaian kinerja berdasarkan periodisasi RPJMD, dan capaian kinerja berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2005-2025

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, memuat hasil identifikasi factor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya kinerja sasaran pokok RPJPD

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT, memuat kesimpulan terhadap hasil identifikasi factor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya terget kinerja sasaran pokok RPJPD, sebagai rekomendasi untuk penyusunan RPJPD periode berikutnya.

LAMPIRAN, memuat berbagai data dan informasi hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 sesuai format dalam SE Menteri Dalam Negeri yang meliputi Data Capaian Sasaran Pokok RPJPD Provinsi NTB 2005-2025, Data Capaian Indikator Makro Daerah, Data Capaian 4 tahap RPJMD Provinsi NTB, serta Data Capaian berdasarkan Arah Kebijakan.

BAB II PENJABARAN RPJPD PROVINSI NTB 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008. Selanjutnya mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.

2.1 Visi dan Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi NTB 2005-2025

2.1.1. Visi

Berdasarkan dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 serta mengacu pada visi RPJP Nasional 2005-2025, maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah: ***TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA***

BERIMAN adalah situasi dan kondisi spiritual masyarakat dalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang terwujud dalam masyarakat silaturahmi yang memiliki sikap menjunjung tinggi kerukunan hidup antar internal umat satu agama dan antara umat agama yang satu dengan umat agama lainnya, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong, peduli serta jujur. Beriman juga dimaksudkan bagi pencapaian rasa syukur untuk memperoleh limpahan rahmat dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga masyarakat berhasil melaksanakan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dinamis.

MAJU adalah gambaran kondisi dan situasi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang berkehendak dan mampu menerapkan IPTEK dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup guna bergerak menuju suatu kehidupan yang lebih baik. Di dalamnya juga terkandung makna MANDIRI yaitu kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk mampu melaksanakan pembangunan secara sinergis pada semua aspek kehidupan bangsa. Daerah yang maju adalah daerah yang masyarakatnya terjamin hak-haknya, terjamin rasa keamanan dan ketentraman dalam hidupnya.

Selain itu, daerah yang maju adalah daerah yang infrastrukturnya juga maju, berfungsinya secara baik dan benar kelembagaan politik, kelembagaan hukum, dan lembaga kemasyarakatan disertai meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu mengembangkan keunggulan daerahnya, tidak tergantung pada daerah lain atau pemerintah pusat, mampu mengatasi kerawanan, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak dari luar. Kemandirian adalah masalah sikap dan masalah budaya yang harus dicerminkan dalam aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya.

SEJAHTERA mengandung makna bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja, rekreasi, ibadah, pelayanan publik serta hubungan sosial secara wajar dalam suasana kelestarian lingkungan hidup. Terandung juga makna di dalamnya adalah KEADILAN di mana segenap komponen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Disamping itu, keadilan tercermin dari adanya kesempatan yang sama dari semua kelompok masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, adanya perlindungan dan kesamaan di depan hukum, di dalamnya tidak ada kesenjangan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, antar gender, dan antar kelompok masyarakat.

2.1.2. Misi

Dalam mewujudkan visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Misi 1: Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas.

2. Misi 2: Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya, serta pemenuhan aktualisasi ekstensi diri dan kepribadian.

3. Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan dan penegakan hak-hak azasi manusia.

4. Misi 4: Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain.

5. Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan sumber daya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.

2.1.3. Sasaran Pokok Pembangunan Daerah

1. Misi 1: Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum, dengan sasaran pokok:

- a. Meningkatnya peranan lembaga pemerintahan sebagai regulator yang diikuti dengan semakin menurunnya peranan sebagai pelaku kegiatan di masyarakat.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- c. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan, aman, tertib, dan harmonis.

2. Misi 2: Mewujudkan masyarakat sejahtera, dengan sasaran pokok:

- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita riil penduduk terus meningkat, tingkat

pengangguran tidak lebih dari 5 persen dan angka kemiskinan dibawah 10 persen.

- b. Terpenuhinya kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari buta huruf, keterampilan lulusan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, dan rata-rata lama sekolah penduduk menjadi 12 tahun.
- d. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari penyakit dasar, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita. Seluruh indikator kesehatan sama/mendekati rata-rata nasional.

3. Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dengan sasaran pokok:

- a. Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Nusa Tenggara Barat.
- b. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
- c. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.

4. Misi 4: Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, dengan sasaran pokok:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Barat ditandai dengan meningkatnya IPM serta tidak ada pertumbuhan penduduk karena kelahiran. Angka IPM Nusa Tenggara Barat harus sama/mendekati rata-rata nasional.
- b. Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, industri

pengolahan, pariwisata, dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan komoditi berkualitas dan berdaya saing.

- c. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi yang dicirikan oleh terbukanya hubungan antar desa satu sama lain di dalam dan ke luar wilayah Nusa Tenggara Barat serta sentra-sentra produksi dengan pasar.
- d. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang mampu mendukung dinamika ekonomi dan kehidupan masyarakat. Rasio elektrifikasi mencapai angka minimal 95 persen.
- e. Meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi

5. Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran pokok:

- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
- b. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam hayati untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah.
- c. Terkendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan Sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- e. Pengembangan wilayah dalam kerangka membangun geopark, Lombok as Eco Island (LECI) dan Sumbawa as Ecozone (SuEZ).

2.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

- 1. Arah kebijakan untuk misi Mewujudkan Masyarakat Beriman, Bermoral, Berbudaya dan Berkesadaran Hukum meliputi:
 - a. Mewujudkan Masyarakat yang Tangguh, Kompetitif dan Bermoral Tinggi Berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Nilai Budaya.
Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:
 - 1) Pemantapan fungsi dan peranan agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan dan pembangunan.

- 2) Peningkatkan fungsi dan peran tokoh-tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok agama dan kelompok masyarakat.
 - 3) Penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga budaya dalam peningkatan pembinaan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
 - 4) Penguatan fungsi dan peran tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
- Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan, pedesaan, dan kawasan rentan konflik.
- b. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
- Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:
- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 2) Peningkatan, pemantapan, dan penguatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hukum dan HAM.
 - 3) Pemantapan dan penguatan peran lembaga sosial masyarakat dalam turut bertanggung jawab dan berperan aktif menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi.
 - 4) Peningkatan kualitas kelembagaan dan profesionalisme pamswakarsa.
- c. Memantapkan Peranan Budaya dalam Pembangunan Daerah.
- Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:
- 1) Penataan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial yang berakar dan unik, seperti religius, kebersamaan, dan persatuan.
 - 2) Revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya daerah yang unggul.
 - 3) Pengembangan bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas melalui kesenian dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia
 - 4) Pengembangan budaya iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dan budaya produktif.

d. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan fasilitasi akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan dan pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.
- 2) Peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak-haknya sebagai warga negara serta bentuk-bentuk perilaku merasa memiliki “daerahnya” dan taat hukum.
- 3) Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan

2. Arah kebijakan untuk misi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, meliputi:

a. Menjamin Ketersediaan Pangan dan Gizi Masyarakat.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- 1) Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik jumlah maupun mutu gizinya, aman, dan terjangkau.
- 2) Mengembangkan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
- 3) Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi di daerah serta pemenuhan konsumsi seimbang.
- 4) Optimalisasi peran kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.

b. Menyediakan Kebutuhan Hunian dan Lingkungan Permukiman yang Layak.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- 1) Penelitian dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat dan lembaga keuangan formal dan non-formal
- 2) Peningkatan dan optimalisasi kualitas permukiman rakyat.
- 3) Fasilitasi pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

- 4) Pemanfaatan dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari lembaga keuangan formal dan non-formal.
- 5) Optimalisasi pemanfaatan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat.

c. Menyediakan Lapangan Kerja

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :

- 1) Penelitian dan pengembangan potensi angkatan kerja dan peluang lapangan kerja formal
- 2) Peningkatkan produktivitas dan penempatan tenaga kerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi
- 3) Peningkatkan pelayanan kesejahteraan pekerja di sektor informal
- 4) Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.

Adapun prioritas lokasi meliputi daerah perkotaan, kawasan strategis industri dan kawasan agropolitan.

d. Meningkatkan Kualitas Penduduk

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- 1) Penelitian dan pengembangan database jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Penataan sistem administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- 2) Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas
- 3) Penataan persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

e. Meningkatkan Pelayanan Dasar Pendidikan.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- 1) Penelitian dan pengembangan database pelayanan pendidikan di semua jenjang.
- 2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan semua jenjang pendidikan.
- 3) Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif.

- 4) Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- 5) Keberlanjutan peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan kualitas hidup dan produktivitas penduduk, serta menumbuhkan kebanggaan kebangsaan dan akhlak mulia.

f. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- 1) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau pada setiap strata pelayanan pada berbagai tingkat wilayah.
- 2) Peningkatan promosi, pengobatan, rehabilitasi dan prevensi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Penambahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.
- 4) Peningkatan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan.
- 5) Peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan pemberdayaan profesi kesehatan.

g. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- 1) Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai.
- 2) Peningkatan kualitas kesejahteraan dan produktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- 3) Peningkatan sistem pembiayaan sosial ekonomi masyarakat miskin/terlantar dan jaminan sosial daerah (Jamsosda) bagi PMKS.
- 4) Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 5) Pengembangan dan penataan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar.
- 6) Penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana alam.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan.

3. Arah Kebijakan untuk misi Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan, meliputi:

a. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya.
- 2) Pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil melalui pemberdayaan masyarakat secara langsung, dan jaminan akses terhadap pelayanan publik.
- 3) Pemanfaatan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
- 4) Fasilitasi pembangunan perdesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang, peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, dan pengembangan social capital dan human capital.
- 5) Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah untuk dapat menjalankan peran sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kota
- 6) Peningkatan konektivitas dan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.
- 7) Pengelolaan pertanahan secara efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah strategis, desa tertinggal dan terpencil, kawasan agropolitan, perkotaan dan industri.

b. Mengurangi kemiskinan dalam masyarakat.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Penelitian dan pengembangan data base dan strategi mainstreaming penanggulangan kemiskinan daerah.
- 2) Perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan khususnya pada layanan akses dan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

- 3) Peningkatan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar masyarakat miskin. Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah pedesaan tertinggal dan terpencil, daerah perkotaan dan perbatasan.
- c. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:
- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya.
 - 2) Penataan produk hukum sesuai hirarki perundang-undangan dan kearifan lokal.
 - 3) Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum.
 - 4) Penegakan supremasi hukum dan HAM, pembangunan budaya hukum, harmonisasi produk hukum, pengembangan jaringan advokasi hukum pada masyarakat, dan perluasan akses masyarakat terhadap keadilan.
 - 5) Meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum.
 - 6) Penghargaan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan.
- Adapun prioritas lokasi meliputi daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola yang baik (good governance). Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:
- 1) Pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan membentuk kelas menengah yang kuat di bidang ekonomi dan pendidikan.
 - 2) Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pengembangan diklat aparatur.
 - 3) Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal
 - 4) Peningkatan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

- 5) Penataan fungsi-fungsi positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak.
- 6) Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan.
- 7) Peningkatan kualitas kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
- 8) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-gov; e-procurement; e-bisnis).
- 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan aparatur pemerintah.

Adapun prioritas lokasi meliputi lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota.

e. Mengembangkan Kapasitas Pemerintah Daerah.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan, kapasitas keuangan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
- 2) Penguatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan SDA; pemberian kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasinya, dan peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif.
- 4) Peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
- 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan pemerintah dan anggota DPRD.

Adapun prioritas lokasi meliputi DPRD provinsi, kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

f. Meningkatkan Kerjasama Antardaerah

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah.

- 2) Menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.
- 3) Pengkajian potensi dan peluang kerjasama antar daerah.
- 4) Pemanfaatan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah.
- 5) Pengembangan kerjasama antar daerah berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif.

Adapun prioritas lokasi meliputi kabupaten/kota yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

g. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Baik dan Profesional.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Fasilitasi penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah daerah dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 2) Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur pemerintahan melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.
- 3) Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta kompetensi para penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan publik.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota

h. Meningkatkan Peranan Komunikasi dan Informasi.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Mewujudkan pemerataan akses informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen.
- 2) Pengembangan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas;
- 3) Fasilitasi pengembangan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan

mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis.

Adapun prioritas lokasi meliputi Pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

i. Mengembangkan Proses dan Budaya Politik.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Membangun kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi melalui berbagai wacana dan media.
- 2) Peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan pejabat publik.
- 3) Fasilitasi dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan.
- 4) Pengembangan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
- 5) Mengembangkan wacana dialog dengan semua stakeholders dalam proses prumusan kebijakan. Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

4. Arah kebijakan untuk misi Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah, meliputi:

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.
- 2) Peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi pendidikan kejuruan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agribisnis, pariwisata, dan keunggulan lokal. • Peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan link and match .
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

- 4) Pengembangan budaya baca.
- 5) Peningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.
- 6) Peningkatkan budaya olah raga dan prestasi olah raga di kalangan masyarakat.
- 7) Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
- 8) Pencapaian penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi netto (NRR) sama dengan 1, atau angka fertilitas total (TFR) sama dengan 2,1.
- 9) Memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Adapun prioritas lokasi meliputi Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat

b. Meningkatkan Perekonomian Daerah.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Penguatan basis keunggulan komparatif daerah menjadi keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi untuk mendukung iklim usaha yang kondusif.
- 2) Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru dan pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier.
- 3) Pengembangan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar pusat-pusat pengembangan ekonomi.
- 4) Pengembangan prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
- 5) Pengembangan kelembagaan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- 6) Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian.
- 7) Pelayanan investasi dan pengembangan investasi di daerah, baik PMDN dan PMA untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas.
- 8) Pengembangan iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.

- 9) Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
- 10) Penguatan struktur perekonomian daerah agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan basis agroindustri dan pariwisata.
- 11) Penjaminan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya di daerah dalam harga yang terjangkau.
- 12) Pengembangan kepariwisataan agar mampu meningkatkan citra daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan perluasan kesempatan kerja.
- 13) Peningkatan pengelolaan keuangan negara melalui pengelolaan APBD yang bertumpu pada sistem penganggaran yang transparan, akuntabel dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.
- 14) Peningkatan efektivitas penerimaan asli daerah.
- 15) Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan), kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dan dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketahanan pangan.
- 16) Pembinaan industri yang berdaya saing dengan basis keunggulan komparatif.
- 17) Percepatan berkembangnya industri jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan.
- 18) Meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi ekspor daerah.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

c. Meningkatkan Penguasaan, Pemanfaatan dan Penciptaan Iptek.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan sumber daya

- 3) Pengembangan kapasitas SDM iptek.
 - 4) Peningkatan sumber daya anggaran riset, dan sarana dan prasarana iptek.
- Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis perkotaan, kawasan agribisnis pedesaan, kawasan ekonomi khusus
- d. Membangun Jaringan Infrastruktur wilayah yang Handal dan Terintegrasi
- Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:
- 1) Pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian daerah dan konektivitas antar wilayah.
 - 2) Fasilitasi kegiatan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan.
 - 3) Fasilitasi pengembangan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
 - 4) Fasilitasi stakeholders untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.
 - 5) Meningkatkan keberpihakan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
 - 6) pengembangan infrastruktur perhubungan untuk kegiatan transaksi perdagangan, dan pengembangan jaringan pelayanan inter dan antarmoda angkutan sehingga tidak ada lagi bentuk monopoli transportasi.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

- e. Memenuhi Pasokan Tenaga listrik di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat.
- Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:
- 1) Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerah dan keandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan yang memadai melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru (geothermal)
 - 2) Fasilitasi peluang yang lebih luas bagi investasi swasta secara lebih terbuka, kompetitif, profesional, dan terarah, bagi badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah.

- 3) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan optimalisasi peluang investasi bagi BUMN, pemerintah daerah dan swasta secara transparan, profesional

Adapun prioritas lokasi meliputi provinsi, kabupaten, dan kota.

5. Arah Kebijakan untuk misi Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, meliputi:
 - a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Terbarukan, seperti Hutan, Pertanian, Perikanan dan Perairan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Pengelolaan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab terutama SDA terbarukan yang masih dalam kondisi baik.
- 2) Pemulihan daya dukung terhadap SDA terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis untuk pencadangan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
- 3) Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
- 4) Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
- 5) Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi SDA daerah.
- 6) Sosialisai terkait dengan pengelolaan SDA yg terbarukan dan terbarukan diikuti dgn penegakan hukum dalam sengketa lahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan dan perairan.

- b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan SDA yang Tidak Terbarukan, seperti Bahan Tambang, Mineral, dan Sumber Daya Energi Fosil. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan.
- 2) Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.

- 3) Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
 - 4) Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
 - 5) Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi sumber daya alam daerah.
 - 6) Sosialisasi terkait dengan pengelolaan SDA yang terbarukan dan terbarukan diikuti dgn penegakan hukum dalam sengketa lahan. Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan dan kelautan.
- c. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan SDA yang Tidak Terbarukan, seperti Bahan Tambang, Mineral, dan Sumber Daya Energi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:
- 1) Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan termasuk pertambangan rakyat.
 - 2) Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.
 - 3) Pengembangan dan pemanfaatan nilai tambah SDA yang optimal, dan outputnya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan kepada sektor-sektor lain yang produktif.
- Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pertambangan di kabupaten, termasuk pertambangan liar.
- d. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:
- 1) Pengkajian potensi sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil beserta pemanfaatannya.
 - 2) Pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.

- 3) Peningkatan pengelolaan SDA kelautan secara terpadu antara sektor lautan dan daratan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pesisir, kawasan laut dan pantai di kabupaten/kota.

e. Mewujudkan Konservasi Sumber Daya Air.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Pengkajian potensi dan kebutuhan sumber daya air, dan kelembagaan sosial yang mengelolanya.
- 2) Pelembagaan keberlanjutan daya dukung sumber daya air dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah
- 3) Pengembangan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air.
- 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air dengan menerapkan konsep konservasi yang menjamin keberlanjutan daya dukung sumberdaya air yang ada
- 5) Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- 6) Perlindungan mata air dan air tanah.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan konservasi hutan.

f. Memperhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis dan Kekhasan SDA Hayati.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- 2) Memberdayakan institusi sosial dan ekonomi terkait dengan pengelolaan SDA di tingkat lokal.
- 3) Melakukan kajian potensi keanekaragaman hayati.
- 4) Pengembangan model hutan keanekaragaman hayati dgn mengembangkan dan memberdayakan institusi di tingkat lokal.

g. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Memanfaatkan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan.
 - 2) Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan
 - 3) Studi sumber sumber pencemaran utk mengidentifikasi dan dampak kerusakannya.
 - 4) Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup Dikawasan yg berpotensi mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- h. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan dukungan kelembagaan pengelola Sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan perluasan penerapan etika lingkungan.
 - 2) Menegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas.
 - 3) Meningkatkan dukungan sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik.
- i. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran generasi muda yang peduli terhadap isu Sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- 2) Mempersiapkan penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Meningkatkan kesadaran generasi muda utk mencintai lingkungan.
- 4) Pengembangan dan penerapan kurikulum sekolah yg ramah (pro) terhadap lingkungan hidup.

2.2 KETERKAITAN VISI DAN MISI DAN PENTAHAPAN RPJPD PROVINSI NTB 2005-2025 DENGAN PERIODESASI RPJMD

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2003-2008, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, yaitu:

“Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera”

Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 terbagi dalam 5 tahap, yaitu:

1. RPJMD ke-1: Tahun 2005-2009
2. RPJMD ke-2: Tahun 2009-2013
3. RPJMD ke-3: Tahun 2013-2018
4. RPJMD ke-4: Tahun 2018-2023
5. RPJMD ke-5: Tahun 2023-2025

Selanjutnya tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, terbagi dalam 5 tahap, yaitu:

1. RPJMD ke-1: Tahun 2005-2008
2. RPJMD ke-2: Tahun 2009-2013
3. RPJMD ke-3: Tahun 2014-2018
4. RPJMD ke-4: Tahun 2019-2023
5. RPJMD ke-5: Tahun 2024-2025

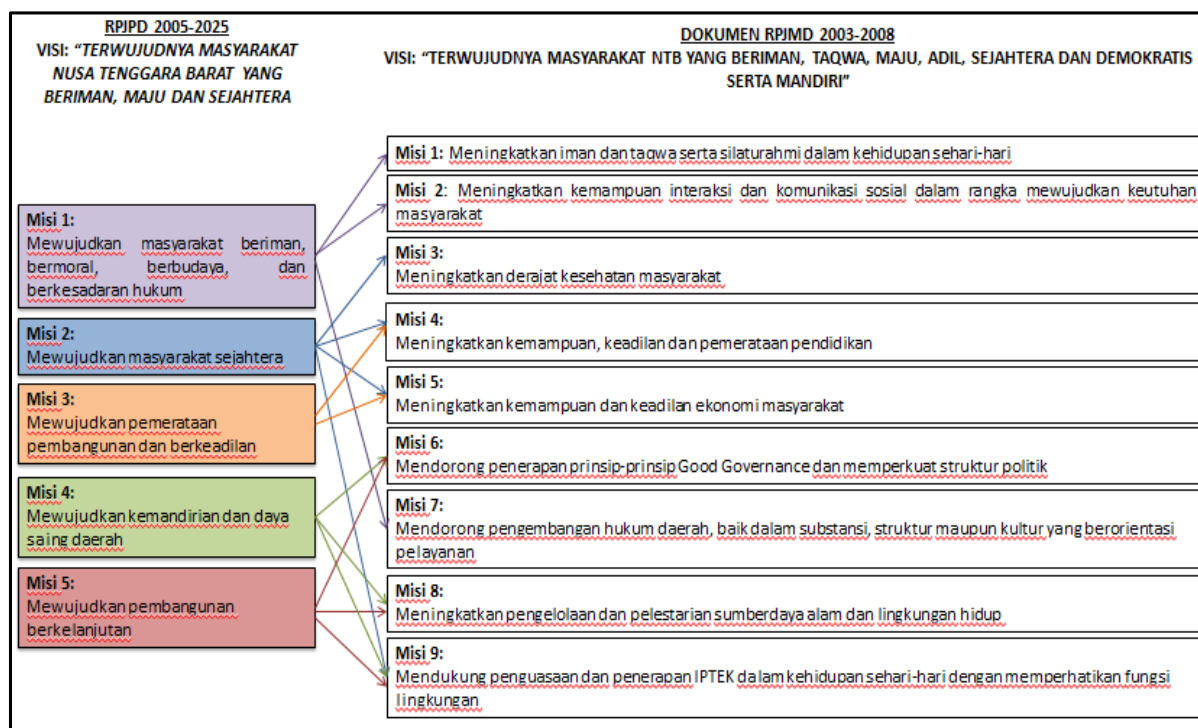
Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periode Masing-Masing RPJMD sebagai berikut:

I. Periode RPJMD ke-1

Periode RPJMD ke-1 sesuai dengan dokumen Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 ditetapkan selama tahun 2005-2008. Sementara itu, dalam Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008, perodesasi RPJMD ke-1 ditetapkan selama tahun 2003-2008.

Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Perodesasi RPJMD ke-1 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Perodesasi RPJMD ke-1

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya RPJM Daerah I diarahkan untuk menata kembali dan membangun NTB disegala bidang terutama dengan titik tekan pada penciptaan pondasi yang kokoh bagi pembangunan periode berikutnya. Oleh karena itu pembangunan pada periode/tahap ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar, peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, peletakan dasar pembangunan budaya, dan peletakan dasar pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada pembangunan kehidupan beragama, kesadaran hukum, dan budaya ditekankan pada peningkatan fungsi dan peran tokoh-tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok agama dan kelompok masyarakat. Selain itu, peran masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan peran masyarakat dilakukan setelah didahului oleh upaya peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hukum dan hak asasi. Sementara itu, pembangunan budaya dilakukan dengan penataan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial yang berakar dan unik, seperti religius, kebersamaan, dan persatuan.

Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dilakukan dengan penekanan pada penyediaan pangan dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, dilakukan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik jumlah maupun mutu gizinya, aman, dan terjangkau. Pengembangan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal juga dilakukan untuk mendukung diversifikasi pangan penduduk. Penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas pekerja melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan angka pengangguran dan angka kemiskinan menurun secara signifikan

Pembangunan pendidikan ditujukan pada penuntasan buta aksara, peningkatan rata-rata lama sekolah melalui penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Pada tahap ini untuk wilayah perkotaan wajib belajar sembilan tahun dapat dimulai penuntasan wajib belajar sembilan tahun, sementara untuk wilayah pedesaan masih dalam tahap rintisan wajib belajar sembilan tahun. Dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun dilakukan pengembangan pendidikan satu atap (sembilan tahun), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah. Penanganan pendidikan dilaksanakan sejak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi melalui upaya peningkatan pemenuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan secara bertahap. Perhatian secara proporsional untuk pelaksanaan pendidikan yang memadai termasuk pelaksanaan pendidikan di daerah pedesaan, daerah perbatasan antar provinsi dan daerah terpencil. Untuk pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai keunggulan lokal pertanian, kelautan,

industri dan pariwisata. Pembangunan sekolah kejuruan terus dilakukan agar proporsi jumlah sekolah kejuruan dan sekolah umum semakin dekat.

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan pada upaya penurunan angka kematian bayi dan kematian maternal, peningkatan umur harapan hidup, penurunan angka morbiditas, dan peningkatan persentase persalinan yang dilakukan oleh tenaga terampil (tenaga kesehatan). Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kegiatan promosi kesehatan, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, peningkatan tindakan preventasi, pengembangan sistem kesehatan yang dapat membantu meringankan beban masyarakat yang sakit, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan desa, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak. Pembangunan infrastruktur wilayah ditujukan untuk memfasilitasi pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil agar terjangkau oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat dan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan publik yang tersedia. Pada tahap ini dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi seperti peningkatan panjang dan kemantapan jalan, pembangunan pelabuhan darat dan udara, peningkatan sarana transportasi umum untuk wilayah pedesaan dan perkotaan, pembangunan waduk dan sarana irigasi pendukung lainnya, pembangunan jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih dan sanitasi. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan sektor pertanian. Hal ini dilakukan dengan revitalisasi sektor pertanian melakukan pengelolaan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab. Pembangunan sektor pertanian didukung oleh pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai sehingga memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Infrastruktur pertanian seperti sarana irigasi, jalan usaha tani, pasar, dan ketersediaan sarana transportasi yang memadai untuk mendukung arus komoditas pertanian dari daerah pedesaan ke perkotaan dan antar wilayah.

Pembangunan sumber daya alam di arahkan untuk mewujudkan pengelolaan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab terutama sumber daya alam terbarukan yang masih dalam kondisi baik. Selain itu, dilakukan pemulihan daya dukung terhadap sumber daya alam terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis

untuk pencadangan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pada lahan kritis dan lahan pertambangan dilakukan pengkajian dan pengembangan kebutuhan konservasi dan reklamasi. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan mengkaji potensi sumberdaya kelautan dan pemanfaatannya. Sementara itu, dalam rangka konservasi sumber daya air dilakukan pengkajian potensi dan kebutuhan sumber daya air, dan identifikasi potensi kelembagaan sosial untuk pengelolaan sumber daya air.

Pembangunan di bidang energi selain dilakukan dengan mengembangkan pembangkit energi listrik tenaga fosil juga mulai dijajaki kemungkinan pengembangan energi alternatif terutama energi yang terbarukan. Potensi energi terbarukan cukup besar seperti energi yang bersumber dari mikro hidro, panas bumi, biomass, arus laut, sinar matahari dan tenaga angin. Pada tahap ini mulai dilakukan berbagai studi untuk mengembangkan potensi energi tersebut. Untuk mendukung kegiatan tersebut dilakukan peninjauan kerjasama dengan berbagai pihak baik memiliki teknologi dan juga dana bagi pengembangan energi ramah lingkungan.

Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008, dinyatakan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu:

“Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Takwa, Maju Adil, Sejahtera dan Demokratis, serta Mandiri”

Kandungan rumusan visi di atas adalah:

1. **Beriman taqwa**, menggambarkan situasi dan kondisi penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang terwujud dalam masyarakat silaturahmi yang memiliki sikap menjunjung kerukunan hidup antar internal umat satu agama dan antara umat satu agama yang satu dengan umat agama lain, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong, peduli serta jujur.
2. **Maju**, menggambarkan kondisi dan situasi yang masyarakat yang mau dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari guna bergerak menuju suatu kehidupan yang semakin baik tanpa dibatasi dimensi waktu.
3. **Adil**, bermakna masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang transparan, cepat, murah, mudah, merata dan tidak diskriminatif sesuai hukum positif dan norma sosial.

4. **Sejahtera**, mengandung makna bahwa masyarakat mapu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak serta kesempatan kerja dan usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. **Demokratis**, berarti makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.
6. **Mandiri**, mengandung makna kemampuan masyarakat untuk membangun sinergi baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya guna membangun keutuhan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 9 misi yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran dan kebijakan/arah kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Misi, Sasaran, Kebijakan/Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2003-2008

No.	Misi	Sasaran	Kebijakan
1.	Meningkatkan iman dan taqwa serta silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari	1. Terwujudnya komunikasi inter dan antar umat beragama, antar kelompok masyarakat untuk mengatasi persoalan bersama 2. Terbangunnya semangat ahlaqulkarimah dikalangan aparat dalam penentuan kebijakan 3. Terbinanya keutuhan dalam keluarga	1. Peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan, forum-forum kemasyarakatan, tokoh agama dan masyarakat 2. Peningkatan pembinaan mental spritual aparat 3. Pengembangan sendi-sendi dasar pembentukan keluarga sakinah
2.	Meningkatkan kemampuan interaksi dan komunikasi sosial dalam rangka mewujudkan keutuhan masyarakat	1. Terselenggaranya dialog terbuka dan intensif dalam mewujudkan sikap saling pengertian antar kelompok etnik, masyarakat, dan agama 2. Terjadinya kerjasama lintas kebudayaan yang intensif dalam mewujudkan sikap terbuka dan pengertian antara etnik aseli dan pendatang	1. Pengembangan dialog antar kelompok etnik, masyarakat, dan agama 2. Pengembangan kerjasama lintas kebudayaan 3. Pengembangan kemitraan usaha 4. Pengembangan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Misi	Sasaran	Kebijakan
		3. Terjalinnnya interaksi antara pelaku ekonomi yang saling menguntungkan 4. Terselenggaranya sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Terfasilitasi dan terselenggaranya SPM bidang kesehatan di Kabupaten/Kota dan Provinsi 2. Terwujudnya Pola Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat 3. Terwujudnya keluarga sejahtera serta terkendalinya jumlah penduduk	1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan kesehatan 2. Peningkatan mutu lingkungan, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi terpadu 3. Fasilitasi penyediaan laboratorium lapangan 4. Meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga serta mengendalikan pertumbuhan penduduk
4.	Meningkatkan kemampuan, keadilan dan pemerataan pendidikan	1. Terfasilitasi dan terselenggaranya Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan 2. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas 3. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) 4. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung masyarakat terbelakang, terpencil, dan tidak mampu pada pendidikan dasar dan menengah 5. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pendidikan profesi	1. Menetapkan SPM dan mendorong penyelenggaraan proses Pendidikan bermutu 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas buku paket dan peralatan pendidikan 3. Penurunan angka drop out dan peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SLB pada jenjang pendidikan menengah 5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat terpencil, terbelakang dan tidak mampu 6. Pengembangan Perguruan Tinggi baik tingkat dan jenis
5.	Meningkatkan kemampuan dan keadilan ekonomi masyarakat	1. Terbangunnya kesadaran pemuda dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah 2. Terwujudnya peningkatan peran kaum perempuan	1. Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan untuk dapat lebih berperan dalam pembangunan daerah 2. Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam pembangunan daerah

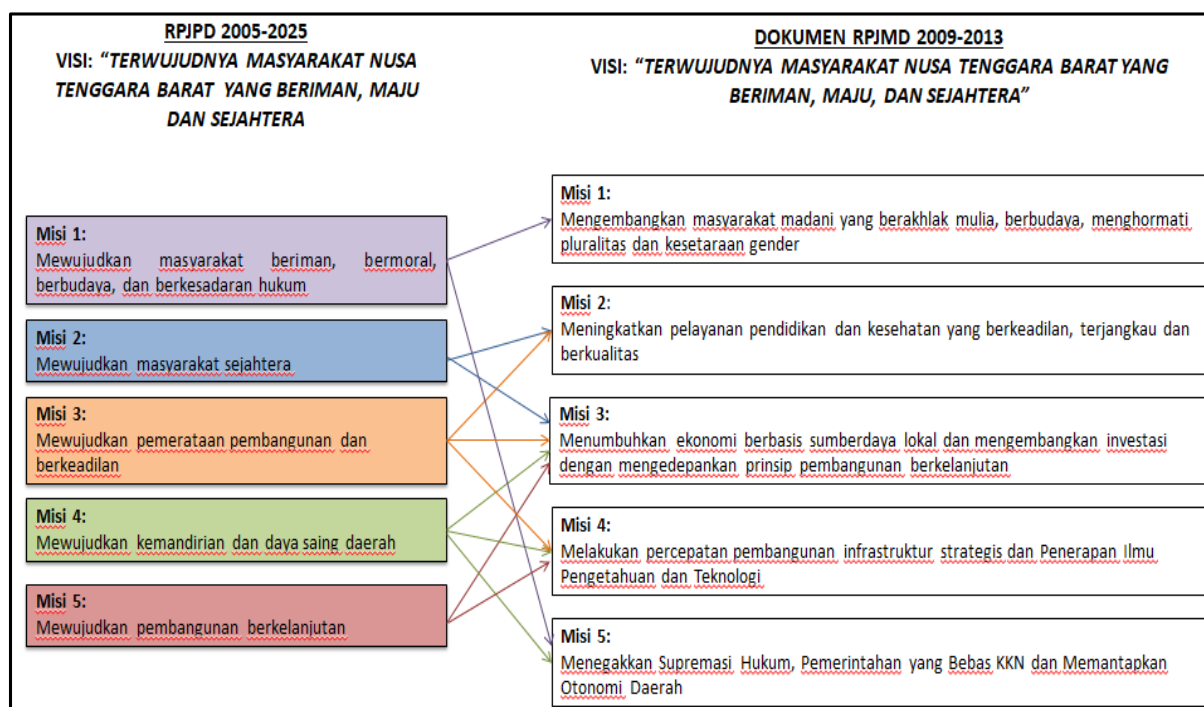
No.	Misi	Sasaran	Kebijakan
		dalam mendukung pembangunan daerah 3. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada dibawah garis kemiskinan 4. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keahlian masyarakat dalam berusaha 5. Terselenggaranya peningkatan akses masyarakat pada sumberdaya ekonomi 6. Tersalurnya tenaga kerja terampil 7. Terwujudnya peningkatan perlindungan dan penyederhanaan sistem pelayanan tenaga kerja 8. Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dalam pengembangan ekonomi	3. Pengurangan penduduk miskin secara konsisten dan terus menerus 4. Penggalan dan pengalokasian sumber-sumber penerimaan daerah guna pengurangan penduduk miskin 5. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan dana pembangunan yang masuk ke NTB 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga menengah profesional 7. Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tenaga menengah profesional 8. Peningkatan peran Koperasi dan Lembaga Keuangan dalam penyaluran kredit yang murah, mudah dan cepat 9. Peningkatan kompetensi, daya saing dan kemandirian tenaga kerja 10. Peningkatan koordinasi pelayanan perlindungan, dan pengawasan 11. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang memperhatikan tata ruang
6.	Mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan memperkuat struktur politik	1. Terlibatnya masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik 2. Tersusunnya kebijakan yang mendorong pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 3. Terbentuknya organisasi perangkat daerah yang hemat struktur kaya fungsi 4. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurus organisasi sosial politik dalam melakukan pendidikan politik masyarakat 5. Tersedianya akses informasi yang dapat dimanfaatkan oleh publik	1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik 2. Peningkatan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepentingan publik 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan rasionalisasi kelembagaan 4. Pengembangan kualitas organisasi sosial politik dalam melakukan pendidikan politik masyarakat 5. Peningkatan peran dan fungsi perangkat pengelola informasi

No.	Misi	Sasaran	Kebijakan
7.	Mendorong pengembangan hukum daerah, baik dalam substansi, struktur maupun kultur yang berorientasi pelayanan	1. Terwujudnya produk hukum yang memberikan pelayanan yang aspiratif dan adil bagi masyarakat 2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif 3. Terwujudnya peningkatan kepatuhan hukum masyarakat	1. Pengembangan Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum serta peningkatan profesionalisme aparat perancang produk hukum daerah 2. Peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan fungsional 3. Pengembangan dan pendayagunaan norma-norma sosial dan hukum positif 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat
8.	Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1. Terbangunnya kesadaran aparat dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup 2. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup 3. Terjaganya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup 2. Peningkatan koordinasi, pengendalian dan pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
9.	Mendukung penguasaan dan penerapan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan fungsi lingkungan	1. Terjadinya perubahan pandangan masyarakat tentang pemanfaatan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari secara bertahap pada organisasi profesi, institusi sosial budaya, dan masyarakat pada umumnya 2. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen	1. Mendorong pengembangan pembangunan yang berbasis IPTEK 2. Peningkatan peran pemerintah, institusi sosial dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen

II. PERIODE RPJMD ke-2

Periode RPJMD ke-2 sesuai dengan dokumen Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 ditetapkan selama tahun 2009-2013. Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013, periodisasi RPJMD ke-2 ditetapkan selama tahun 2009-2013.

Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periodesasi RPJMD ke-2 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periodesasi RPJMD ke-2

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah ke-1, RPJM Daerah ke-2 ditujukan untuk melanjutkan dan memantapkan kembali program RPJM Daerah ke-1 di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Selain itu, kegiatan pembangunan masyarakat yang beriman, bermoral dan berbudaya dan kesadaran hukum terus dilakukan dengan memantapkan fungsi dan peran agama serta budaya dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung tercapainya misi tersebut. Selain bertujuan mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman, keberhasilan pembangunan di bidang ini ditandai dengan berkembangnya kelompokkelompok budaya dan kesenian sehingga muncul produk seni dan kreativitas dari masyarakat yang menunjukkan tingginya apresiasi seni budaya masyarakat.

Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat terus dilakukan dengan penekanan pada pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Untuk meningkatkan fasilitas pembangunan yang perumahan yang memadai, layak dan

terjangkau oleh daya beli masyarakat diupayakan dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari lembaga keuangan formal dan non-formal. Selain itu, pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi, meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.

Perwujudan kesejahteraan rakyat juga dilakukan dengan meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu, dilakukan pengembangan dan penataan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar.

Pembangunan pendidikan masih ditujukan pada penuntasan buta aksara, peningkatan rata-rata lama sekolah melalui penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Pada tahap ini untuk wilayah perkotaan wajib belajar sembilan tahun sebagian besar sudah dituntaskan, sementara untuk wilayah pedesaan masih dalam tahap rintisan wajib belajar sembilan tahun untuk seluruh wilayah. Pengembangan pendidikan satu atap untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun terus dilakukan dengan menambah kuantitas sekolah dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan menengah. Penanganan pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi terus dilakukan dengan intensitas yang lebih besar baik dari segi pendanaan maupun dari cakupannya. Perhatian yang makin besar terus diberikan pada pelaksanaan pendidikan di daerah pedesaan, daerah perbatasan antar provinsi dan daerah terpencil. Pengembangan pendidikan menengah terus diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal dengan memperhatikan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh berbagai wilayah. Pembangunan sekolah kejuruan terus dilakukan agar proporsi jumlah sekolah kejuruan dan sekolah umum semakin dekat.

Pembangunan bidang kesehatan terus dilakukan dalam upaya mencapai target pembangunan yang tercermin dari berbagai indikator kesehatan seperti penurunan angka kematian bayi dan kematian maternal, peningkatan umur harapan hidup, penurunan angka morbiditas, dan peningkatan persentase persalinan yang dilakukan

oleh tenaga terampil (tenaga kesehatan). Upaya yang dilakukan pada tahap ini antara lain adalah meningkatkan kesehatan bagi kelangsungan hidup ibu dan anak, peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau pada setiap strata pelayanan, peningkatan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pembangunan sistem jaminan kesehatan daerah, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan, dan meningkatkan perilaku dan kemandirian masyarakat. Selain itu, upaya-upaya konvensional dalam meningkatkan derajat kesehatan tetap dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah meningkatkan kegiatan promosi kesehatan, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, peningkatan tindakan preventasi, pengembangan sistem kesehatan yang dapat membantu meringankan beban masyarakat yang sakit, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan desa, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak

Pembangunan infrastruktur wilayah terus dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dan mempercepat pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil. Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi terus dilakukan dalam rangka peningkatan panjang dan kemantapan jalan, pembangunan pelabuhan darat dan udara, peningkatan sarana transportasi umum untuk wilayah pedesaan dan perkotaan, pembangunan waduk dan sarana irigasi pendukung lainnya, pembangunan jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih dan sanitasi.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan sektor pertanian dengan mengembangkan produk unggulan dan program terobosan. Pertumbuhan ekonomi daerah yang berada dibawah pertumbuhan nasional sehingga perlu dilakukan inovasi dan percepatan pembangunan ekonomi. Pada tahap ini upaya peningkatan arus investasi terus dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki daya tarik dan daya saing seperti sektor pariwisata, perdagangan, hotel, restoran, dan jasa keuangan. Selain itu, pembangunan sektor pertanian terus dilakukan melalui optimalisasi fasilitasi pembangunan perdesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang, peningkatan akses informasi dan pemasaran, pengembangan lembaga keuangan, peningkatan

kesempatan kerja, pengembangan teknologi, dan pengembangan sosial capital dan human capital. Selain itu, peningkatan kinerja perekonomian daerah dilakukan dengan pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, diharapkan terjadi penguatan struktur perekonomian daerah sehingga terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Pembangunan sumber daya alam di arahkan untuk peningkatan pemulihan daya dukung terhadap sumber daya alam terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis baik di sektor kehutanan, pertanian, perikanan dan perairan. Selain itu, pembangunan sumber daya dilakukan melalui penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggungjawab pada konservasi sumber daya alam. Selain itu, dilakukan juga sosialisai terkait dengan pengelolaan SDA yg terbarukan dan terbarukan diikuti dgn penegakan hukum dalam sengketa lahan. Pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya terus dilakukan. Dalam upaya konservasi sumber daya air dilakukan pengembangan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air. Pengelolaan sumber daya air juga dilakukan dengan peningkatan kegiatan perlindungan mata air dan air tanah.

Pembangunan dibidang energi terus dilakukan dengan mengembangkan pembangkit energi listrik tenaga fosil. Selain itu, dilakukan penelitian untuk pengembangan energi alternatif terutama energi yang terbarukan. Penelitian tersebut dibarengi dengan membangun beberapa pilot project pengembangan listrik yang bersumber dari pembangkit energi terbarukan. Upaya pencarian dukungan dana dari luar terus dilakukan, namun komitmen pemerintah juga harus dibuktikan dengan kesediaan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan riset dan pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan.

Penjabaran sasaran dan kebijakan setiap misi pada periode RPJMD ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Misi, Sasaran, Kebijakan/Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Visi
Pembangunan Tahun 2009-2013**

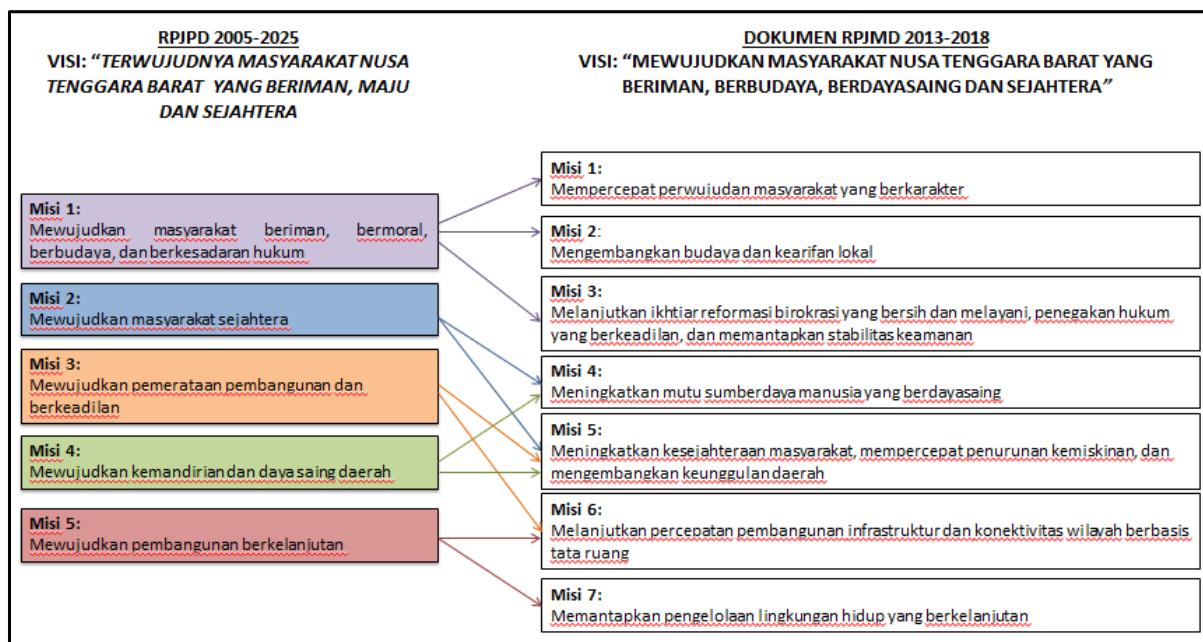
No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
1.	Mengembangkan masyarakat madani yang berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender	1. Masyarakat Religius 2. Masyarakat Berbudaya dan Beretika 3. Masyarakat Berwasasan Global 4. Kesetaraan dan Keadilan Gender di Berbagai Aspek	1. Peningkatan kesadaran dan kerukunan beragama 2. Peningkatan kesadaran dan kerukunan hidup bermasyarakat 3. Peningkatan tata susila, semangat dan perilaku masyarakat 4. Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah
2.	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas	1. Masyarakat Sejahtera 2. Masyarakat Sehat 3. Masyarakat Cerdas dan Terampil 4. Masyarakat Berwawasan IPTEK	1. Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan 2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA
3.	Menumbuhkan ekonomi berbasis sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan	1. Struktur APBD Mantap 2. Usaha Pengolahan Berbasis Pertanian 3. Iklim Usaha yang Kondusif 4. Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah 5. Surplus Sapi Potong dan Sapi Bibit 6. Masyarakat "Sadar Wisata" 7. Tenaga Kerja yang Terampil dan Produktif 8. Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang Terpadu dan Berkelanjutan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	1. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap hak-hak dasar manusia. 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber modal, sarana prasarana ekonomi 3. Peningkatan pendapatan masyarakat 4. Peningkatan aksesibilitas wilayah 5. Peningkatan harmonisasi perencanaan program pembangunan 6. Peningkatan kapasitas terpasang

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
4.	Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Infrastruktur yang Memadai 2. Tata Ruang yang Serasi, Selaras dan Produktif 3. Lingkungan Perumahan dan Perumahan Sehat 4. Kawasan Strategis, Cepat Tumbuh dan Tertinggal 5. Sistem Transportasi Terpadu 6. Sistem Komunikasi dan Informasi Antara Wilayah 7. Kebutuhan Air Baku yang Memadai 8. Kebutuhan Energi yang Memadai 9. Pembangunan Daerah yang Seimbang dan Merata 10. Sistem Pengelolaan Lingkungan Berbasis Mitigasi Bencana Lingkungan Lestari	1. Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan 2. Peningkatan kapasitas terpasang
5.	Menegakkan Supremasi Hukum, Pemerintahan yang Bebas KKN dan Memantapkan Otonomi Daerah	1. Aparatur yang Bersih dan Profesional 2. Tatalaksana Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik 3. Sistem Pelayanan Publik yang Transparan, Berkapasitas Hukum dan Tepat Waktu 4. Masyarakat Taat dan Sadar Hukum 5. Daerah yang Aman dan Tertib 6. Masyarakat Sadar Berpolitik 7. Sistem Administrasi Kependudukan yang Berkelanjutan	1. Peningkatan koordinasi penegakan hukum 2. Peningkatan kinerja lembaga pengawasan daerah 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah

III. PERIODE RPJMD ke-3

Periode RPJMD ke-3 sesuai dengan dokumen Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 ditetapkan selama tahun 2014-2018. Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, periodisasi RPJMD ke-3 ditetapkan selama tahun 2013-2018.

Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periodisasi RPJMD ke-3 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periodisasi RPJMD ke-3

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama (RPJMD ke-1) dan kedua (RPJMD ke-2), maka RPJM Daerah ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Dinamika ekonomi yang mendorong

tumbuh dan berkembangnya sektor perdagangan dan pariwisata pada tahap sebelumnya dan pembangunan infrastruktur ekonomi menjadi peluang untuk semakin mempeluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi hingga ke manca negara. Pengoperasian Bandara Internasional Lombok menjadi momentum bagi tumbuh dan berkembangnya sektor tersier sehingga diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, sektor pertanian tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan mengingat kontribusinya dalam menyediakan lapangan kerja terbesar untuk masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahap ini dan peranannya yang makin dominan terutama teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi daerah untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan jaringan yang luas. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan bagi daerah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan daya saing.

Pembangunan ekonomi terus dilakukan guna mencapai pertumbuhan yang optimal dan perubahan struktur ekonomi. Peningkatan pertumbuhan dan nilai tambah sektor pertanian terus diupayakan dengan mengembangkan agroindustri untuk beberapa komoditi unggulan dan meningkatkan akses dan mutu infrastruktur yang ada serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat ditingkatkan. Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB terus diupayakan untuk dikurangi dengan mengembangkan sektor jasa dan sektor industri. Kedua sektor tersebut diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi sehingga membawa dampak pada meluasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dengan demikian, angka pengangguran dan angka kemiskinan dapat diturunkan.

Pembangunan dibidang pendidikan terus dilakukan dalam upaya mencapai angka melek huruf 100 persen untuk kelompok umur 15-45 tahun. Selain itu, pada tahap ini rata-rata sekolah telah mencapai sembilan tahun sehingga wajib belajar sembilan tahun tercapai pada periode/tahap ini. Namun demikian, pengembangan pendidikan satu atap untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun terus dilakukan dengan menambah kuantitas sekolah dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan menengah terutama di daerah-daerah pedesaan, daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah terisolasi. Penanganan pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi terus dilakukan dengan intensitas yang lebih besar baik dari segi

pendanaan maupun dari cakupannya sehingga akses dan mutunya meningkat. Pengembangan pendidikan menengah terus diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal dengan memperhatikan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh berbagai wilayah. Pembangunan sekolah kejuruan terus dilakukan agar proporsi jumlah sekolah kejuruan dan sekolah umum pada periode ini mencapai 40:60.

Pembangunan bidang kesehatan diupayakan untuk memperkuat peningkatan upaya pencegahan melalui peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan serta pengendalian penyakit menular serta tidak menular. Selain itu, peningkatan jenis, mutu, jumlah tenaga kesehatan dilakukan seiring dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Untuk mendukung pendanaan pelayanan kesehatan dikembangkan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan.

Pembangunan infrastruktur daerah diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat yang produktif dan memiliki daya saing. Rencana pembangunan perluasan landasan pacu Bandara Internasional Lombok harus dapat dirampungkan pada tahap ini. Begitu juga dengan rencana pembangunan Pelabuhan Nusantara di Lombok Selatan dan Lombok Utara diupayakan dimulai pada tahap ini. Pada tahap ini seluruh jalan baik provinsi dan jalan kabupaten sebagian besar sudah dalam kondisi mantap (baik) sehingga dapat meningkat efisiensi di bidang transportasi. Di bidang kelistrikan, pada tahap dilakukan optimalisasi pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerah dan keandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan yang memadai. Selain itu, beberapa pembangkit tenaga dengan energi terbarukan sudah mulai dioperasikan dalam jumlah yang signifikan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan pemantapan kapasitas personal dan

kelembagaan konservasi sumber daya alam daerah. Selain itu, dilakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam yang ada dapat dipelihara dan kemudian dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan pada masa yang akan datang.

Penjabaran sasaran dan kebijakan setiap misi pada periode RPJMD ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Misi, Sasaran, Kebijakan/Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2013-2018

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
1.	Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter	1. Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam 2. Berkembangnya kegiatan rumah ibadah 3. Terwujudnya masyarakat yang tertib 4. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama 5. Tersedianya pemuka agama yang berkualitas 6. Tersedianya informasi yang edukatif 7. Pelaksanaan pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah 8. Berkurangnya konflik sosial 9. Meminimalisir berkembangnya paham radikal di Masyarakat 10. Terwujudnya ketahanan ipoleksosbudhankam	1. Pembangunan sarana prasarana ibadah, aktivitas keagamaan dan pemberdayaan sosial ekonomi ummat 2. Peningkatan kegiatan ibadah 3. Pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi ummat 4. Pemasyarakatan budaya tertib 5. Pengembangan dan Peningkatan kualitas lembaga-lembaga keagamaan 6. Pengembangan metode dakwah dan ceramah 7. Pengembangan wawasan Pembangunan daerah 8. Pengembangan Literasi Media 9. Kurikulum sekolah berbasis muatan lokal 10. Masyarakat rawan konflik 11. Nilai-nilai keagamaan 12. Ideologi nasional dan budaya daerah
2.	Mengembangkan budaya dan kearifan lokal	1. Meningkatnya jumlah pranata ada	1. Awig-awig dan seluruh aspek kehidupan masyarakat 2. Nilai-nilai Budaya Lokal

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
	Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan	2. Terwujudnya masyarakat /budayawa/seniman yang kreatif dan inovatif 3. Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif 4. Tersedianya sanggar seni dan budaya yang profesional 5. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal 6. Tersedianya informasi budaya dan kearifan lokal 7. Terpeliharanya situs-situs dan peninggalan budaya lainnya 8. Terpeliharanya bahasa dan sastra lokal 9. Terlindunginya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal 10. Tersedia, terpelihara dan ter-sebar nya koleksi daerah berupa naskah kuno, karya tulis, karya cetak dan karya rekam	3. Museum, Taman Budaya maupun lokasi peninggalan budaya lainnya 4. Penciptaan kreasi seni dan budaya 5. Ragam adat istiadat dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari 6. Khasanah budaya 7. Pada wilayah obyek-obyek wisata budaya 8. Kajian, pengembangan dan pemanfaatan Bahasa Ssambo 9. Karya seni budaya dan nilai kearifan lokal 10. Naskah kuno/klasik dan koleksi deposit daerah NTB
3.	Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan	1. Meningkatnya tatakelola pengaduan pelayanan publik 2. Terwujudnya aparatur yang profesional 3. Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai 4. Terselamatkan nya dokumen/ arsip daerah 5. Meningkatnya masyarakat yang menggunakan layanan informasi berbasis IT 6. Terwujudnya aturan hukum yang efektif 7. Terfasilitasinya aparat hukum yang profesional	1. SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota 2. Peningkatan kompetensi pelayan publik 3. Penerapan RAD PPK 4. Peningkatan kualitas sarana prasarana termasuk layanan informasi 5. Naskah khasanah NTB 6. Pengembangan e-government 7. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 8. Aparat penegak hukum Peraturan Daerah/Perundangan lainnya

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
		8. Terfasilitasinya sarana prasarana penegakan hukum yang memadai 9. Terwujudnya aparatur, masyarakat sadar hukum 10. Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba 11. Terwujudnya lembaga usaha yang akuntabel 12. Tersedianya pelaku usaha yang profesional 13. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah 14. Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik 15. Terwujudnya pengawasan yang profesional 16. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik 17. Tertatanya otonomi daerah 18. Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif 19. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum 20. Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang bersih dan profesional 21. Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang memadai (POL PP, PPNS, Polisi Kehutanan)	9. Sistem komunikasi terpadu antar aparat penegak hukum 10. Penyadaran perbuatan melanggar hukum 11. Pencegahan dan penanganan masalah tanah terlantar dan tanah konflik 12. Kalangan generasi muda, aparatur dan masyarakat 13. Koperasi, UMKM dan Badan Usaha Milik Daerah 14. Kualitas pengelolaan usaha 15. Proses perencanaan dan proses monitoring evaluasi prgram/kegiatan utama dan program/kegiatan terobosan serta kegiatan pendataan/ informasi pembangunan daerah 16. Administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah 17. Peningkatan kualitas SDM auditor 18. Pendidikan kesadaran politik masyarakat 19. Penyelenggaraan pemerintahan daerah 20. Kepekaan terhadap masalah sosial politik 21. Kamtibmas dan tertib hukum 22. Pendidikan mental dan spiritual 23. Rekrutmen Satpol PP, PPNS dan Jagawana/PolHut

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
4.	Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing	1. Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas 2. Terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Generasi Emas NTB 2025) 4. Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten 5. Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai 6. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan 7. Terwujudnya prestasi olahraga 8. Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 9. Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang memadai 10. Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang lebih profesional 11. Tersedianya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antar provinsi dan dunia usaha 12. Terdistribusinya penduduk ke daerah transmigrasi	1. Sinergi kegiatan pembangunan sosial 2. Standart pelayanan sosial dasar 3. Pendidikan pra nikah, Kesehatan anak dan ibu melahirkan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, gizi buruk, sanitasi, air bersih layak minum, penderita gangguan jiwa, penyandang cacat, pendidikan universal, PAUD, pendidikan non formal, keaksaraan usaha mandiri dan keluarga berencana 4. Tenaga medis, tenaga pendidik dan pekerja sosial 5. Sarana Prasarana: pendidikan dan kesehatan termasuk RSUD Provinsi dan UPT sosial dan tenaga kerja 6. PHBS 7. Cabang olah raga unggulan 8. Layanan kesehatan, pendidikan, latihan kerja dan kesempatan kerja 9. BLK, KLP dan lembaga pendidikan keterampilan usaha lainnya 10. Kualitas pelayanan 11. Jenis usaha pariwisata dan agroindustri 12. Transmigrasi luar daerah
5.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan	1. Terwujudnya rencana pembangunan ekonomi yang berkualitas 2. Tersedianya data dan informasi potensi SDA	1. Sinergi kegiatan pembangunan ekonomi 2. Database potensi SDA 3. Pemanfaatan TTG oleh masyarakat

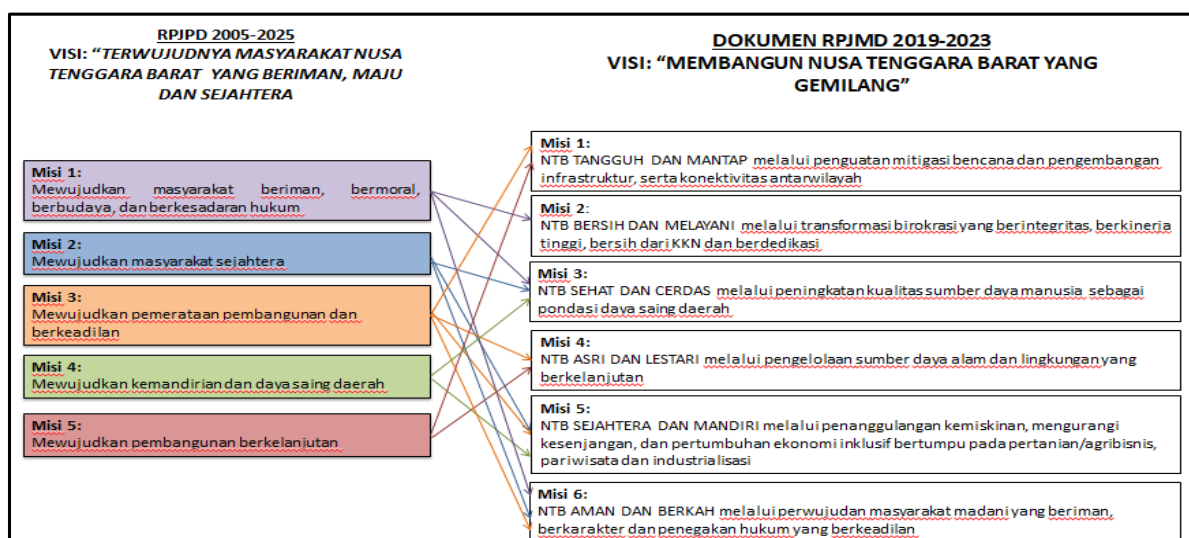
No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
	kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah	3. Termanfaatkannya Teknologi Tepat Guna 4. Meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan 5. Meningkatkan kunjungan wisatawan 6. Terwujudnya pengembangan atraksi dan daya tarik wisata 7. Terwujudnya promosi/pemasaran obyek pariwisata 8. Tersediannya sarana prasarana produksi yang memadai 9. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah 10. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat 11. Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah Tersediannya data dan informasi peluang investasi yang akurat 12. Berkembangnya investasi 13. Terwujudnya ekspor daerah 14. Tersediannya data dan informasi potensi PAD yang akurat 15. Tersediannya sistem pelayanan PAD 16. Tersediannya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya 17. Tersediannya sarana prasarana perekonomian yang memadai 18. Tersediannya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah	4. Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan 5. Obyek wisata unggulan 6. Meningkatkan kualitas atraksi dan daya tarik wisata 7. Pasar wisata dunia 8. Peralatan industri kecil menengah 9. Tanaman padi dan palawija 10. Lahan kering dan sawah 11. Padi, jagung, kentang, kedelai, kopi, kakao dan jambu mete 12. Komoditi gaharu, ketak, kemiri, madu dan rotan 13. Komoditas ekspor rumput laut, udang dan kerapu 14. Komoditi sapi 15. Komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta hasil hutan bukan kayu 16. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta hasil hutan bukan kayu 17. Kerajinan industri dan makanan olahan 18. Pendampingan petani, peternak, nelayan dan masyarakat pesisir serta masyarakat sekitar kawasan hutan 19. Pengembangan ekonomi kreatif 20. UMKM dan IKM 21. BUMD dan swasta 22. Database investasi 23. PTSP ONLINE 24. Komoditi unggulan daerah 25. Database sumber-sumber PAD 26. Sistem pelayanan Online

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
			27.Database dana non pemerintah daerah 28.Sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran Penyiapan bahan baku, olahan dan pemasaran
6.	Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang	1. Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas 2. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata 3. Meningkatnya penumpang angkutan udara dan laut 4. Terwujudnya rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang 5. Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang 6. Terwujudnya permukiman yang sehat dan nyaman	1. Sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah 2. Sistem perhubungan udara, sistem perhubungan darat, sistem perhubungan laut, sumber air baku dan air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sanitasi dan prsampahan/limbah 3. Sistem jaringan lokal, nasional dan internasional 4. Kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas Kabupaten/Kota 5. Aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha Rumah tidak layak huni dan kampung kumuh
7.	Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas 2. Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan 3. Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup 4. Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD) 5. Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari 6. Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana	1. Sinergi kegiatan pembangunan lingkungan hidup 2. Masyarakat perkotaan 3. Masyarakat kawasan hutan, bantaran sungai, kawasan rawan bencana pesisir laut dan pulau-pulau kecil 4. Dampak penambangan liar terhadap lingkungan hidup 5. Kawasan Geopark, Kawasan hutan, kawasan bantaran sungai, kawasan rawan bencana, kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, KSP fungsi

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
		7. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi 8. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana 9. Terwujudnya kawasan tangguh bencana	lindung dan konservasi serta berbagai sumber daya hayati, keanekaragaman hayati dan plasma nutfah 6. Database daerah rawan bencana dan perubahan iklim 7. Early Warning System, Pusdalops 8. Masyarakat disekitar kawasan rawan bencana, dan organisasi kemasyarakatan 9. Kawasan rawan bencana

IV. PERIODE RPJMD ke-4

Periode RPJMD ke-4 sesuai dengan dokumen Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 ditetapkan selama tahun 2019-2023. Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013, periodisasi RPJMD ke-4 ditetapkan selama tahun 2019-2023. Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periodisasi RPJMD ke-4 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periodisasi RPJMD ke-4

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah ke-3, RPJM Daerah ke-4 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agroindustri terutama pada beberapa komoditi unggulan sejalan kemajuan di dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Struktur perekonomian daerah yang makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan, sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Pembangunan infrastruktur pada tahap ini ditandai dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai terutama untuk infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik, air bersih, perumahan dan pemukiman, dan sarana telekomunikasi dan informasi. Rasio elektrifikasi sudah di atas 95%, sementara akses rumah tangga terhadap air bersih mencapai 95%, dan semua desa telah mendapatkan aliran energi listrik. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian seperti irigasi, dam, sumur bor, dan jalan usaha tani. Ketersediaan perumahan dan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat semakin mendorong berkurangnya kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Selain itu, dengan pemukiman yang layak insiden bencana kebakaran dapat diminimalisasi.

Pada tahap ini, pembangunan dalam bidang kesejahteraan masyarakat telah mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat yang ditandai semakin meningkatnya fasilitasi lembaga jaminan sosial. Selain itu, kualitas

sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif. Dibiidang kesehatan, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat telah meningkat sehingga umur harapan hidup meningkat, angka kematian bayi dan kematian maternal menurun, dan tingkat morbiditas juga menurun. Selain itu, kesetaraan gender meningkat yang ditandai oleh meningkat indeks pemberdayaan gender (IDG) dan indeks pembangunan gender (IPG), penanganan anak terlantar semakin sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dan kesejahteraan dan perlindungan anak meningkat.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode RPJP Daerah mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah maju lainnya dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Selain itu, konflik antar kelompok masyarakat berhasil diminimalisasi karena peran para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nilai-nilai agama dan budaya telah tertanam dengan baik dan kelembagaan sosial masyarakat telah berfungsi dengan baik.

Penjabaran sasaran dan kebijakan setiap misi pada periode RPJMD ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Misi, Sasaran, Kebijakan/Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2019-2023

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
1.	NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur, serta konektivitas antarwilayah	1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana. 2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah. 3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.	1. Melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana 2. Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis 3. Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern 4. Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
			5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan 6. Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah
2.	NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah. 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. 3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Meningkatnya Profesionalisme ASN. 5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.	1. Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporang Keuangan Daerah, koordinasi unsur pendukung pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD tepat waktu 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan 3. Meningkatkan konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dengan menerapkan perencanaan berbasis elektronik 4. Mendorong perencanaan yang berorientasi kepada hasil (outcome) yang terukur dan relevan 5. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 6. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme APIP 7. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan 8. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja 9. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan 10. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur 11. Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN 12. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi serta Manajemen Kinerja dan Disiplin dengan Menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
			13. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur 14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik 15. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan 16. Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik 17. Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik
3.	NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan 3. Meningkatkan kapasitas Tim Kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah kesehatan 4. Meningkatkan luasan fasilitas kesehatan yang terstandar 5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat 7. Meningkatkan layanan Posyandu yang unggul dan berkualitas 8. Mengembangkan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
			9. Meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau 10. Mewujudkan pemerataan penyebaran, ketercukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan 11. Mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan 12. Mengirim seribu putra/putri NTB sekolah ke luar negeri 13. Memfasilitasi keminatan siswa melalui Program "Ayo Bercitacita" 14. Memfasilitasi pelatihan TOEFL/IELT bagi putra/putri NTB yang akan melanjutkan sekolah ke Luar negeri 15. Melakukan Reengineering SMK 16. Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas 17. Meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih 18. Meningkatkan ketersediaan sarana olahraga
4.	NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. 2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.	1. Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi, masyarakat dan pemerintahan 2. Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan 3. Memperkuat regulasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil 4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K 5. Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah 6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
5.	NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian/agribisnis, pariwisata dan industrialisasi	1. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas. 3. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin 4. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 5. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas. 6. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin 7. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman 8. Konsumsi Pangan. 9. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin. 10. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok. 11. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi	1. Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan 2. Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan Pengembangan produk pertanian 3. Meningkatkan kapasitas SDM pertanian 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan 5. Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah 6. Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi 7. Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin 8. Mendorong Peningkatan Keragaman Ketersediaan Dan Konsumsi Pangan Serta Kualitas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) 9. Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 10. Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan 11. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik 12. Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan 13. Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang-barang kebutuhan pokok 14. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perdagangan daerah 15. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan perdagangan daerah 16. Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah 17. Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
		Kebutuhan Hidup. 12. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata. 13. Meningkatnya Daya Saing Industri. 14. Menurunnya Pengangguran Terbuka	18. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata 19. Meningkatkan kualitas atraksi pariwisata 20. Pengujian dan sertifikasi alat produksi 21. Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis 22. Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan 23. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM 24. Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah 25. Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja 26. Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja 27. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja 28. Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan
6.	NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	1. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat. 2. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah. 3. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat. 4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan	1. Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat 2. Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya dan cagar budaya dengan menjadikan Islamic Center, Istana Dalam Loka, Asi Mbojo, dan cagar budaya lainnya sebagai pusat peradaban 3. Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum 4. Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat,

No.	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
		Perlindungan Anak	Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice 5. Meningkatkan Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat 6. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah 7. Meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam politik 8. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga 9. Meningkatkan pemenuhan Hak anak melalui 5 Klaster KLA

V. PERIODE RPJMD ke-5

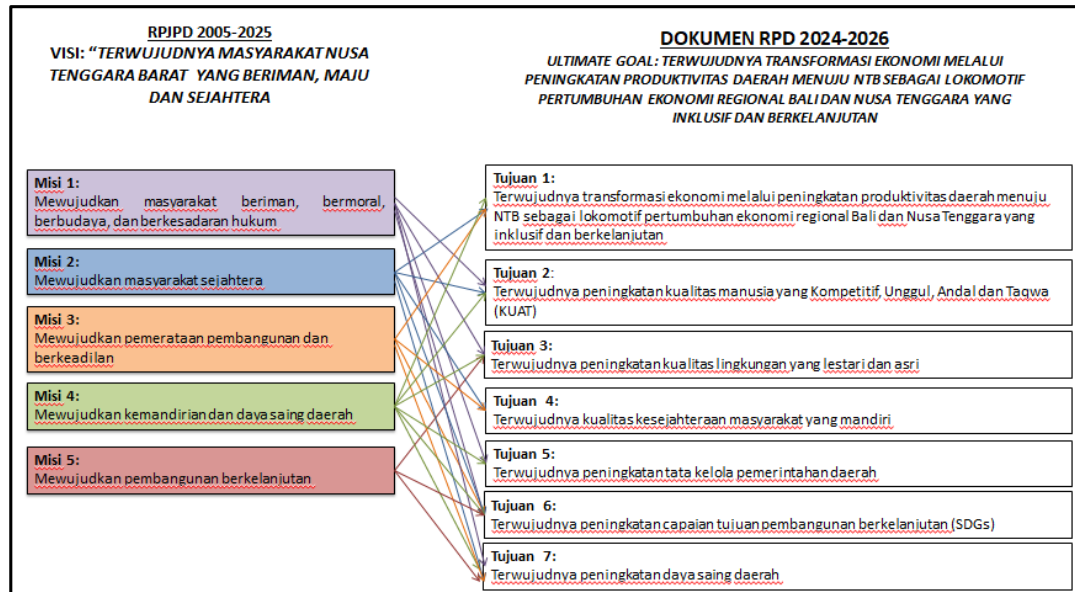
Periode RPJMD ke-5 sesuai dengan dokumen Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 ditetapkan selama tahun 2024-2025. Sementara itu, dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, periodisasi RPJMD ke-5 atau disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun ditetapkan selama tahun 2024-2026. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah ke-4, maka RPJM Daerah ke-5 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kondisi beriman, maju dan sejahtera akan terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi yang handal, tercapainya pemenuhan kebutuhan air bersih dan energi listrik, serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Hal ini bisa terwujud karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mengembangkan komoditas unggulan yang mempunyai kontribusi yang besar

terhadap penciptaan kesempatan kerja dan penciptaan nilai tambah. Selain itu, pembangunan ekonomi yang dilakukan telah diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam pembangunan sosial, pembangunan dilakukan dengan berupaya mengoptimalkan mutu dan akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan berbagai pelayanan dasar lainnya. Pelayanan sosial dasar dilakukan dengan memperhatikan bahwa layanan sosial merupakan hak asasi manusia sehingga setiap orang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, pemberian subsidi pada pelayanan dasar harus diberikan oleh pemerintah sebagai pemegang amanah melaksanakan pembangunan. Pembangunan budaya dilakukan dengan internalisasi nilai-nilai budaya yang positif mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan revitalisasi lembaga budaya masyarakat.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya serta kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah memasuki pasar global. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Revitalisasi kelembagaan pengelola sumber daya alam dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Penghargaan terhadap kearifan lokal menjadi kata kunci dalam melestarikan sumber daya dan lingkungan hidup. Upaya konservasi harus terus dioptimalkan mengingat tantangan berupa pemanasan global dan perubahan iklim memberikan pengaruh yang besar terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periode RPJMD ke-5 atau RPD Tahun 2024-2026 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 5 Keterkaitan Visi-Misi, dan Pentahapan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Periode RPJMD ke-5 atau RPD Tahun 2024-2026

BAB III CAPAIAN KINERJA RPJPD PROVINSI NTB 2005-2025

3.1 Capaian Kinerja Indikator Makro Daerah

Indikator makro daerah Provinsi NTB terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pendapatan Per Kapita dengan pendekatan Pengeluaran Per Kapita, Ketimpangan Pendapatan (gini ratio), dan PDRB Per Kapita.

Pencapaian indikator makro daerah mengiringi perjalanan panjang pembangunan daerah Provinsi NTB dalam 20 tahun terakhir terus mengalami dinamika yang diawali dengan perencanaan strategis dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) periode 2003-2008, dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2009-2013, RPJMD periode 2013-2018, dan RPJMD periode 2019-2023.

Capaian pembangunan NTB diawal periode tahun 2003-2008, masih jauh dari kata "sejahtera". Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka buta huruf yang mencapai 21,73%, tingkat partisipasi Angkatan kerja hanya mencapai 69,16% dengan tingkat pengangguran mencapai 10,29%. Angka rata-rata lama sekolah 6,25 tahun, berada dibawah angka rata-rata nasional sebesar 6,7 tahun. Pada sektor kesehatan, masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain angka kematian bayi (AKB) dan angka usia harapan hidup (UHH) rata-rata penduduk Nusa Tenggara Barat, tercatat masing-masing 81 per 1000 kelahiran dan 57,8 tahun. sedangkan AKB dan rata-rata UHH secara nasional mencapai 46 per 1000 kelahiran dan 66,2 tahun pada waktu yang sama. Sementara itu, pada aspek kemiskinan, tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mencapai 26,34%, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9% dan rata-rata pengeluaran per kapita mencapai Rp. 594.420. Keadaan ini mendorong perencanaan pembangunan pada periode 2003-2008 sebagaimana tertuang dalam Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 mengusung tiga isu strategis, yaitu: (1) Peningkatan penanggulangan kemiskinan; (2) Peningkatan derajat kesehatan; dan (3) Peningkatan kualitas pendidikan.

Seiring berjalannya waktu, pencapaian pembangunan di Provinsi NTB menunjukkan hasil yang positif dan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal

ini sejalan dengan berbagai capaian pembangunan telah berhasil diwujudkan di Provinsi NTB. Pada aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi dengan tambang terus mengalami kenaikan dari 1,71% pada awal RPJPD Provinsi NTB 2005-2025, hingga tahun 2022 dapat tumbuh sebesar 6,95%, pertumbuhan ini diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%, meskipun di tahun 2018 mengalami kontraksi diakibatkan oleh adanya bencana gempa bumi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi mencapai 4,5%. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan dalam RPJPD yang diharapkan dapat terus ditingkatkan hingga tahun 2025.

Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Provinsi NTB Berdasarkan Periodeasasi RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2005	REALISASI			
				RPJMD Tahap I 2003-2008	RPJMD Tahap II 2009-2013	RPJMD Tahap III 2013-2018	RPJMD Tahap IV 2019-2022
1	Pertumbuhan Ekonomi:	%					
	- Dengan Tambang Bijih Logam	%	1,71	2,82	5,15	-4,5	6,95
	- Tanpa Tambang Bijih Logam	%	4,05	6,95	5,42	3,2	3,42
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,29	6,13	5,3	3,58	2,89
3	Angka Kemiskinan	%	25,92	23,81	17,97	14,75	13,68
4	PDRB Per Kapita						
	- PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp.000	11.852,96	13.331,40	14.809,84	18.020,50	18.648,19
	- PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. 000	18.977,32	17.302,45	15.627,57	19.091,26	28.672,54
5	Gini Ratio	Poin	0,331	0,33	0,36	0,372	0,374
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	62,42	64,12	63,76	67,3	69,46

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, berdampak pada indikator lain yang juga menunjukkan progresivitas yang sangat baik. Hal ini ditunjukan dari menurunnya angka pengangguran dari 10,29% pada tahun 2005 menurun menjadi 2,89% pada tahun 2022, jauh melampaui target pada tahun 2025 yang diharapkan dapat diturunkan pada angka minimal 5%. Dengan demikian selama periode tersebut, Provinsi NTB mampu mengurangi angka pengangguran sebesar 7,40%. Begitu juga halnya angka kemiskinan dari 25,92% pada tahun 2005 dapat diturunkan sampai 50% menjadi 13,68% tahun 2022, meskipun belum

memenuhi target akhir RPJPD tahun 2025 yang diharapkan dapat diturunkan pada angka satu digit atau dibawah 10%, namun selama periode tersebut, Provinsi NTB mampu mengurangi angka pengangguran sebesar 12,14% atau hampir separuh. Pada indikator PDRB Perkapita, meskipun terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sesuai target, tetapi pertumbuhannya sangat lambat dari Rp. 11,8 juta pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 18,65 juta pada tahun 2022. Sementara itu pada sisi ketimpangan, ada kecenderungan ketimpangan di NTB terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2005 tingkat ketimpangan di NTB mencapai 0,331 dan meningkat menjadi 0,374 pada tahun 2022.

Pada aspek Pembangunan Manusia, masih diperlukan kerja keras untuk mewujudkannya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian Provinsi NTB masih jauh dibawah rata-rata capaian nasional, sementara amanat RPJPD diharapkan pada tahun 2025 tingkat capaian pembangunan manusia di NTB minimal setara dengan rata-rata capaian nasional. Jika dilihat pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2005 IPM NTB mencapai 62,42 meningkat menjadi 69,46, dengan demikian dalam 18 tahun terakhir IPM NTB hanya tumbuh sebesar 11,31%.

3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator dan Target RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan RPJPD Provinsi NTB 2005-2025, terdapat beberapa indikator kinerja yang secara implisit disebutkan yang disertakan target yang akan dicapai pada akhir periode RPJPD pada tahun 2025, meskipun tidak semua sasaran pokok memiliki indikator dan target kinerja. Adapun beberapa indikator kinerja dan target akhir pada tahun 2025 dalam RPJPD Provinsi NTB 2005-2025 dapat identifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator dan Target RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR PADA TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi:	%	Naik
	- Dengan Tambang Bijih Logam	%	
	- Tanpa Tambang Bijih Logam	%	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	≤ 5%
3	Angka Kemiskinan	%	< 10%
4	PDRB Per Kapita		

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR PADA TAHUN 2025
	- PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp.000	Naik
	- PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. 000	Naik
5	Paritas daya beli		
6	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12 Tahun
7	Angka Buta Huruf	%	0%
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	$\geq$ Rata-rata Nasional
9	Angka Kematian Bayi	Kasus	$\leq$ Rata-rata Nasional
10	Angka Kematian Bayi	Kasus	$\leq$ Rata-rata Nasional
11	Prevalensi Gizi kurang pada anak Balita	%	$\leq$ Rata-rata Nasional
12	Gini Ratio	Poin	Berkurang
13	Persentase Rumah Layak Huni	%	100%
14	Persentase kawasan kumuh	%	0%
15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	$\geq$ rata-rata Nasional
16	Rasio Elektrifikasi	%	95%

Hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran pokok pembangunan 2005-2025 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi NTB 2005-2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Pembangunan Indikator Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025

Masing-Masing Periode RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2005	REALISASI				TARGET AKHIR PADA TAHUN 2025	CAPAIAN NASIONAL
				RPJMD Tahap I 2003-2008	RPJMD Tahap II 2009-2013	RPJMD Tahap III 2013-2018	RPJMD Tahap IV 2019-2022		
1	Pertumbuhan Ekonomi:	%						Naik	
	- Dengan Tambang Bijih Logam	%	1,71	2,82	5,15	-4,5	6,95		5,31
	- Tanpa Tambang Bijih Logam	%	4,05	6,95	5,42	3,2	3,42		
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,29	6,13	5,3	3,58	2,89	≤ 5%	6,49
3	Angka Kemiskinan	%	25,92	23,81	17,97	14,75	13,68	< 10%	9,71
4	PDRB Per Kapita								
	- PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp.000	11.852,96	13.331,40	14.809,84	18.020,50	18.648,19	Naik	40.776
	- PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. 000	18.977,32	17.302,45	15.627,57	19.091,26	28.672,54	Naik	62.236
5	Paritas Daya Beli		623.200	633.380	8.950.000	10.640.000	10.681.000		11.156
6	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,6	6,7	6,54	7,03	7,61	12 Tahun	8,69
7	Angka Buta Huruf	%	21,21	20,15	15,33	12,58	11,03	0%	
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	60,5	61,5	64,74	65,87	67,07	≥ Rata-rata Nasional	71,57
9	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	68,96	61,52	54,08	7,91	8,27	≤ Rata-rata Nasional	
10	Angka Kematian Ibu	per 1000 KH	305,5	92	240,9	90,49	101,82	≤ Rata-rata Nasional	
11	Prevalensi Gizi kurang pada anak Balita	%	3,2	3,4	18,27	26,4	5,75	≤ Rata-rata Nasional	
12	Gini Ratio	poin	0,331	0,33	0,36	0,372	0,374	Berkurang	0,381
13	Persentase Rumah Layak Huni	%		84,57	72,89	56,75	62,3	100%	60,66
14	Persentase kawasan kumuh	%						0%	
15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	62,42	64,12	63,76	67,3	69,46	≥ rata-rata Nasional	72,91
16	Rasio Elektrifikasi	%	28,4	33,1	64,43	93,83	99,98	95%	97,73

Dalam periode 2005-2022, pencapaian pembangunan di Provinsi NTB menunjukkan hasil yang positif dan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini sejalan dengan berbagai capaian pembangunan telah berhasil diwujudkan di Provinsi NTB. Pada aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi dengan tambang terus mengalami kenaikan dari 1,71% pada awal RPJPD Provinsi NTB 2005-2025, hingga tahun 2022 dapat tumbuh sebesar 6,95%, pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%. Hal ini sejalan dengan target akhir RPJPD yang diharapkan dapat terus naik dari tahun ke tahun meskipun di tahun 2018 mengalami kontraksi diakibatkan oleh adanya bencana gempa bumi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi mencapai 4,46%. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan kenaikan PDRB Per Kapita dari Rp. 11,85 juta pada tahun 2005 (Atas Dasar Harga Konstan) menjadi sebesar Rp. 18,65 juta pada tahun 2022. Kenaikan ini seperti tidak terlalu signifikan, hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan tahun dasar perhitungan PDRB atas harga Konstan. Perubahan Tahun Dasar PDRB dari Tahun 2000 menjadi Tahun 2010, dengan demikian pada awal RPJPD menggunakan tahun dasar 2000, sedangkan pengukuran akhir RPJPD menggunakan tahun dasar 2010.

Pada indikator lain juga menunjukkan progresivitas yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya angka pengangguran dari 10,29% pada tahun 2005 menurun menjadi 2,89% pada tahun 2022, jauh melampaui target pada tahun 2025 diharapkan dapat diturunkan pada angka minimal 5%. Begitu juga halnya angka kemiskinan dari 25,92% pada tahun 2005 dapat diturunkan sampai 50% menjadi 13,68% tahun 2022, namun demikian belum memehuni target akhir RPJPD tahun 2025 yang diharapkan dapat diturunkan pada angka satu digit atau dibawah 10%. Semakin kecil angka kemiskinan semakin lamban penurunan angka kemiskinan, hal ini terlihat pada periode 2019-2023, dimana kondisi awal pada tahun 2018 mencapai Pada sisi paritas daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp. 623,2 ribu pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 10,68 juta tahun 2022. Sedangkan pada indikator PDRB Perkapita, meskipun terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sesuai target, tetapi pertumbuhannya sangat lambat dari Rp. 11,8 juta pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 18,65 juta pada tahun 2022 dan bahkan jauh dibawah rata nasional yang sudah mencapai Rp. 40,78 juta. Sementara itu pada sisi ketimpangan, ada kecenderungan ketimpangan di NTB terus meningkat dari tahun

ke tahun, pada tahun 2005 tingkat ketimpangan di NTB mencapai 0,331 dan meningkat menjadi 0,374 pada tahun 2022.

Pada aspek Pembangunan Manusia, masih diperlukan kerja keras untuk mewujudkannya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian Provinsi NTB masih jauh dibawah rata-rata capaian nasional, sementara amanat RPJPD diharapkan pada tahun 2025 tingkat capaian pembangunan manusia di NTB minimal setara dengan rata-rata capaian nasional. Jika dilihat pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2005 IPM NTB mencapai 62,4 meningkat menjadi 69,46, dengan demikian dalam 18 tahun terakhir IPM NTB hanya tumbuh sebesar 11,31%. Capaian ini masih dibawah nasional yang telah mencapai 72,91. Adanya perlambatan peningkatan IPM ini ditunjukkan oleh adanya perlambatan pada rata-rata lama sekolah dari 6,6 tahun pada tahun 2005 meningkat menjadi 7,61 tahun pada tahun 2022. Begitu juga halnya pada usia harapan hidup dari 60,5 tahun pada tahun 2005 meningkat menjadi 67,07 tahun pada tahun 2022.

Adanya peningkatan Usia Harapan Hidup menunjukkan semakin membaiknya kualitas hidup manusia di Provinsi NTB. Peningkatan kualitas ini ditandai dengan semakin menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu meskipun masih tergolong tinggi. Pada awal RPJPD 2005-2025, angka kematian bayi sebesar 68,96 per 1.000 Kelahiran Hidup turun menjadi 8,27 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2022. Begitu juga dengan angka kematian ibu sebesar 300,3 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2005 turun menjadi 101,82 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2022. Sementara itu, prevalensi kurang gizi/stunting cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 16,99% jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2005 sebesar 3,2%, namun cenderung menurun jika dibandingkan dengan periode 2009-2013 dan periode 2013-2018 yang mencapai lebih dari 20%.

Pada aspek perumahan dan permukiman, persentasi rumah layak huni di NTB meningkat menjadi 62,3% pada tahun 2022, sedangkan rumah dengan akses listrik yang diukur dari rasio elektrifikasi telah mencapai 99,98%.

3.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Periodisasi RPJMD

RPJPD Provinsi NTB 2005-2025 dijabarkan kedalam 4 (empat) tahap RPJMD yaitu Tahap I dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) periode 2003-2008, dilanjutkan dengan Tahap II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2009-2013, Tahap III RPJMD periode 2013-2018, dan Tahap IV

RPJMD periode 2019-2023. Adapun capaian kinerja setiap tahapan RPJMD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

I. RENSTRADA periode 2003-2008

Perencanaan pembangunan daerah pada periode tahun 2003-2008 disusun sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan di daerah, sehingga pada periode tersebut, acuan perencanaan pembangunan menggunakan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) tahun 2000-2005 sebagai pengganti Rencana Pembangunan Lima Tahunan (REPELITA). Dan atas dasar dokumen tersebut lahirlah dokumen strategis daerah dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) tahun 2003-2008.

Dalam RENSTRADA Provinsi NTB tahun 2003-2008, terdapat Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran namun tidak tersedia indikator kinerja dan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2003-2008. Adapun arah kebijakan pembangunan di NTB sesuai Renstrada NTB tahun 2003-2008, meliputi tujuan, sasaran, kebijakan, dan program sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4 Kebijakan Pembangunan dalam Renstrada NTB Tahun 2003-2008

MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
Meningkatkan iman dan taqwa serta silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari	Mengembangkan suasana kasih sayang, saling menghargai, memaafkan, tolong menolong, perduli serta jujur	Terwujudnya komunikasi inter dan antar umat beragama, antar kelompok masyarakat untuk mengatasi persoalan bersama	Peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan, forum-forum kemasyarakatan, tokoh agama dan masyarakat
		Terbangunnya semangat ahlaqulkarimah dikalangan aparat dalam penentuan kebijakan	Peningkatan pembinaan mental spritual aparat
		Terbinanya keutuhan dalam keluarga	Pengembangan sendi-sendi dasar pembentukan keluarga sakinah

MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
Meningkatkan kemampuan interaksi dan komunikasi sosial dalam rangka mewujudkan keutuhan masyarakat	Membangun sinergi politik, ekonomi, sosial budaya antar kelompok masyarakat	Terselenggaranya dialog terbuka dan intensif dalam mewujudkan sikap saling pengertian antar kelompok etnik, masyarakat, dan agama	Pengembangan dialog antar kelompok etnik, masyarakat, dan agama
		Terjadinya kerjasama lintas kebudayaan yang intensif dalam mewujudkan sikap terbuka dan pengertian antara etnik aseli dan pendatang	Pengembangan kerjasama lintas kebudayaan
		Terjalinnnya interaksi antara pelaku ekonomi yang saling menguntungkan	Pengembangan kemitraan usaha
	Membangun sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota	Terselenggaranya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota	Pengembangan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau	Terfasilitasi dan terselenggaranya SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota dan provinsi	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan kesehatan
		Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat	Peningkatan mutu lingkungan, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi terpadu
			Fasilitasi penyediaan laboratorium lapangan
	Meningkatnya kualitas penduduk dan keluarga	Terwujudnya keluarga sejahtera serta terkendalinya jumlah penduduk	Meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga serta mengendalikan pertumbuhan penduduk
Meningkatkan kemampuan, keadilan dan pemerataan pendidikan	Menjamin terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran, koordinasi, monitoring dan evaluasi Standar	Terfasilitasi dan terselenggaranya Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan	Menetapkan SPM dan mendorong penyelenggaraan proses pendidikan bermutu
		Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas	Peningkatan kuantitas dan kualitas buku paket dan peralatan pendidikan

MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
	Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan di kabupaten/kota		Penurunan angka <i>drop out</i> dan peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan
		Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan sekolah luar biasa (SLB)	Peningkatan kuantitas dan kualitas SLB pada jenjang pendidikan menengah
		Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung masyarakat terbelakang, terpencil, dan tidak mampu pada pendidikan dasar dan menengah	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat terpencil, terbelakang dan tidak mampu
		Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pendidikan profesi	Pengembangan perguruan tinggi baik tingkat dan jenis
	Meningkatkan peran dan fungsi organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah	Terbangunnya kesadaran pemuda dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan untuk dapat lebih berperan dalam pembangunan daerah
	Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan dalam pembangunan daerah	Terwujudnya peningkatan peran kaum perempuan dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam pembangunan daerah
	Meningkatkan kemampuan dan keadilan ekonomi masyarakat	Mewujudkan kemampuan dan keadilan ekonomi berdasarkan segmen masyarakat (kaya-miskin) maupun geografis (kota-desa)	Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada dibawah garis kemiskinan
Penggalian dan pengalokasian sumber-sumber penerimaan daerah guna pengurangan penduduk miskin			
Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan dana pembangunan yang masuk ke NTB			

MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
		Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keahlian masyarakat dalam berusaha	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga menengah profesional Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga menengah profesional
		Terselenggaranya peningkatan akses masyarakat pada sumberdaya ekonomi	Peningkatan peran koperasi dan lembaga keuangan dalam penyaluran kredit yang murah, mudah dan cepat
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja baik untuk kebutuhan lokal maupun luar negeri	Peningkatan kompetensi, daya saing dan kemandirian tenaga kerja
	Mengembangkan perlindungan dan pelayanan ketenagakerjaan	Terwujudnya peningkatan perlindungan dan penyederhanaan sistem pelayanan tenaga kerja	Peningkatan koordinasi pelayanan perlindungan, dan pengawasan
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana ekonomi	Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dalam pengembangan ekonomi	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang memperhatikan tataruang
Mendorong penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> (GG) dan memperkuat struktur politik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan guna mewujudkan <i>Good Governance</i> (GG)	Terlibatnya masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik
		Tersusunnya kebijakan yang mendorong pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan	Peningkatan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepentingan publik
		Terbentuknya organisasi perangkat daerah yang hemat struktur kaya fungsi	Peningkatan kapasitas aparatur dan rasionalisasi kelembagaan
	Meningkatkan peran organisasi sosial politik dalam pendidikan	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurus	Pengembangan kualitas organisasi sosial politik dalam melakukan pendidikan politik masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
	politik masyarakat	organisasi sosial politik dalam melakukan pendidikan politik masyarakat	
	Meningkatkan koordinasi pelayanan informasi publik antar Kabupaten /Kota melalui pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya akses informasi yang dapat dimanfaatkan oleh publik	Peningkatan peran dan fungsi perangkat pengelola informasi
Mendorong pengembangan hukum daerah baik dalam substansi, struktur maupun kultur yang berorientasi pelayanan	Menegakkan supremasi hukum dan membentuk produk hukum daerah yang berorientasi pada pelayanan	Terwujudnya produk hukum yang memberikan pelayanan yang aspiratif dan adil bagi masyarakat	Pengembangan Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum serta peningkatan profesionalisme aparat perancang produk hukum daerah serta
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan hukum daerah dalam pengawasan pembangunan	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif	Peningkatan profesionalisme aparat pengawasan fungsional
	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum positif dan norma-norma sosial	Terwujudnya peningkatan kepatuhan hukum masyarakat	Pengembangan dan pendayagunaan norma-norma sosial dan hukum positif
Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Terbangunnya kesadaran aparat dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat
		Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
		Terjaganya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan koordinasi, pengendalian dan pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Mendukung penguasaan dan penerapan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Mewujudkan perubahan pandangan masyarakat tentang pemanfaatan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari	Terjadinya perubahan pandangan masyarakat tentang pemanfaatan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari secara bertahap pada organisasi profesi, institusi sosial budaya, dan masyarakat pada umumnya	Mendorong pengembangan pembangunan yang berbasis IPTEK
		Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen	Peningkatan peran pemerintah, institusi sosial dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen

Sehubungan dengan tidak tersedianya indikator kinerjanya maka pendekatan pengukuran kinerja pada periode 2003-2008 menggunakan 2 (dua) cara yaitu menggunakan indikator kinerja berdasarkan sasaran pokok RPJPD Provinsi NTB 2005-2025 dan menggunakan indikator kinerja pada pelaksanaan urusan pemerintahan. Berdasarkan indikator RPJPD Provinsi NTB 2005-2025, terdapat 16 indikator kinerja yang disebutkan secara implisit dalam dokumen tersebut. Adapun indikator kinerja tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Pencapaian Indikator Kinerja RPJPD pada Periode RPJMD ke-1

NO	INDIKATOR KINERJA RPJPD 2005-2025	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2005	REALISASI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRADA TAHUN 2008	TARGET AKHIR PADA TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi:	%			Naik	
	- Dengan Tambang Bijih Logam	%	1,71	2,82		100,00
	- Tanpa Tambang Bijih Logam	%	4,05	6,95		100,00
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,29	6,13	≤ 5%	77,15
3	Angka Kemiskinan	%	25,92	23,81	< 10%	-38,34

NO	INDIKATOR KINERJA RPJPD 2005-2025	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2005	REALISASI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRADA TAHUN 2008	TARGET AKHIR PADA TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
4	PDRB Per Kapita					
	- PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp.000	11.852,96	13.331,40	Naik	100,00
	- PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. 000	18.977,32	17.302,45	Naik	100,00
5	Paritas Daya Beli		623.200	633.380		100,00
6	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,6	6,7	12 Tahun	55,83
7	Angka Buta Huruf	%	21,2	20,15	0%	0,00
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	60,5	61,5	≥ Rata-rata Nasional	93,71
9	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	68,96	61,52	≤ Rata-rata Nasional	100,00
10	Angka Kematian Ibu	per 1000 KH	305,5	92	≤ Rata-rata Nasional	100,00
11	Prevalensi Gizi kurang pada anak Balita	%	3,2	3,4	≤ Rata-rata Nasional	100,00
12	Gini Ratio	Poin	0,331	0,33	Berkurang	99,70
13	Persentase Rumah Layak Huni	%		84,57	100%	84,57
14	Persentase kawasan kumuh	%			0%	
15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	62,42	64,12	≥ rata-rata Nasional	97,37
16	Rasio Elektrifikasi	%	28,4	33,1	95%	46,93
Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja (%)						50,00
Rata-rata capaian kinerja periode 2003-2008 (%)						77,47
Predikat Kinerja (Kategori)						TINGGI

Berdasarkan data capaian berdasarkan indikator kinerja RPJPD dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja yang sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 50%, sedangkan rata-rata capaiannya sebesar 77,47% atau kategori TINGGI. Terdapat beberapa indikator kinerja yang mengalami peningkatan kinerja antara lain, pertumbuhan ekonomi dengan tambang mengalami peningkatan dari 1,71% pada tahun 2005 meningkat menjadi 2,82% pada tahun 2008. Kenaikan ini menunjukkan semakin baiknya kinerja perekonomian daerah dan ini juga berdampak pada indikator-indikator lain seperti peningkatan PRDB per kapita, peningkatan daya beli masyarakat, adanya penurunan angka pengangguran, adanya penurunan ketimpangan pendapatan, serta penurunan angka kemiskinan dari 25,92% pada tahun 2005 menjadi 23,81% tahun 2008.

Pada aspek pembangunan manusia juga menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 62,42 tahun 2005 menjadi 64,12 pada tahun 2008. Peningkatan ini ditandai

dengan adanya peningkatan kinerja di bidang Pendidikan dan kesehatan. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 6,6 tahun pada tahun 2005 menjadi 6,7 tahun pada tahun 2008, begitu juga angka buta huruf yang menurun sangat signifikan dari 21,2% pada tahun 2005 menjadi 16,7% pada tahun 2008. Sementara itu kinerja di bidang kesehatan menunjukkan hal yang sama seperti usia harapan hidup meningkat dari 60,5 tahun pada tahun 2005 menjadi 61,5 tahun pada tahun 2008. Angka kematian bayi dan kematian itu juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan.

Adapun capaian kinerja berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Pencapaian Kinerja RPJPD pada Periode RPJPD ke-1 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2003)	Kondisi Akhir (2008)
1	Pendidikan			
a	TK/RA			
	- APK	%	15,29	34.78
	- APM	%	Na	Na
	- APS	%	Na	Na
b	SD/MI			
	- APK	%	104,59	110.08
	- APM	%	94,91	97.66
	- APS	%	98,2	*
	- DO	%	7.67	1.17
c	SMP/MTs			
	- APK	%	78,43	97.82
	- APM	%	62,62	79.57
	- APS	%	77,76	*
	- DO	%	5.13	3.93
d	SMA/MA			
	- APK	%	46,64	58.64
	- APM	%	36,91	48.89
	- APS	%	41,82	*
	- DO	%	7.627	8.03
2	Kesehatan			
a	Usia Harapan Hidup	Tahun	59,35	61,5
b	Jumlah Kasus Penyakit yang diderita:			
	- Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Balita	Kasus	283.147	225.907
	- Diare	Kasus	-	137.686
	- Diare Balita	Kasus	96.032	162.214
	- TBC PARU	Kasus	3.756	3.112
	- Malaria	Kasus	79.958	103.154
	- Kasus HIV ditemukan	Kasus	23	25

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2003)	Kondisi Akhir (2008)
	- Kasus AIDS ditemukan	Kasus	15	26
	- DBD	Kasus	-	777
3	Pekerjaan Umum			
a	Tingkat kemampuan jalan			
	- Nasional	%		76,42
	- Provinsi	%		44,59
	- Kabupaten	%		74,26
b	Cakupan Layanan Air Bersih			
	- Cakupan Perkotaan	%		74,36
	- Cakupan Perdesaan	%		65,00
c	Cakupan Layanan Sanitasi			
	- Cakupan Perkotaan	%		80,00
	- Cakupan Perdesaan	%		65,00
4.	Perumahan			
a	rumah contoh tahan gempa	Unit	0	15
b	sarana dan prasarana sanitasi masyarakat	Unit	0	14
c	Rumah layak huni	%	NA	70,54
5	Penataan Ruang			
a	dokumen penataan ruang kawasan	Dok	0	3 dokumen (KSP Peternakan Amor-Amor, Kawasan Pariwisata Kuta, Kawasan Pesisir Teluk Saleh)
b	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	0	30
6	Perencanaan Pembangunan			
a	Penyusunan dokumen perencanaan	Dok	2	10
b	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan	Dok	0	9
c	Penyusunan rencana pengembangan ekonomi masyarakat	Dok	0	1
7	Perhubungan			
a	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dok	0	19
b	Penyusunan kebijakan; norma; standar dan prosedur bidang perhubungan	Dok	0	2
c	Pengembangan Data Base Perhubungan	Dok	0	2
d	Penyelenggaraan Ujian Amatir Radio se NTB	Kali	0	8
e	alat monitoring frekuensi radio	Unit	0	11
8	Lingkungan Hidup			
a	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Lokasi	0	3 lokasi (Sungai Jangkok, Sungai Ancar, PT.NNT)
b	Konservasi Sumber Daya Air	Titik		8 lokasi titik mata air
c	Penyusunan status LH daerah	Dok	0	1

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2003)	Kondisi Akhir (2008)
9	Pemberdayaan Perempuan			
a	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	NA	55,9
b	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	NA	12,9
10	Sosial			
a	pelayanan dan perlindungan sosial: hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak	Layanan		1
b	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Orang	100	790
c	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Orang		140
d	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Orang		195
e	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		5,43
11	Ketenagakerjaan			
a	Padat karya produktif	Orang	NA	170
b	Penanganan TKI bermasalah	Orang	NA	4292
c	penyusunan program ketenagakerjaan	Dok	NA	1
d	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	%	NA	37,73
12	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
a	promosi produk UKM pada NTB expo	Event	0	5
b	Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada Jenis usaha koperasi	KSP/USP	NA	84
c	Pembinaan usaha produk unggulan daerah serta dukungan legal aspek usaha bagi KUKM	KUKM	75	375
d	Koperasi aktif	%	NA	82,61
13	Ketahanan Pangan			
a	Ketersediaan pangan utama	%	NA	101,9
14	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
a	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	%	NA	68,79
b	Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I	%	NA	70,54
15	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
a	PKK aktif	%	NA	100
b	Posyandu	%	NA	100
16	Kearsipan			
a	Pengelolaan arsip secara baku	%	NA	21,74

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2003)	Kondisi Akhir (2008)
17	Perpustakaan			
a	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	%	NA	33,1
b	Pengujung perpustakaan	Orang	NA	495.540

Untuk mendukung pencapaian pada akhir periode RENSTRADA Provinsi NTB 2003-2008 pada tahun 2008, berbagai program prioritas telah dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan pemanfaatan dan pengamalan agama serta kerukunan hidup umat beragama
2. Peningkatan kualitas pendidikan agama
3. Pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan
4. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
5. Pengembangan informasi, komunikasi dan media massa
6. Peningkatan dan pengembangan kebudayaan
7. Pengembangan industri kecil dan menengah
8. Pengembangan sistem pendukung usaha PKMK
9. Pengembangan keserasian kebijakan publik dan penanganan masalah-masalah sosial
10. Upaya kesehatan
11. Sumberdaya kesehatan
12. Lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat
13. Perbaikan gizi masyarakat
14. Obat, makanan dan bahan berbahaya
15. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
16. Keluarga Berencana
17. Sinkronisasi dan koordinasi pembangunan pendidikan nasional
18. Pembinaan pendidikan dasar dan pra sekolah
19. Pendidikan luar sekolah
20. Pendidikan menengah
21. Pendidikan tinggi
22. Pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan
23. Peningkatan partisipasi pemuda

24. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan
25. Peningkatan peran masyarakat dan kemampuan kelembagaan pengarusutamaan gender
26. Pemberdayaan masyarakat
27. Pengembangan agribisnis
28. Peningkatan ketahanan pangan
29. Pengembangan sumberdaya perikanan
30. Pemanfaatan sumberdaya mineral
31. Pengembangan usaha perhutanan rakyat
32. Pengembangan industri kecil dan menengah
33. Pengembangan kewirausahaan dan daya saing PKMK
34. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
35. Peningkatan penerimaan daerah
36. Pengembangan kelembagaan keuangan
37. Pengembangan dan pembinaan usaha daerah
38. Penyempurnaan dan pengembangan statistik
39. Peningkatan kerjasama antar daerah
40. Peningkatan, kualitas dan produktivitas tenaga kerja
41. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
42. Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja
43. Pengembangan kewirausahaan dan daya saing PKMK
44. Pengembangan sistem pendukung usaha PKMK
45. Pengembangan lalu lintas angkutan jalan
46. Pengembangan aksesibilitas angkutan sungai, danau dan penyeberangan
47. Peningkatan/pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan
48. Pengembangan aksesibilitas prasarana jalan
49. Penataan ruang
50. Pengembangan wilayah
51. transmigrasi
52. Rehabilitasi transportasi jalan
53. Pengembangan, pendayagunaan dan pengelolaan pengairan
54. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
55. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah

56. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
57. Pengembangan Budaya Politik
58. Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan
59. Peningkatan Prasarana Penyiaran dan Media Massa
60. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah
61. Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pelanggaran HAM
62. Pengawasan aparatur negara
63. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum
64. Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan LH
65. Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA dan LH
66. Pengembangan dan peningkatan akses informasi SDA dan LH
67. Peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi SDA
68. Pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan
69. Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan
70. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
71. Peningkatan IPTEK dunia usaha dan masyarakat
72. Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi
73. Peningkatan kapasitas dan pengembangan sumberdaya IPTEK
74. Peningkatan, pemandirian dan keunggulan IPTEK

II. Tahap II RPJMD periode 2009-2013

Visi RPJMD Provinsi NTB tahun 2009-2013 mewujudkan masyarakat NTB yang beriman dan berdayasaing melalui 5 misi yakni: membangun masyarakat madani, harmonis dan toleran; pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; peningkatan pelayanan sosial dasar; pengembangan infrastruktur; dan penegakan hukum. Terdapat beragam program prioritas untuk mengejawantahkan visi dan misi tersebut dan juga program terobosan yang menjadi unggulan dalam percepatan pencapaian target visi masyarakat NTB beriman dan berdayasaing. Keberhasilan penyelenggaraan program terobosan akan memberi dampak strategis dalam pencapaian 65 indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2009-2013. Berikut disajikan capaian 65 indikator kinerja dalam periode 2008-2013:

Tabel 3. 7 Pencapaian Indikato Kinerja RPJPD pada Periode RPJMD ke-2

NO.	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2008	KONDISI AKHIR TAHUN 2013			
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KET
MISI PERTAMA : Mengembangkan Masyarakat Madani yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menghormati Pluralitas dan Kesetaraan Gender						
1	Konflik (kasus)					
	a. Konflik Vertikal	153	89	11	187,64	Melampaui
	b. Konflik Horizontal	132	39	43	89,74	On the track
2	Penanganan NAPZA – Terapi Rehabilitasi (%)	40	90	405	450,00	Melampaui
	Penanganan NAPZA - Kepolisian (%)	40	90	100	111,11	Melampaui
3	Penanganan Penderita HIV (%)	30	95	100	105,26	Melampaui
	Penanganan Penderita AIDS (%)	30	95	100	105,26	Melampaui
4	Gender Development Indeks (indeks)	55,4	60,4	89,44	148,08	Melampaui
5	Kekerasan dalam rumah tangga (kasus)	168	104	227	218,27	Melampaui
6	Perpustakaan Rumah Ibadah (unit).	82	910	791	86,92	On the track
MISI KEDUA : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkeadilan, Terjangkau dan Berkualitas						
1	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,7	8,61	6,54	75,96	On the track
2	Angka Partisipasi Kasar (%)					
	a. SD/MI/Paket A	111,08	111,91	107,9	96,42	On the track
	b. SMP/MTs/Paket B	87,6	100,2	88,72	88,54	On the track
	c. SMA/SMK/MA/Paket C	57,22	82,67	66,4	80,32	On the track
3	Angka Partisipasi Murni (%)					
	a. SD/MI/Paket A	94,2	99,95	96,71	96,76	On the track
	b. SMP/MTs/Paket B	71,44	90,07	80,21	89,05	On the track
	c. SMA/SMK/MA/Paket C	48,38	70,12	58	82,72	On the track
4	Angka Putus Sekolah (%)					
	a. SD/MI/Paket A	1,17	0,2	0,19	105,00	Melampaui
	b. SMP/MTs/Paket B	5,25	0,5	0,47	106,00	Melampaui
	c. SMA/SMK/MA/Paket C	4,88	1,5	1,15	123,33	Melampaui
5	Angka Melek Huruf (%) :	80,1	100	100	100,00	sesuai target
6	Angka Melanjutkan Sekolah (%):					
	a. SD/MI ke SMP/MTs	98,58	100	102,48	102,48	Melampaui
	b. SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90,05	98,5	98,97	100,48	Melampaui
7	Usia Harapan Hidup (tahun)	61,5	66,18	64,74	97,82	On the track
8	Angka Kematian Bayi (/1.000 KH)	72	42	54,08	71,24	On the track
9	Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000 kh)	320	260	240,09	107,66	Melampaui
10	Prevalensi Gizi Buruk (%)	5,32	4,12	3,73	109,47	Melampaui
11	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,7	1,28	0,93	121,09	Melampaui
12	Tingkat Kelahiran Total (%)	2,8	2,2	2,48	112,73	Melampaui
13	Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	19,67	21	20,52	97,71	On the track
14	Cakupan Jamban Keluarga (%)	57	80	72,15	90,19	On the track
15	Perpustakaan Desa (unit)	253	910	1242	136,48	Melampaui
	Pos Layanan Perpustakaan Keliling (lokasi)	40	185	192	103,78	Melampaui
	Pos Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota (lokasi)	50	400	473	118,25	Melampaui
16	Angka Kunjungan ke Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Keliling (orang)	545.109	931.400	935.165	100,40	Melampaui
MISI KETIGA : Menumbuhkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal dan Mengembangkan Investasi dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tanpa Tambang	4,89	6,5-7,0	5,4	83,08	On the track
2	Laju Inflasi (%)	8,76	6	5	83,33	On the track

NO.	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2008	KONDISI AKHIR TAHUN 2013			
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KET
3	Laju Pertumbuhan Investasi/BKPM (%)	2,26	8,33	289,71	3477,91	Melampaui
4	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (indeks)	6,59	4	4	100,00	sesuai target
5	PDRB Perkapita ADHB, non tambang (Rp)	4.985.784	10.828.674	14809840	136,77	Melampaui
6	Paritas Daya Beli (Rp)	623.900	750.000	895.000	119,33	Melampaui
7	Jumlah APBD (Rp. Miliar)	923,479	1.824,67	2.379,50	130,41	Melampaui
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp. Miliar)	311	750	847,87	113,05	Melampaui
9	Kinerja Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	100,00	sesuai target
10	Angka Kemiskinan (%)	24,99	14	17,97	71,64	<i>On the track</i>
11	Angka Pengangguran Terbuka (%)	6,48	5	5,3	94,00	<i>On the track</i>
12	Program PIJAR :					
	a. Peningkatan Populasi Ternak Sapi (ekor)	507.836	1.000.000	1.002.731	100,27	Melampaui
	b. Jagung (Ton)	196.263	613.416	633.773	103,32	Melampaui
	c. Rumput Laut (Ton)	116.000	1.000.000	756.355	75,64	<i>On the track</i>
13	Perkumpulan Petani Pemakai Air (kelompok) :					
	a. Perkumpulan Petani Pemakai Air	1.367	1.435	1496	104,25	Melampaui
	b. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air	54	75	76	101,33	Melampaui
14	Pola Pangan Harapan (skor)	72,7	80,3	78,7	98,01	<i>On the track</i>
15	Desa Mandiri Pangan (desa)	82	222	229	103,15	Melampaui
16	Cadangan Pangan (ton):	72,7	1.325	1373	103,62	Melampaui
	a. Energi Perkapita (kalori/hr)	3.077,58	3.105,38	4745	152,80	Melampaui
	b. Protein Perkapita (gram/hr)	93,8	104,53	126,56	121,08	Melampaui
17	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	24,02	25,6	26,5	103,52	Melampaui
18	Kelompok Sadar Wisata (kelompok)	50	100	100	100,00	sesuai target
19	Angka Kunjungan Wisatawan (orang/thn)	457.379	1.208.091	1.277.912	105,78	Melampaui
	a. Wisatawan Mancanegara	200.170	526.216	565944	107,55	Melampaui
	b. Wisatawan Nusantara	257.209	681.875	791658	116,10	Melampaui
20	Koperasi Berkualitas (unit)	940	2.000	2.034	101,70	Melampaui
21	Wirausaha Baru (orang).	-	100.000	74.206	74,21	<i>On the track</i>
22	Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (forum)	4	10	10	100,00	sesuai target
MISI KEEMPAT : Melakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						
1	Tingkat Kemantapan Jalan (%) :					
	a. Jalan Nasional	79,23	100	99,99	99,99	<i>On the track</i>
	b. Jalan Provinsi	44,25	65,78	67,56	102,71	Melampaui
2	Peraturan tentang Tata Ruang berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 (Perda)	Prov : 0	-	-		
		Kab/Kota: 0	2	5	250,00	Melampaui
3	Cakupan Air Bersih (%)	Perkotaan 74	81	80,23	99,05	<i>On the track</i>
		Perdesaan 65	75	72,15	96,20	<i>On the track</i>
4	Cakupan Listrik/Ratio Elektrifikasi (%)	34	52	57,91	111,37	Melampaui
	Desa Berlistrik (%)		100	100	100,00	sesuai target

NO.	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2008	KONDISI AKHIR TAHUN 2013			
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KET
5	Kampung Media (komunitas)	3	50	50	100,00	sesuai target
6	Penemuan Teknologi Tepat Guna (temuan)	95	145	193	133,10	Melampaui
7	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (temuan)	73	130	172	132,31	Melampaui
8	Peraturan tentang Telekomunikasi dan Informasi (produk hukum daerah)	0	2	2	100,00	sesuai target
9	Sumber Mata Air (sumber)	174	250	336	134,40	Melampaui
10	Frekuensi Penerbangan Domestik & Internasional (kali/hari)	12	24	44	183,33	Melampaui
11	Interkoneksi angkutan umum antar simpul transportasi (status)	Belum	2	2	100,00	sesuai target
12	Peralatan Peringatan Dini Bencana (unit)	1	3	1	33,33	belum memenuhi target
13	NTB Hijau :					
	a. Lahan Kritis (Ribuan Ha)	507,78	297,754	286,99	103,61	Melampaui
	b. Kawasan Hutan: lindung, konservasi, produksi & fungsi khusus (Ribuan Ha)	1.069,99	1.069,99	1.073,45	100,32	Melampaui
	c. Lahan Sawah Berkelanjutan (Ribuan Ha)	227,606	242,238	242,395	100,06	Melampaui
	d. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan >30% (kab/kota)		10	10	100,00	sesuai target
	e. Kesatuan Pengelolaan Hutan (unit)	0	3	12	400,00	Melampaui
	f. Model Konservasi Keanekaragaman Hayati Daerah (lokasi)	0	3	4	133,33	Melampaui
MISI KELIMA : Menegakkan Supremasi Hukum, Pemerintahan yang Bebas KKN dan Memantapkan Otonomi Daerah						
1	Temuan Pelanggaran Aparatur					
	a. Jumlah Temuan (kasus)	267	140	166	81,43	<i>On the track</i>
	b. Kerugian Daerah & Kewajiban Setor terhadap APBD (%)	0,7	0,2	0,48	-40,00	belum memenuhi target
2	Standar Operasional Prosedur (%)	0	100	100	100,00	sesuai target
3	Standar Pelayanan Minimal (%)	0	50	100	200,00	Melampaui
4	Indeks Demokrasi :					
	a. Partisipasi masyarakat dalam politik (%)	66	70	70,47	100,67	Melampaui
	b. Pemilu yg bebas & adil (pelanggaran)	63	71	11	184,51	Melampaui
5	Pelanggaran Hukum dan HAM (kasus)	50	15	0	200,00	Melampaui
6	Kriminalitas (kasus)	6.738	7.893	4752	139,79	Melampaui
7	Perdagangan Manusia (kasus)	467	283	26	190,81	Melampaui
8	Produk Hukum Daerah Anti KKN & Pemantapan Otonomi Daerah (buah);	Prov	10	50	500,00	Melampaui
		Kab/Kota	90	152	168,89	Melampaui
Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja (%)					72,63	
Rata-rata capaian kinerja periode 2009-2013 (%)					156,37	
Predikat Kinerja (Kategori)					SANGAT TINGGI	

Berdasarkan data capaian pada akhir periode RPJMD 2009-2013 pada tahun 2013, dari 65 indikator kinerja utama yang dijadikan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah kurun waktu 2009-2013, diketahui bahwa terdapat 51 indikator atau 78,95% sesuai bahkan melampaui target kinerja akhir periode RPJMD, sedangkan 14 indikator belum sesuai dengan yang ditargetkan, namun hanya 2 indikator yang jauh dari yang ditargetkan dan 12 indikator berjalan sesuai dengan yang ditargetkan (*on the track*). Meskipun pencapaian indikator sebesar 72,63%, tetapi rata-rata capaian kinerja mencapai 156,37% atau kategori SANGAT TINGGI. Hal ini terjadi karena sebagian besar capaian indikator kinerja jauh melampaui dari target akhir RPJMD pada tahun 2013.

Hasil yang telah dicapai merupakan ikhtiar bersama antara masyarakat, dunia usaha, para pihak dan setiap entitas pemerintah selama ini. Capaian setiap indikator RPJMD tidak terlepas dari pelaksanaan strategi “NTB bersaing” dan berbagai terobosan pemerintah untuk mendongkrak pencapaian visi misi program yang ditetapkan dalam RPJMD 2009-2013. Berbagai terobosan pemerintah provinsi NTB telah menunjukkan hasil signifikan. Hasil berbagai terobosan tersebut antara lain:

1. Bidang Sosial

- a. Dalam rangka mewujudkan misi ke dua (Bidang Pendidikan), pemerintah provinsi senantiasa terus mengupayakan penambahan anggaran di sektor pendidikan. Penetapan anggaran untuk pendidikan 17,44 persen pada tahun 2009 dalam APBD terus meningkat menjadi 19,48 persen pada tahun 2010, 19,48 persen pada tahun 2011, 19,18 persen pada tahun 2011 dan 25,57 persen pada tahun 2012.
- b. Program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) menjadi program yang terpenting, yang memberikan kontribusi besar bagi penurunan angka drop out. Besaran anggaran beasiswa dan jumlah siswa miskin, yaitu: SD sebesar Rp 30 ribu/siswa/bulan, SLTP sebesar Rp 48 ribu/siswa/bulan dan SLTA sebesar Rp 65.000/siswa/bulan telah dialokasikan dalam APBD Provinsi NTB sejak tahun 2008. Pemberian BSM ini diberikan bagi siswa sekolah negeri maupun swasta.

Sejak tahun 2009 hingga 2012, sekurangnya 499.364 siswa miskin di provinsi NTB melalui dana APBD Provinsi NTB telah menikmati BSM yang diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan, dari SD sebanyak 217.919 siswa, SLTP 163.390 siswa dan SMA sederajat negeri ataupun swasta sebanyak 118.005 siswa. Pemberian

beasiswa siswa miskin dilaksanakan dengan pola sharing anggaran antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sedikitnya 30 hingga 40 persen anak usia sekolah dari SD hingga SMA sederajat di provinsi NTB telah menerima manfaat dari BSM tersebut.

- c. Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah provinsi sampai dengan tahun 2011 telah memberikan beasiswa kepada 6.634 mahasiswa S1, mahasiswa S2 sebanyak 298 dan mahasiswa S3 sebanyak 59 orang. Kunci keberhasilan dari berbagai percepatan pelayanan di sektor pendidikan di NTB selama ini, tidak terlepas dari adanya kemitraan yang kuat serta berkelanjutan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan segenap komponen masyarakat.
- d. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, alokasi anggaran yang proporsional APBD provinsi sejak tahun 2009 merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah provinsi NTB guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya kendala yang menyangkut masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masih rendahnya usia harapan hidup dan adanya ancaman prevalensi gizi buruk. Kendala ini berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk itu pemerintah telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)) yang memberikan pelayanan persalinan gratis bagi ibu melahirkan di Puskesmas dan Rumah Sakit milik pemerintah.dan swasta serta menetapkan anggaran pelayanan kesehatan gratis sebesar Rp 60 ribu perorang pertahun bagi **301.176** warga miskin yang belum terjangkau Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas).

Pelayanan bagi masyarakat miskin merupakan komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dan telah dilakukan penandatanganan MoU dengan seluruh Bupati/Walikota untuk sharing anggaran kesehatan gratis bagi warga miskin. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat miskin diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten/kota. Selama 4 tahun terakhir (2009-2012) total sharing pembiayaan antara Kabupaten / Kota dan Provinsi adalah Rp. 83.318.338.000,- terdiri dari sharing pemerintah provinsi sebesar Rp.

43.563.106.000,- dan sharing pemerintah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 39.755.232.000,-

Dengan jumlah pasien yang telah terlayani oleh puskesmas dan jaringannya se NTB sebanyak **322.694** orang dan pelayanan di Rumah Sakit Provinsi dan Kab/kota se NTB sebanyak **78.089** orang

- e. Pemerintah provinsi juga melakukan sejumlah intervensi kebijakan untuk menekan kematian ibu dan anak , buta aksara dan drop out yang lebih dikenal dengan Gerakan 3-A yaitu AKINO, ABSANO dan ADONO. Pelaksanaan gerakan **AKINO** dimulai dengan melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan para camat, desa/kelurahan guna mengawasi pelaksanaan gerakan AKINO tersebut. Bahkan pemenuhan 100 persen Bidan Desa secara bertahap hingga tahun 2012 dan meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) NTB yang memberikan pelayanan persalinan gratis bagi ibu melahirkan di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah.

Dampak gerakan AKINO telah membawa perubahan terhadap perbaikan derajat kesehatan ibu, bayi dan masyarakat yang ditandai dengan semakin menurunnya Angka Kematian Bayi dari 68,96 per 1000 Kelahiran Hidup pada 2009 menjadi 55,5 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2012. Namun belum mencapai target berdasarkan RPJMD sebesar 47 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2012. Sementara penurunan Angka Kematian Ibu cukup signifikan dari 305,5 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2009 menurun menjadi 242,9 pe 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2012 masih lebih rendah dibanding target RPJMD sebesar 270 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2012.

Dalam rangka pemberantasan buta aksara, program **ABSANO** (Angka Buta Aksara Nol), sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan pembelajaran bagi masyarakat penyandang buta aksara kepada 98,81 persen dari 417.277 orang dan telah melampaui target RPJMD pada tahun 2012 sebesar 96,70 persen. Sementara itu gerakan **ADONO** (*Angka Drop-Out* **NOL**), yang merupakan gerakan dalam upaya menekan angka buta aksara dan angka *drop-out* pada tingkat pendidikan dasar, yang dilaksanakan di tiap-tiap Desa dan Kelurahan. Angka putus sekolah SD dan SMP telah berhasil ditekan di bawah 1 persen yaitu sekolah SD 1,09 persen pada tahun 2009 menurun menjadi 0,33 persen pada tahun 2012, SMP 1,83

persen pada tahun 2009 menjadi 0,65 persen pada tahun 2012. bahkan capaian ini lebih kecil dari target RPJMD tahun 2012 . Capaian Angka putus sekolah SMA sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 dibawah target RPJMD yaitu 2,54 persen pada tahun 2009 menurun menjadi 1,77 persen pada tahun 2012. Sejak program unggulan ABSANO (Angka Buta Aksara menuju Nol) dan ADONO (Angka Drop Out menuju Nol) dilaksanakan, kinerja sektor pendidikan NTB mengalami lompatan besar.

- f. Bahkan guna mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah pulau Sumbawa, pemerintahpun telah membangun **Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP)** di Sumbawa Besar, ibukota Kabupaten Sumbawa. RSUP ini telah beroperasi sejak 17 Desember 2011, termasuk pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi yang ada di Mataram. Kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak pada sektor kesehatan terlihat dari dukungan pendanaan pemerintah pusat , provinsi, pemerintah Kabupaten Sumbawa dan pihak ketiga
- g. Untuk menurunkan angka kesakitan masyarakat, pemantapan program Desa Siaga menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Desa Siaga adalah salah satu pendekatan yang dilaksanakan pemerintah untuk mendeteksi secara dini (preventif dan promotif) setiap masalah kesehatan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan.

Upaya yang dilakukan untuk memantapkan Desa Siaga antara lain: pembangunan sarana dan prasarana Poskesdes, penempatan bidan desa, pelatihan kader dan fasilitator desa. Secara kelembagaan, Desa Siaga ditandai oleh keberadaan Bidan di Desa yang dibantu oleh Kader Desa serta adanya Forum Desa Siaga.. Kurun waktu 2009-2012 telah terbentuk 993 Desa Siaga dan 955 Desa diantaranya menjadi Desa Siaga Aktif. Ciri dari Desa Siaga Aktif antara lain berjalannya Forum Desa Siaga, adanya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), adanya Peraturan Desa / Kelurahan yang mendukung program kesehatan, adanya peran pihak ketiga/ swasta dan adanya alokasi pendanaan dari pemerintah desa/kelurahan.

Dampak terbentuknya Desa Siaga Aktif adalah menurunnya kasus kematian ibu dan bayi, kasus gizi buruk, tingkat partisipasi masyarakat yang berkunjung ke posyandu ditunjukkan dengan D/S yang meningkat.

2. Bidang Infrastruktur

a. Pembentukan “**Kampung Media**”.

Kampung Media merupakan terobosan pengelolaan media berbasis warga yang mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet, media cetak dan elektronik. Dalam kampung media semua kegiatan pengelolaan media dikerjakan warga, muncul dari warga dan untuk kepentingan warga. Maka dirumuskan motto Kampung Media Strength in Own Page - Kekuatan ada di halaman sendiri. Sejak diluncurkan 2009, Kampung Media berkembang cepat. Dimulai di 10 desa dan kelurahan pada 2010, menyebar menjadi 51 pada 2012. Tersebar mulai dari Kelurahan Pagutan di Mataram, Desa Kuranji Lombok Barat, Desa Murbaya Lombok Tengah, Desa Rensing Lombok Timur hingga Moyo Hilir di Sumbawa dan Kelurahan Sedia di Kota Bima. Penyebaran yang cepat tersebut terjadi karena animo publik yang besar untuk mendirikan Kampung Media mandiri di wilayah mereka.

Eksistensi Kampung Media di NTB mendapat apresiasi secara nasional, terbukti adanya kerjasama dengan PT. Web Indonesia untuk mengelola 125 Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di NTB. Atas keberhasilan pengelolaan Kampung Media, pada 2011 menerima Universal Service Obligation Award dari pemerintah sebagai Ide Kreatif Terbaik Nasional. Melalui Kampung Media sekurangnya 100 orang pengelola telah terdidik menulis secara rutin, mereka datang dari latar belakang yang beragam, ada petani, tukang cukur, ibu rumah tangga hingga mahasiswa. Diperkirakan dari sekitar 1,5 juta pengguna internet di NTB, 10 persen dari mereka pernah mengakses Kampung Media.

b. Pembentukan **Desa Mandiri Energi (DME)**.

Pengembangan Desa Mandiri Energi dilakukan di NTB didasari oleh kenyataan bahwa masih adanya desa tertinggal yang minim infrastruktur dan fasilitas penunjang, seperti sarana pendidikan, sumber air bersih maupun akses masyarakat pada energinya. DME merupakan salah satu program agar desa bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, serta kemiskinan dengan mendorong kemampuan masyarakat dan penggunaan sumber daya setempat.

Secara khusus dengan program tersebut masyarakat perdesaan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasokan energi, khususnya minyak tanah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

DME adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energi (listrik dan bahan bakar) dari sumber energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumber daya setempat. DME dikembangkan dengan konsep pemanfaatan energi setempat, khususnya energi terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi dan kegiatan yang bersifat produktif.

Selama kurun waktu 2009-2012, pemerintah berupaya mewujudkan Pengembangan Desa Mandiri Energi dengan membangun beberapa jenis infrastruktur untuk pemanfaatan energi baru terbarukan berupa PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro), PLT Accu dan Digester Biogas.

Selama kurun waktu 2009-2012 telah terbangun PLTS dan PLT Accu sebanyak 4,105 unit yang tersebar di 32 Desa pada 8 Kabupaten dengan total daya 208.250 watt , 8 unit PLTMH dengan total kapasitas 460 KW di 6 Desa pada 6 Kabupaten . Pada tahun 2012 NTB memperoleh bantuan dari Kementerian ESDM untuk pembangunan PLTS Komunal dan PLT Hybrid dengan total daya 1090 KW di 7 Desa pada 5 kabupaten. husus untuk mendukung program konversi energi terutama untuk keperluan rumah tangga, selama kurun waktu 2011-2012 pemerintah NTB bekerjasama dengan HIVOS Biru telah membangun 1192 unit digester biogas yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan memasak. Tersebar di 10 kab/kota. Pembangunan digester biogas diutamakan pada lokasi sentra ternak khususnya ternak yang dikandangkan. Hasil pembangunan dari energi baru terbarukan telah mewujudkan Desa Mandiri Energi sebanyak 9 Desa dari 15 target Desa mandiri Energi yang dicanangkan dan perwujudan dari Desa Mandiri Energi lebih diutamakan pada pemenuhan kebutuhan listrik untuk Desa-desanya terpencil. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang perwujudan Desa Mandiri Energi itu telah dimanfaatkan masyarakat. Manfaat yang dirasakan masyarakat itu antara lain :

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat di daerah-daerah yang telah memanfaatkan listrik dari PLTMH, karena listrik yang dihasilkan bisa menjadi sumber energi bagi pengembangan usaha produktif seperti pertukangan kayu, pengeringan biji kopi, dll;
2. Pemanfaatan infrastruktur ketenagalistrikan seperti PLTMH, PLTS secara tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan SDM. Karena para pelajar yang ada di perdesaan tersebut mempunyai waktu yang lebih panjang untuk belajar secara mandiri.
3. Berkurangnya ketergantungan terhadap minyak tanah dan LPG bagi masyarakat yang telah mempunyai digester biogas, sehingga mereka bisa menghemat dana sekitar Rp.220.000,-/bulan dari biaya pembelian bahan bakar;
4. Banyaknya biogas yang telah dibangun di daerah perdesaan juga memberikan dampak langsung terhadap pelestarian lingkungan karena pemanfaatan biogas ini mengurangi penggunaan kayu bakar;
5. Pembangunan biogas merupakan wujud nyata dukungan untuk Program Bumi Sejuta Sapi, dan akan lebih maju lagi jika ditahun berikutnya bisa diintegrasikan.

c. Gerakan NTB Hijau.

Gerakan NTB Hijau dirancang sebagai program percepatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan yang memaduserasikan fungsi ekologi, sosial dan ekonomi. Percepatan diperlukan karena laju kerusakan hutan dan lahan bergerak lebih cepat daripada kemampuan merehabilitasi. Di Provinsi NTB pada 2009 tercatat luas lahan kritis 507.778 hektar atau 25,09% dari luas daratan, terdiri dari 11,61 persen dalam kawasan hutan dan 13,4 persen di luar kawasan hutan. Dampak yang ditimbulkan antara lain penurunan debit air, peningkatan potensi terjadinya bencana alam dan penurunan produktifitas lahan. Gerakan NTB Hijau juga merupakan respon atas perubahan iklim (climate change) yang menjadi isu global.

Gerakan NTB Hijau dilakukan melalui kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan lainnya berupa pengembangan hutan kemasyarakatan, pengembangan hutan tanaman rakyat dan pengembangan

hutan tanaman industri, sampai dengan tahun 2012 telah berhasil menurunkan lahan kritis dari 507.778 Ha pada tahun 2008 menjadi 338.289 Ha atau 33,38 persen pada tahun 2012 . Kegiatan NTB Hijau melibatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan.

Mengingat NTB Hijau juga berikhtiar untuk mempertahankan luas kawasan hutan dimana pada tahun 2008 luas kawasan hutan NTB 1.069,99 Ha bertambah menjadi 1.071,72 Ha pada tahun 2012, penambahan luas kawasan hutan karena adanya pengukuhan baru lahan lebih kurang 925 ha di gubung tunak dan 800 ha danau rawa Taliwang. Untuk mempertahankan luas sawah berkelanjutan, melalui pencetakan sawah baru baik yang dilaksanakan oleh provinsi dan Kabupaten/Kota, luas lahan sawah berkelanjutan dari 227.606 Ha pada tahun 2008 bertambah 13.155 Ha atau menjadi 240.761 Ha sampai dengan tahun 2012 dan angka ini lebih tinggi dari target RPJMD tahun 2012 . Sementara itu untuk kelestarian sumber mata air sebagai bentuk komitmen terhadap ketahanan pangan dan energi melalui Gerakan Perlindungan Mata Air (PERMATA) telah berhasil menangani 321 mata air sampai dengan tahun 2012 atau telah melampaui target RPJMD tahun 2012 sebesar 232 titik mata air, baik dalam dan luar kawasan hutan. Khusus penanganan mata air yang berada pada lahan milik individu masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama mendapat respon positif. Terbukti dengan banyaknya permohonan masyarakat untuk memanfaatkan sumber mata air yang selama ini belum terkelola dengan baik.

d. **Gerakan Ruang Hijau**

Ruang Hijau memiliki dua makna yang saling bergayut. Dalam konteks makna denotatif, ruang hijau diartikan sebagai kualitas pemanfaatan dan pengelolaan ruang sebagai wadah aktivitas kreatif produktif manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam (hutan, lahan, air dan mineral) secara efektif dan efisien serta berkelanjutan lestari. Sedangkan dalam konteks makna konotatif, Ruang Hijau dimaknai sebagai kata singkatan/rangkuman kalimat yang memiliki makna positif tertentu tentang kualitas kehidupan manusia yang dicerminkan makna kata yang disandangnya.

Ruang Hijau merupakan singkatan dari “**Ruang Hunian Ideal** (yang dibentuk dengan) **Jalan** mantap, **Air** lestari, dan **Utilitas** yang memadai”. secara kontekstual dalam kerangka pikir visi dan misi penyelenggaraan pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang, Ruang Hijau ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan perumahan. SPM Ruang Hijau secara teknis fungsional merupakan indikator capaian kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan, tata ruang dan urusan terkait lainnya.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas penataan ruang kawasan strategis provinsi yang hirarkis dan profesional (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) berbasis sumber daya berkelanjutan, kearifan lokal dan kekhasan daerah, perencanaan tata ruang merupakan dasar/pedoman dalam pelaksanaan penataan ruang Kawasan Perbatasan kabupaten/kota, penataan ruang kawasan strategis Provinsi. Sampai dengan akhir tahun 2012, penyusunan tata ruang perbatasan dan kawasan strategis provinsi sudah tersusun atau sesuai dengan target RPJMD. Penyusunan Raperda RTRW kabupaten/kota selesai seluruhnya pada tahun 2012 lebih cepat /melampaui dari target RPJMD.

Dalam kaitan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan serta menurunkan angka proporsi lingkungan perumahan yang kumuh, Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota berupaya terus melakukan penataan perumahan melalui perbaikan kondisi rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 rumah tidak layak huni masih tersisa sebanyak 316.653 unit. Penanganan rumah tidak layak huni tahun 2011-2012 sebanyak 20.750 unit. Pemerintah NTB terus berupaya menangani rumah tidak layak huni . Selain itu pemerintah juga meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan berkelanjutan, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk, baik di perkotaan maupun pedesaan Kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kesehatan setiap tahunnya meningkat terus sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Pemerintah provinsi NTB secara terus menerus berupaya

meningkatkan penyediaan dan pelayanan air bersih dan air minum baik kualitas dan kuantitas. Penyediaan air bersih diperoleh dari berbagai sumber seperti mata air, sumur bor, waduk, bendungan, sumur pompa, sumur gali dan pengelolaan air dari sungai. Kurun waktu 2009-2012, pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk NTB, baik di perkotaan maupun perdesaan terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata 1,3 sampai 2,2 persen. Hal ini terlihat dari cakupan layanan air bersih perkotaan pada 2009 sebesar 75,56 persen menjadi 79,35 persen pada 2012 dari target RPJMD sebesar 80 persen, demikian pula dengan kawasan perdesaan, meningkat dari 66,23 persen menjadi 71,42 persen dari target 73 persen.

Pembangunan jalan di Provinsi NTB dilaksanakan untuk menyeimbangkan aksesibilitas antar wilayah dan antar sektor untuk mewujudkan pemerataan tingkat kemantapan infrastruktur jalan antar wilayah dan antar sektor. Pemerintah NTB terus berupaya melakukan percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi terutama yang menuju kawasan strategis melalui program percepatan penanganan jalan dengan pola tahun jamak yang ditetapkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2010 dengan anggaran sejumlah 499,5 milyar rupiah. Program tersebut menangani 43 ruas jalan sepanjang 373,27 kilometer selama kurun waktu 2011-2013 dan mempercepat penanganan jalan strategis nasional sepanjang 202,84 kilometer dengan dukungan dana APBN, dan telah tertangani sepanjang 110,73 kilometer baik di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Selama kurun waktu 2009-2011, kondisi dan tingkat pelayanan jalan menunjukkan kemajuan yang berarti. Itu berlaku baik untuk jalan nasional maupun jalan provinsi. Jalan nasional di NTB sepanjang 632,17 kilometer yang merupakan bagian dari jalur trans nasional Banda Aceh – Atambua, sebagai jalur sabuk selatan nasional. Kemantapan jalan nasional di NTB pada tahun 2009 sebesar 72,43 persen menjadi 99,96 persen pada tahun 2012 atau sesuai target RPJMD dan jalan provinsi pada tahun 2009 sebesar 45,40 persen menjadi 66,02 persen pada tahun 2012 atau telah melampaui target RPJMD. Kemantapan jalan Nasional dan provinsi akan memperlancar konektivitas arus barang dan jasa dalam wilayah Provinsi NTB dan antar wilayah provinsi khususnya dalam Koridor V MP3EI. Dengan komitmen bersama Kelancaran

penanganan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, khususnya dalam penyediaan lahan untuk pelebaran dan pembangunan jalan. Atas ikhtiar tersebut, pemerintah pusat pada 2011 memberikan penghargaan NTB sebagai provinsi ketiga terbaik dalam penanganan percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi.

- e. Upaya dan dukungan Pemerintah provinsi NTB guna percepatan pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) oleh PT Angkasa Pura, dan sejak dioperasikannya Bandara tersebut pada September 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah menunjukkan kemajuan signifikan. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah Maskapai serta frekwensi penerbangan dibandingkan dengan aktivitas di Bandara Selaparang.

BIL mempunyai panjang Runway : 2.750 M' x 45 M, dan bisa didarati pesawat jenis Wide , Body B.767-400 dan A.330-200 kapasitas : 325 Seat.

Saat ini, 11 maskapai penerbangan telah beroperasi di BIL dengan 10 rute penerbangan lebih banyak dibanding dengan Bandara Selaparang sebanyak 8 maskapai dengan 7 rute penerbangan.

Bila frekwensi penerbangan di Bandara Selaparang Mataram tiap hari terdapat : 26 (Dua Puluh Enam) Flight atau 52 (Lima Puluh Dua) pergerakan pesawat, kini di Bandara Internasional Lombok (BIL) Loteng, setiap hari terdapat 38(Tiga Puluh Delapan) Flight atau 76(Tujuh Puluh Enam) pergerakan pesawat, sehingga terjadi peningkatan sebesar : 46 persen.

Demikian juga dengan jumlah penumpang sepanjang tahun 2012 melalui BIL sebanyak 1.769.192 orang lebih tinggi dibanding dengan jumlah penumpang melalui Bandara Selaparang pada tahun 2010 sebanyak 1.301.439 orang.

Bandara Internasional Lombok (BIL) Praya Lombok Tengah (NTB), telah ditetapkan sebagai Bandara Embarkasi / Debarkasi Haji ke 15 di Indonesia oleh Menteri Agama RI sesuai SK No. 71 Tahun 2012.

Pesawat yang digunakan untuk angkutan haji jenis : A.320 dengan kapasitas : 325 Seat, jumlah CJH NTB : $\pm$ 4.500 Orang.

Pemberangkatan Haji mulai tanggal 21 September s/d 15 Oktober 2012 berjumlah : 14 kloter dan kepulangannya tanggal 31 Oktober s/d tanggal 24 November 2012.

Maskapai Penerbangan Silk Air yang melayani rute AMI/LOP-SIN, sejak April 2009 telah menambah frekwensi dari tiga kali menjadi empat kali. Bahkan sejak bulan 12 Oktober 2012 Maskapai Air Asea telah membuka rute Kualalumpur-LOP (BIL) KUE-LOP tiga kali dalam satu Minggu. Selanjutnya, Januari 2009 hingga saat ini penerbangan Mataram - Bima dan Mataram - Sumbawa sudah terlaksana menjadi tiap hari.

- f. Untuk mempercepat peningkatan jalan nasional di P Sumbawa, pemerintah provinsi NTB terus melakukan koordinasi dengan Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan sejak tahun 2009 penangan jalan nasional di P.Sumbawa sudah dilaksanakan 499,7 km melalui program reguler APBN 21,4 km dan program Eastern Indonesia Nasional Road Improvement Project (EINREIP) loan AIPRD-L002 sepanjang 378,3 km. Hasil peningkatan jalan P.Sumbawa ditunjukkan dengan meningkatnya kemantapan dari 71,42 persen pada tahun 2009 menjadi 99,65 persen pada tahun 2012.

3. Bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau (Pertanian dalam Arti Luas)

- a. Nusa Tenggara Barat (NTB), terkenal sebagai kantong buruh migran. Di daerah ini menjadi buruh migran merupakan “primadona”. Seperti sebuah lowongan pekerjaan, peminatnya selalu berjejal melebihi kapasitas yang disediakan. Jumlah TKI NTB tercatat puluhan ribu, mereka mengirimkan remiten tiap tahunnya ratusan miliar besarnya. Sumbangan mereka terhadap daya tahan ekonomi daerah sangat besar. Menyadari itu pemerintah NTB terus berikhtiar memperbaiki kualitas pelayanan kepada para TKI. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah pelayanan kepada TKI dilakukan dengan membentuk Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 tahun 2008.

LTSP di NTB merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. LTSP telah memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pelayanan bagi ribuan TKI asal NTB yang setiap tahunnya mengadu hidup di negeri orang. Prinsip layanan yang diberikan di LTSP mudah, cepat, murah dan tepat. Pelayanan yang diberikan relatif menyeluruh, dari Perijinan/perpanjangan ijin operasional PPTKIS, penerbitan surat pengantar rekrut, penerbitan surat pengantar pelatihan ke BLKLN (Timteng), verifikasi dokumen peromohonan

paspor dari kabupaten/kota pada layanan paspor di unit imigrasi, pembayaran DP3TKI (PNBP), pelayanan asuransi perlindungan TKI, pengesahan perjanjian kerja, Pembekalan akhir pemberangkatan, penerbitan KTKLN. Dalam LTSP bersatu dan berkolaborasi sejumlah fungsi dan wewenang dari unsur dan instansi terkait, selain Disnakertrans NTB, ada pula BP3TKI, Imigrasi Mataram, sarana kesehatan, BRI, konsorsium asuransi, pelayanan pajak, dan maskapai penerbangan.

Sepanjang 2009-2012, LTSP mencatat penempatan TKI mencapai 205.131 orang ke 16 negara tujuan. Jumlah *remittance* tahun 2009 yang tercatat oleh Bank Indonesia (dari Bank BNI 46, Bank Mandiri dan Bank BCA) dan BPS (dari sumber kantor Pos dan Pegadaian) sebesar Rp. 1.012.362.228.943,84,- meningkat menjadi Rp.1.104.169.850.223,97,- pada tahun 2012 atau naik sebesar 9,10 persen.

b. *Pencanangan Visit Lombok- Sumbawa 2012.*

Target kunjungan wisatawan sejumlah 1 juta orang pada tahun 2012, merupakan langkah strategis untuk meletakkan pijakan tekad untuk secara sungguh-sungguh mengelola segenap potensi dan daya tarik wisata Daerah Nusa Tenggara Barat agar menjadi daerah tujuan wisata utama nasional maupun internasional.

Perkembangan pariwisata NTB begitu terasa lonjakannya sejak program Visit Lombok Sumbawa 2012 diluncurkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Angka kunjungan wisatawan dari tahun 2009 terus meningkat sampai tahun 2012 bahkan melampaui target RPJMD. Pada tahun 2012 angka kunjungan wisatawan mencapai **1.163.142** orang . Perkembangan pariwisata didukung dengan infrastruktur yang memadai mulai pembenahan lokasi tujuan wisata, jalan, listrik, air, perhubungan udara. Program Visit Lombok Sumbawa 2012 telah memberi dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja program Visit Lombok-Sumbawa 2012 mendapat apresiasi banyak kalangan. Pada November 2009, Gubernur NTB mendapatkan penghargaan Indonesia Tourism Award (ITA) untuk kategori Commitment Developing Tourism Industry karena dinilai menunjukkan komitmen serius dalam membangun dunia pariwisata di NTB. Penghargaan lainnya diraih, yaitu Indonesia MICE Award (IMA) sebagai Gubernur terbaik

dalam menerapkan kebijakan dan strategi pengembangan wisata MICE. Kedua penghargaan tersebut menunjukkan apresiasi dunia luar terhadap ikhtiar yang telah dilakukan bersama seluruh komponen pemangku amanah dan masyarakat. Termasuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai lini terdepan dalam menggerakkan pembangunan pariwisata di setiap destinasi wisata. Ke depan, sejalan dengan kebijakan nasional dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pemerintah NTB masuk pada koridor V sebagai pintu pariwisata dan Ketahanan pangan, memastikan pertumbuhan pariwisata yang tinggi dan terkendali dan angka kunjungan wisatawan pada tahun 2013 akan jauh lebih tinggi dari target RPJMD yang telah ditetapkan, makin bergeliatnya sektor jasa penunjang pariwisata dan penggerak roda perekonomian daerah.

c. Pencanaan NTB sebagai **Provinsi Bumi Sejuta Sapi**.

Pencanaan NTB sebagai “Provinsi Bumi Sejuta Sapi”, didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini NTB merupakan salah satu daerah penunjang kebutuhan (daging) sapi untuk kebutuhan nasional. Saat ini potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan ternak di daerah NTB seluas 1.928.300 ha. Sedangkan ketersediaan pakan ternak sebanyak 2.655.294 *animal unit (au)*, dan potensi yang sudah dimanfaatkan sejumlah 638.983 *au*, sehingga masih memungkinkan untuk pengembangan ternak kedepan sebanyak 2.016.311 *au*. Disamping itu hasil penelitian kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Universitas Mataram dan Pemerintah Australia telah menghasilkan metode pengembangan ternak sapi yang dikenal dengan metode S3 (satu induk, satu anak, satu tahun) yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pencanaan NTB sebagai provinsi "Bumi Sejuta Sapi" ditandai dengan penandatanganan MOU dengan Dirjen Peternakan untuk swasembada daging sapi 2010 pada tanggal 17 Desember 2008. Peningkatan populasi Sapi, selama 2010-2012 meningkat dan lebih dari target. Pada 2012 tercatat populasi sapi di NTB mencapai **916.560** ekor dari target 897.832 ekor. Jumlah populasi sapi meningkat hampir 400 ribu ekor dibandingkan jumlah populasi pada 2008 dan sampai dengan 2012 terdapat 2560 kelompok peternak yang mendapatkan dukungan program NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS) dalam bentuk bantuan teknis, bantuan manajemen dan bantuan sapi. Untuk mendukung program BSS, tahun

2011 pemerintah provinsi kerjasama dengan Menristek melalui program Sisitim Inovasi Daerah (SIDa) telah menjadikan lokasi RPH Banyumulek sebagai sentra pembibitan ternak sapi dan telah dilakukan transfer teknologi inseminasi buatan untuk 260 ekor sapi dan telah dipanen pada bulan Desember 2012.

Bersamaan dengan terobosan Bumi Sejuta sapi, pemerintah juga menetapkan program Bumi Sejuta Sapi sebagai program unggulan Agribisnis Pijar (Sapi, Jagung dan rumput laut). Produksi jagung mengalami lompatan besar dari tahun 2008 sebesar 196.300 ton menjadi 642.674 ton pada tahun 2012 dengan 2.409 kelompok tani yang telah mendapatkan dukungan program dalam bentuk kelompok sekolah lapang, benih, peralatan budidaya dan pengolahan hasil serta fasilitasi permodalan dengan perbankan dan pihak swasta. Untuk rumput laut sepanjang empat tahun capaian produksi tak terpenuhi. **Tahun 2008 produksi rumput laut 147.250 ton dari target 150.00 ton dan pada tahun 2012 sebesar 657.700 ton dari target 750.000 ton.** Program agribisnis rumput laut, terdapat di 10 kawasan minapolitan dengan 14.823 petani pembudidaya yang memperoleh dukungan program. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan kepada kelompok berupa pemberian bibit unggul, peralatan budidaya dan pengolahan hasil serta fasilitasi permodalan dengan perbankan.

d. **Menciptakan 100.000 Wirausaha Baru.**

Pemerintah provinsi NTB berkomitmen untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan dalam bentuk penciptaan wirausaha baru yang berbasis ekonomi kerakyatan. Usaha mikro merupakan usaha yang paling diminati masyarakat yang bermodal kecil ini sarat dengan keunggulan, antara lain sifatnya yang *fleksibel*, kemampuan menyerap tenaga kerja, serta kemampuan untuk bertahan di kondisi ekonomi yang sulit. Program terobosan penumbuhan wirausaha baru, memiliki nilai strategis antara lain: membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan sekaligus mengurangi pengangguran.

Langkah yang dilakukan dalam percepatan perwujudan program wirausaha baru al: membentuk Pokja penumbuhan WUB baik di tingkat Provinsi, kabupatenkota, melaksanakan kegiatan yang menunjang program WUB seperti bintek wub, bantuan modal usaha, mencetak kader penggerak wub di

116 kecamatan , kemitraan dengan BUMN untuk meningkatkan ketrampilan dan Kabupaten; melakukan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota , bantuan peralatan usaha seperti gerobak dorong, mesin jahit,, alat masak, alat kemasan, alat kecantikan dan perbengkelan serta pembuatan lapak.

Kurun waktu 2009-2012 telah terbentuk 74.206 WUB dan melampaui target RPJMD sebesar 70.000 WUB dengan total aset Rp 69.960.130.054,- omset sebesar Rp 71.352.963.895.- dan jumlah tenaga kerja mencapai 168.667 orang.

Tumbuhnya wirausaha (usaha mikro kecil dan menengah) termasuk wirausaha baru pada suatu daerah tidak bisa terlepas dari komitmen dan peran pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Wirausaha baru yang diprogramkan akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga pengangguran dan kemiskinan menjadi berkurang, yang pada akhirnya ekonomi masyarakat, khususnya di NTB akan tumbuh dan berkembang lebih cepat, sehingga pengangguran di NTB sekitar setengah juta orang lebih dapat berkurang. Penciptaan Wirausaha baru merupakan terobosan untuk mengurangi tingginya angka pengangguran di NTB.

- e. Sejarah pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Pemerintah Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Hal ini menyadarkan kita bahwa wilayah Bali, Nusa Tenggara sebagai eks pemerintahan “Sunda Kecil” adalah mempresentasikan bentuk kebhinnekaan dan dilatar belakangi oleh konteks kesamaan wilayah yang berpulau – pulau serta dikelilingi laut yang dominan pada masing – masing wilayah. Dengan semangat historika Sunda Kecil dan Otonomi Daerah, maka kebutuhan penyelesaian isu – isu strategis di wilayah Bali – Nusa Tenggara adalah penciptaan sinergi demi mengakses pembangunan yang secara potensial saling berkaitan dan menguntungkan bagi wilayah Bali – Nusa Tenggara (NTB dan NTT). Memperhatikan sejarah, kesamaan wilayah yang berpulau, semangat dan kebersamaan, pemerintah NTB telah berhasil menggagas pembentukan kawasan ekonomi “Sunda Kecil” meliputi Bali, NTB dan NTT yang diwujudkan dengan penandatanganan “Piagam Kupang” pada tanggal 20 Desember 2008.
- f. Dalam rangka mewujudkan misi NTB Bersaing yaitu mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan sasaran

terwujudnya iklim usaha yang kondusif, pada tahun 2008 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi NTB dengan General Manager PT Garuda Indonesia Lombok Cabang Mataram menjalin kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan MOU untuk penempatan brosur/leaflet di seluruh kantor cabang PT Garuda Indonesia di Dalam Negeri dan pada kantor cabang PT Garuda di Luar Negeri khususnya di negara kawasan Timur Tengah. Kerjasama ini dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi yang akurat dan terpadu tentang potensi NTB yang dapat memberikan manfaat dan kemampuan pertumbuhan ekonomi daerah. Kerjasama ini berhasil membangun paradigma yang positif tentang investasi yang ada di NTB yang memiliki prospek jelas dan mengarah pada peningkatan investasi pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat NTB. Kurun waktu 2008-2010 telah diserahkan brosur/leaflet potensi Investasi Provinsi NTB bahasa Indonesia sebanyak 3050 exemplar dan 1822 exemplar dalam bahasa Inggris.

- g. Peluncuran perdana ekspor air mineral organik ke Australia.

Pada tahun 2008, PT Narmada Awet Muda telah melakukan export air mineral organik ke Australia didasarkan atas permintaan buyer sebanyak 1.178 dus atau 28.272 botol @ 600 ml dengan nilai export sebesar Rp 20.743.402.-. Selama kurun waktu 2008 - 2010 jumlah air mineral organik yang di export ke Australia mencapai 9.438 dus atau 226.512 botol dengan kemasan 600 ml, total nilai export Rp 165.359.482.-. Sejak Tahun 2011 PT Narmada Awet Muda tidak lagi mengexport air mineral karena tidak ada permintaan oleh buyer dari Australia.

- h. Memantapkan program "**Desa Mandiri Pangan**" guna memastikan ketersediaan, kemudahan dan keragaman pangan. Program Desa Mandiri Pangan dilaksanakan didasarkan pada masih adanya daerah yang berpotensi mengalami rentan pangan baik kronis maupun transient. Program Desa Mandiri Pangan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di desa rawan pangan yang jumlah penduduk miskinnya lebih dari 30%, serta memiliki karakteristik: kualitas sumberdaya masyarakat rendah, sumber daya modal terbatas, akses teknologi rendah, dan infrastruktur perdesaan terbatas namun berpotensi untuk dikembangkan serta adanya respon yang kuat dari aparat desa dan

masyarakat untuk bersedia menerima dan mendukung Program Desa Mandiri Pangan.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan di tingkat desa beberapa kegiatan antara lain pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif, membentuk Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai lembaga permodalan, penguatan kelembagaan keuangan desa dan Tim Pangan Desa, integrasi program sub sektor dan lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasarana perdesaan dan penguatan sistem ketahanan pangan.

Dengan intervensi kegiatan di atas, diharapkan terjadi peningkatan usaha produktif, peningkatan pendapatan dan daya beli serta ketersediaan pangan dan gizi masyarakat. Selama kurun waktu 2008-2012, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengembangkan 199 Desa Mandiri Pangan di sepuluh kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil kajian Pusat Penelitian Ketahanan Pangan Dan Gizi (P2KPG) Universitas Mataram terhadap dampak pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan yang telah memasuki tahap kemandirian, memperlihatkan bahwa Desa lokasi program yang telah memasuki tahap kemandirian menunjukkan peningkatan penguasaan asset dan akumulasi *capital* pada rumahtangga; penurunan kemiskinan rumahtangga, meningkatnya aksesibilitas pangan rumahtangga, peningkatan lapangan usaha dan ketersediaan modal usaha.

- i. Revitalisasi penyuluh pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Upaya pemerintah memperkuat peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam tatanan pembangunan ekonomi, dilakukan gerakan revitalisasi pendayagunaan dan pemberdayaan potensi-potensi sumberdaya yang ada, diantaranya adalah memerankan penyuluhan sebagai penggerak pembangunan di pedesaan. Revitalisasi penyuluhan yang dilaksanakan terkait aspek penyelenggaraan penyuluhan; Penataan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan; Sumberdaya Manusia Penyuluhan dan Peningkatan Sarana Prasarana

Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dilakukan melalui pengembangan sistem informasi penyuluhan berbasis informasi teknologi, mulai tahun 2011 telah diaplikasikan di provinsi dan 10 kabupaten/kota se NTB. Sistem

informasi ini memuat materi penyuluhan, konsultasi penyuluhan, kalender tanam dan seluruh aspek terkait penyuluhan dalam rangka memudahkan penyebaran informasi terkait penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Selain itu penataan kelembagaan penyuluhan telah dilakukan baik kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan penyuluhan non struktural. Telah terbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH) ditingkat Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPELUH) di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima dan Kota Mataram. Masih terdapat tiga kabupaten/kota yang belum membentuk BAPELUH yaitu kabupaten Dompu, Lombok Utara dan Kota Bima. Sementara itu kelembagaan penyuluhan non struktural yang berada di tingkat pedesaan adalah kelompok tani dan gabungan kelompok tani, sampai dengan tahun 2012 terbentuk 10.577 kelompok tani dan 1.033 Gapoktan.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penyuluhan terus dilakukan melalui pelatihan, study banding, melakukan reposisi/pengaturan kembali penempatan penyuluh sesuai kebutuhan. Kebijakan untuk menempatkan 1 desa 1 penyuluh menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTB. Jumlah Penyuluh di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2012 sebanyak 1.625 orang. Berkaitan dengan sarana prasarana penyuluhan, pembangunan BPP sampai dengan tahun 2012 sebanyak 104 BPP dari 116 kecamatan.

Dampak dari hasil revitalisasi penyuluh, terjadinya peningkatan produktivitas petani dari hasil demplot yang disusun dari program; tumbuhnya petani menjadi usaha kecil menengah; meningkatnya keikutsertaan instansi terkait lingkup rumpun hijau dalam penyelenggaraan penyuluhan serta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam diversifikasi usaha dan penyuluh

- j. Memantapkan Gerakan "**Gemar Memakan Ikan**" merupakan upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Kegiatan Gerakan "Gemar Memakan ikan yang dilakukan antara lain melalui program ikan untuk sekolah (bantuan benih dan pakan ikan kepada sekolah-sekolah yang berpotensi untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar, Demo dan lomba masak ikan,

pemberian makanan tambahan (ikan) untuk anak SD, kegiatan makan ikan terbanyak . Pada tahun 2010 provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) terkait dengan pemrakarsa dan penyelenggara makan ikan (GEMARIKAN) dengan peserta terbanyak. Dampak dari Gerakan memakan ikan ditunjukkan dengan semakin meningkatnya tingkat konsumsi ikan dan pada tahun 2012 tingkat konsumsi ikan sebesar **26,50 kg/kapita/tahun** telah melampaui target yang ada di RPJMD yaitu sebesar 25,46 kg/kapita/tahun.

- k. Meluncurkan "**Pasar Tani**" di Kota Mataram dan Kota Selong Lombok Timur, sebagai model pengembangan pasar khusus bagi produk unggul pertanian yang mendekatkan petani dengan pembeli.

Model pengembangan pasar khusus, yang lebih dikenal dengan "Pasar Tani", dimana petani dapat langsung memasarkan hasil pertaniannya maupun hasil olahannya kepada konsumen dan dapat memperoleh harga yang lebih tinggi, sekaligus sebagai wadah wadah pembelajaran bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dibidang pemasaran. Dipihak lain, konsumen dapat memilih komoditi yang lebih bervariasi dalam keadaan segar maupun sudah diolah dengan mutu baik dan harga wajar.

Pasar Tani merupakan pasar yang tidak permanen beroperasi 1-2 kali dalam seminggu, tergantung kesepakatan dari yang terlibat dengan pasar tani. Pasar tani yang dibentuk pada tahun 2008 hingga saat ini berlokasi di Kota Mataram yang bernama Gora Selaparang dan Pasar Tani Kabupaten Lombok Timur. bernama Pasar Tani Rinjani.

Pasar tani Gora Selaparang beroperasi di kawasan jalan Udayana dan halaman parkir Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB sekali dalam seminggu. Komoditas yang dipasarkan adalah hasil pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan olahan hasil tahu,tempe dan olahan makanan seperti keripik pisang, emping melinjo, ceker ayam, top corn, rumput laut. Omzet penjualan per bulan mencapai Rp 9.000.000.- dan guna menunjang peningkatan pemasaran, telah dilakukan kemitraan dengan toko-toko dan pedagang besar.

Sementara Pasar tani Rinjani sampai saat ini beroperasi setiap hari di Labuhan Haji dan Masbagik yang sebelumnya beroperasi di ex pasar Selong, yang sekarang

sudah dijadikan pertokoan. Komoditas yang dipasarkan adalah hasil pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, kehutanan berupa madu dan olahan hasil tahu, tempe dan olahan makanan seperti keripik pisang, emping melinjo, pisang sale, pop corn, rumput laut. Omzet penjualan per bulan mencapai Rp 800.000.000.- Dan guna menunjang peningkatan pemasaran, telah dilakukan kemitraan dengan pengusaha dari luar Lombok Timur.

Berkembangnya pasar tani telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan memicu petani untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan mutu produksinya.

1. Membangun kemitraan dengan BUMN untuk meningkatkan kinerja Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UKMK) dan Panti-Panti Sosial.

Untuk meningkatkan kinerja Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKM), pemerintah terus berupaya membangun kemitraan dengan BUMN yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kemitraan telah dilakukan dengan 10 BUMN dan pihak swasta yang ada di NTB seperti PT Angkasa Pura I, PT Askes Cabang Mataram, PT jasa Raharja, PT Telkom, PT jamsostek dan kerjasama pihak swasta seperti YDBA Jakarta, Astra Motor Mataram, FIF Mataram, PPKP Mataram, STMIK Bumi Gora Mataram.

Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, pemberdayaan UMKM merupakan solusi dan sebagai basis pembangunan daerah .

Kemitraan dengan BUMN dan pihak swasta terkait dengan pelatihan perbengkelan mekanik roda dua, sistem injeksi sepeda motor, mekanik mesin Isuzu, inovasi pembuatan roti, kue kering, menjahit, pembuatan mie, bakso, abon, kuliner, pembukuan sederhana bagi koperasi, kewirausahaan, kemasan dasar, tata rias dan kemitraan dengan jumlah peserta 799 orang.

Perkembangan yang signifikan pasca pelatihan yang telah dilakukan oleh BUMN yang berkaitan dengan aspek pembuatan rencana usaha, aspek pemasaran dan desain produk memberikan pemahaman bagi UMKM dalam pengembangan usahanya secara berkelanjutan.

4. Bidang Pemerintahan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi

- a. Keberhasilan pembangunan di daerah ditentukan oleh kebersamaan berbagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota, serta para pemangku amanah. Pemerintah provinsi NTB

senantiasa mengedepankan pemantapan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta penanganan berbagai isu strategis.

Kegiatan yang dilakukan berupa kunjungan kerja ke seluruh Kabupaten/Kota untuk koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui rapat forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) provinsi dan Kabupaten Kota yang dilaksanakan secara bergilir di kabupaten/kota untuk lebih mengefektifkan peran kelembagaan dalam peningkatan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak tahun 2009 diselenggarakan Pra Musrenbang Provinsi dengan pendekatan Satuan Wilayah Pembangunan sebagai upaya pemanduserasian program regional dan sektoral di daerah. Menetapkan SKPD provinsi sebagai pembina Wilayah di seluruh kecamatan se Provinsi NTB untuk mensinergikan pelaksanaan program unggulan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan, rapat evaluasi kinerja SKPD dilaksanakan setiap Triwulan yang dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, dihadiri oleh eselon I, II dan III lingkup pemerintah Provinsi NTB.

- b. Guna mewujudkan misi ke dua dan komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, telah dilakukan penandatanganan MoU dengan seluruh Bupati/Walikota untuk sharing anggaran pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga miskin. Untuk pelayanan kesehatan, Mulai tahun 2009 MoU telah ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang besaran dananya disesuaikan dengan quota masing-masing kabupaten/kota. Perjanjian hibah antara pemerintah kabupaten/kota diperbaharui setiap tahun.
- c. Penetapan APBD NTB merupakan komitmen bersama antara Pemerintah NTB dengan DPRD provinsi yang telah dimulai sejak penetapan APBD 2009 pada 15 Desember 2008. Konvensi penetapan APBD ini dilaksanakan lebih awal. Untuk penetapan APBD tahun 2010 pada tanggal 25 Agustus 2010, Penetapan APBD tahun 2011 pada tanggal 13 Desember 2010 dan APBD 2012

pada tanggal 16 Desember 2011. Penetapan APBD lebih awal dihajatkan agar pelaksanaan program kegiatan tidak mendapat hambatan.

- d. Pengawasan pembangunan di Nusa Tenggara Barat senantiasa mengusung paradigma yang mengedepankan pembinaan dan pencegahan secara proaktif, menggerakkan potensi dan merajut kebersamaan semua elemen pemerintahan. Wujud nyata tekad pemerintah terhadap pengawasan pembangunan tersebut, pada tahun 2009 pemerintah NTB telah memfasilitasi lahirnya MoU antara Kejaksaan Tinggi NTB, Polda NTB dan BPKP untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi di NTB.
- e. Pencanaan gerakan anti korupsi dengan pemasangan lencana atau PIN Anti Korupsi KPK untuk seluruh karyawan lingkup pemerintah Provinsi NTB telah dilaksanakan bertepatan dengan Ulang Tahun NTB ke 50 pada tanggal 17 Desember 2008. Hal ini merupakan suatu gerakan dalam upaya membangun kesadaran aparatur pemerintah NTB dalam pengelolaan administrasi keuangan sehingga terjadi efektifitas dan efisiensi anggaran.
- f. Melanjutkan upaya gerakan anti korupsi, pemerintah NTB juga melakukan penataan aparatur pemerintah melalui reformasi birokrasi yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas bagi setiap pemangku jabatan struktural agar tidak melakukan KKN dan bekerja secara profesional. Selain itu dalam upaya peningkatan pelayanan, transparansi dan memperkecil peluang korupsi, pemerintah NTB menerbitkan sejumlah 26 Peraturan Gubernur sejak tahun 2009 -2012. Selanjutnya untuk meningkatkan profesionalisme, mengoptimalkan tujuan organisasi sesuai ketrampilan, pengetahuan dan attitude aparatur, penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat baik pada level manager rendah, menengah dan tinggi maupun pada level pekerjaan teknis fungsional telah dilakukan uji kompetensi manajerial dan bidang untuk staf dan pejabat yang akan dipromosi. Uji kompetensi dilakukan oleh tenaga assesor terlatih pada Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi BKD PP Provinsi NTB yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis badan pada Inspektorat, bappeda dan lembaga Teknis daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penataan personil birokrasi dengan

mempertimbangkan integritas dan pengembangan kompetensi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi berkinerja tinggi.

- g. Untuk menjadikan aparatur yang bersih dan berbudaya kerja yang tinggi, pemerintah NTB mengeluarkan Edaran Gubernur NTB nomor 240/673/Adm Kesra Tahun 2009 tentang pelaksanaan kegiatan Imtag setiap hari Jum'at. Kegiatan imtaq dimaksudkan agar terbangunnya kesadaran moral dan spriritual bagi seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik .
- h. Pemerintah provinsi NTB, yang berhasil mengembangkan tanaman tembakau, dan menjadi salah satu provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia merasa sangat dirugikan. Meskipun sebagai daerah penghasil tembakau terbesar, namun tidak mendapatkan dana dari cukai tembakau, sebagaimana diundangkan dalam Undang Undang nomor 39/2007.

Untuk itu pemerintah provinsi perlu melakukan uji materi pasal 66 a (ayat 1) Undang-Undang 39 tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan provinsi NTB sebagai salah satu provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia (70 – 80 persen). Provinsi NTB justru tidak dapat menikmati cukai hasil tembakau, sehingga secara konstitusional sangat dirugikan. Dan Provinsi NTB sangat berkepentingan untuk mengajukan permohonan uji materi undang-undang tersebut.

Pasal 66a ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 2007 menyatakan bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2%, yang digunakan mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

PASAL 66 a menyebutkan bahwa:

- (1). Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

- (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan.
- (3) Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya.
- (4) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan persetujuan menteri, dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi RI terhadap hasil dari uji materi undang-undang nomor 39 tahun 2007 memberikan amar putusan menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dipenuhi paling lambat mulai tahun anggaran 2010, sehingga dengan keputusan mahkamah konstitusi tersebut provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan **dana bagi hasil cukai hasil tembakau** (DBH-CHT) sejak tahun anggaran 2010 sebesar Rp119.000.000.000.00,- dan meningkat 34 persen di tahun 2012 (Rp 160.000.000.000.00).

Dampak dari diterimanya DBH-CHT di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu :

- Mengatasi permasalahan bahan bakar omprongan tembakau yaitu dengan dicabutnya bahan bakar minyak tanah oleh pusat, pemerintah provinsi NTB telah memberikan bantuan kepada petani tembakau untuk melakukan alih teknologi dengan menggunakan bahan bakar alternatif (BBA) seperti batubara, cangkang kemiri, cangkang sawit dan lain-lain sebagai pengganti minyak tanah.
- Penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau (kelompok petani tembakau rakyat dan tembakau virginia).

- Peningkatan kualitas bahan baku melalui pemberian subsidi bahan bakar alternatif (batubara/briket) kepada petani yang telah melakukan konversi dari BBMT ke BBA dan juga masih banyak dampak positif lainnya.
- i. Menerapkan *e-Procurement* untuk transparansi sistim pengadaan barang di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Pengadaan barang dan jasa secara *elektronik Procurement (e-Procurement)* di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB mulai disosialisasikan sejak tanggal, 14 November 2009 oleh Pemerintah Pusat (LKPP). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terselenggara secara ad hoc berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 129 tahun 2010 merupakan unit pelayanan yang memfasilitasi kegiatan pengadaan barangjasa secara elektronik (*e-procurement*) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB khususnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada umumnya, yang pelaksanaannya dibawah koordinasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB. Untuk mempercepat penyelenggaraan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTB, telah dilaksanakan berbagai program kegiatan, baik berupa Pelatihan untuk Pokja Panitia Lelang SKPD, Pelatihan Penyedia Barang/Jasa, Pelatihan Bagi Trainer LPSE Kab/Kota, Pelatihan bagi Auditor Kab/Kota, Sosialisasi Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik dari Pusat (PP 54/2010), Renovasi Ruang LPSE dan Up Grading Jaringan dan Kapasitas server LPSE.

Tahun 2011 jumlah paket pengadaan yang diselenggarakan oleh LPSE sebanyak 92 Paket, dengan total nilai nominal proyek sebesar Rp. 292.011.700.000,-. bersumber dari APBN, APBD maupun PHLN. Pada tahun 2011 pemerintah NTB menyiapkan kelembagaan Layanan Pengadaan Barang secara Elektronik dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menjadi bagian struktur organisasi Biro Administrasi Pembangunan. Tahun 2012, terbentuk Unit Layanan Pengadaan Provinsi NTB dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 5 Tahun 2012 dan dilanjutkan dengan melakukan perubahan 2 atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008

menjadi Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD NTB (paragraf 2 pasal 97-103) dimana Biro Administrasi Pembangunan Setda menjadi Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan barang Jasa Pemerintah Setda Provinsi NTB. Pada tahun 2012 ULP NTB telah melakukan lelang sebanyak 254 paket dengan nilai Rp 314 M bersumber dari APBD Prov NTB dan efisiensi yang dihasilkan dari hasil lelang sebesar Rp 27,03 M.

III. Tahap III RPJMD periode 2013-2018

Sesuai dengan RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018, terdapat 31 indikator untuk mendeskripsikan kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : **aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 12 indikator kinerja** meliputi indikator Penurunan Jumlah Konflik Sosial, Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi (non tambang), Pola Pangan Harapan, Pengeluaran Per Kapita, Angka kemiskinan, Laju Investasi, Pertumbuhan PAD, Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara), dan Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); **aspek pelayanan umum diukur dengan 7 indikator kinerja** meliputi indikator Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik, Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB Online, Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap, Ratio Elektrifikasi, Cakupan Air Bersih (Perkotaan dan Perdesaan), Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, dan Cakupan Jamban Keluarga; serta **aspek daya saing daerah dengan 12 indikator kinerja** meliputi indikator Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun keatas, Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas, Usia Harapan Hidup, Prevalensi Kurang Gizi, Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan, Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah, Pranata Adat yang Terbentuk, Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain Industri, Merek, dan Hak Cipta), Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD, Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Mata Air Terlindungi.

Capaian 31 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB sampai dengan tahun 2018 secara keseluruhan terdapat 22 indikator tercapai atau 70,97%, dan masih terdapat 9 indikator belum tercapai atau 29,03%.

Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja RPJPD pada Periode RPMPD ke-3 Berdasarkan Aspek Pembangunan

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Kondisi Kinerja Akhir 2018			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Ket
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1	Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	54	27	13	151,85	Melampaui
2	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	%	45	100	100	100,00	Sesuai
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	70,47	73	75,12	102,90	Melampaui
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT)	%	5,38	4,55	3,58	121,32	Melampaui
5	Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)	%	5,42	6,25 – 6,50	3,20	51,20	Belum memenuhi target
6	Pola Pangan Harapan	point	78,7	82,5	82,80	100,36	Melampaui
7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	555,84	958	918	95,86	On the track
8	Angka kemiskinan	%	17,97	12,25	14,75	79,59	On the track
9	Laju Investasi	%	8,28	13,5	39,90	295,56	Melampaui
10	Pertumbuhan PAD	%	13,66	7,64	-1,43	-18,72	Belum memenuhi target
11	Kunjungan Wisatawan	Org	1.357.602	4.000.000	2.812.379	70,31	On the track
	- Mancanegara	Org	565.944	2.000.000	1.204.556	60,23	On the track
	- Nusantara	Org	791.658	2.000.000	1.607.823	80,39	On the track
12	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	1,58	2,42	22,42	926,45	Melampaui
B	Aspek Pelayanan Umum						
1	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100,00	Sesuai
2	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB Online	Kali	4.653	160.000	549.047	343,15	Melampaui
3	Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	83,65	83,65	100,00	Sesuai
4	Ratio Elektrifikasi	%	64,43	75	93,83	125,11	Melampaui
5	Cakupan Air Bersih						
	- Perkotaan	%	80,23	87,56	92,66	105,82	Melampaui
	- Perdesaan	%	72,15	81,87	82,49	100,76	Melampaui
6	Penanganan Rumah Tidak layak huni	Unit	21.471	26.471	27.530	104,00	Melampaui
7	Cakupan Jamban Keluarga	%	72,15	80	85,94	107,43	Melampaui
C	Aspek Daya Saing						
1	Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun keatas	Tahun	6,54	6,95	7,03	101,15	Melampaui
2	Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas	%	15,33	10	12,58	74,20	On the track
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	64,74	67,7	65,87	97,30	On the track

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Kondisi Kinerja Akhir 2018			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Ket
4	Prevalensi Kurang Gizi	%	18,27	15	26,4	24,00	Belum memenuhi target
5	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,52	21	20,23	96,33	<i>On the track</i>
6	Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah	%	10	75	100	133,33	Melampaui
7	Pranata Adat yang Terbentuk	Lembaga	10	260	321	123,46	Melampaui
8	Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah						
	- Desain Industri	Produk	37	112	127	113,39	Melampaui
	- Merek	Produk	42	142	238	167,61	Melampaui
	- Hak Cipta	Produk	18	93	98	105,38	Melampaui
9	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	58,84	100	100	100,00	Sesuai
10	Jumlah penumpang angkutan udara dan laut						
	- Angkutan udara	org	2.145.290	3.626.000	4.205.496	115,98	Melampaui
	- Angkutan laut	org	125.794	227.502	950.088	417,62	Melampaui
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		67,77	67,95	75,16	110,61	Melampaui
12	Mata Air Terlindungi	Titik	334	438	527	120,32	Melampaui
Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja (%)						70,27	
Rata-rata capaian kinerja periode 2013-2018 (%)						140,53	
Predikat Kinerja (Kategori)						SANGAT TINGGI	

Deskripsi capaian indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dijelaskan sebagai berikut.

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Periode RPJMD ke-3 Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Kondisi Kinerja Akhir 2018			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Ket
1	Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	54	27	13	151,85	Melampaui
2	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	%	45	100	100	100,00	Sesuai
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	70,47	73	75,12	102,90	Melampaui
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,38	4,55	3,58	121,32	Melampaui

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Kondisi Kinerja Akhir 2018			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Ket
5	Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)	%	5,42	6,25 – 6,50	3,20	51,20	Belum memenuhi target
6	Pola Pangan Harapan	point	78,7	82,5	82,80	100,36	Melampaui
7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	555,84	958	918	95,86	<i>On the track</i>
8	Angka kemiskinan	%	17,97	12,25	14,75	79,59	<i>On the track</i>
9	Laju Investasi	%	8,28	13,5	39,90	295,56	Melampaui
10	Pertumbuhan PAD	%	13,66	7,64	-1,43	-18,72	Belum memenuhi target
11	Kunjungan Wisatawan	Org	1.357.602	4.000.000	2.812.379	70,31	<i>On the track</i>
	- Mancanegara	Org	565.944	2.000.000	1.204.556	60,23	<i>On the track</i>
	- Nusantara	Org	791.658	2.000.000	1.607.823	80,39	<i>On the track</i>
12	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	1,58	2,42	22,42	926,45	Melampaui

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2018

Dari 12 indikator untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat, terdapat 8 indikator tercapai atau mencapai 66,67%, sedangkan 4 indikator 33,33% belum tercapai. Adapun indikator yang belum tercapai meliputi pertumbuhan ekonomi non tambang, angka kemiskinan, pertumbuhan PAD, dan angka kunjungan wisatawan. Indikator yang belum tercapai tersebut termasuk yang terkena dampak langsung bencana gempa bumi.

B. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan bagian dari pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah. Indikator kinerja pada Aspek Pelayanan Umum diukur melalui 7 indikator, dengan tingkat capaian sampai dengan tahun 2018 mencapai 100%. Dengan demikian seluruh indikator pada aspek ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun tingkat capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Periode RPJMD ke-3 Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Kondisi Kinerja Akhir 2018			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Ket
1	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100,00	Sesuai

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Kondisi Kinerja Akhir 2018			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Ket
2	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB Online	Kali	4.653	160.000	549.047	343,15	Melampaui
3	Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	83,65	83,65	100,00	Sesuai
4	Ratio Elektrifikasi	%	64,43	75	93,83	125,11	Melampaui
5	Cakupan Air Bersih						
	- Perkotaan	%	80,23	87,56	92,66	105,82	Melampaui
	- Perdesaan	%	72,15	81,87	82,49	100,76	Melampaui
6	Penanganan Rumah Tidak layak huni	Unit	21.471	26.471	27.530	104,00	Melampaui
7	Cakupan Jamban Keluarga	%	72,15	80	85,94	107,43	Melampaui

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2018

C. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 12 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Periode RPJMD ke-3 Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Kondisi Kinerja Akhir 2018			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Ket
1	Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun keatas	Tahun	6,54	6,95	7,03	101,15	Melampaui
2	Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas	%	15,33	10	12,58	74,20	<i>On the track</i>
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	64,74	67,7	65,87	97,30	<i>On the track</i>
4	Prevalensi Kurang Gizi	%	18,27	15	26,4	24,00	Belum memenuhi target
5	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,52	21	20,23	96,33	<i>On the track</i>
6	Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah	%	10	75	100	133,33	Melampaui
7	Pranata Adat yang Terbentuk	Lembaga	10	260	321	123,46	Melampaui
8	Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah						
	- Desain Industri	Produk	37	112	127	113,39	Melampaui
	- Merek	Produk	42	142	238	167,61	Melampaui
	- Hak Cipta	Produk	18	93	98	105,38	Melampaui

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Kondisi Kinerja Akhir 2018			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Ket
9	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	58,84	100	100	100,00	Sesuai
10	Jumlah penumpang angkutan udara dan laut						
	- Angkutan udara	org	2.145.290	3.626.000	4.205.496	115,98	Melampaui
	- Angkutan laut	org	125.794	227.502	950.088	417,62	Melampaui
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		67,77	67,95	75,16	110,61	Melampaui
12	Mata Air Terlindungi	Titik	334	438	527	120,32	Melampaui

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2018

Dari 12 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 8 indikator tercapai atau mencapai 66,67%, sedangkan 4 indikator atau 33,33% belum tercapai yaitu indikator Usia Harapan Hidup, Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas, Prevalensi Kurang Gizi, dan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan.

Pada periode tahun 2013-2018 telah berhasil menorehkan berbagai inovasi yang mendorong percepatan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, yang tidak hanya membanggakan masyarakat NTB, namun juga membanggakan Indonesia dalam skala Internasional, dan mendapatkan apresiasi publik yang cukup luas. Implementasi inovasi “*One Service - One Inovation*” menghantarkan pada kemajuan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan mendorong percepatan pembangunan di daerah. Kemajuan yang dicapai selama tahun 2013-2018 melompat cukup signifikan dibanding periode-periode sebelumnya. Kemajuan ini diraih berkat perpaduan sejumlah terobosan dan inovasi yang cerdas dan rasional, serta sinergitas yang kuat antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini membuktikan Provinsi NTB mampu bersaing dengan provinsi lain untuk menjadi yang terbaik dan menjadikan posisi strategis Provinsi NTB sebagai tempat *best practice* bagi Provinsi/Daerah lain.

Pengembangan daya saing daerah merupakan agenda penting dalam menghadapi kompetisi antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Melalui inovasi dan inisiatif lokal dalam pembangunan secara komprehensif serta terbangunnya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah adalah salah satu strategi dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Sistem inovasi meliputi

hubungan antar unsur produksi, jejaring kelembagaan dan kelompok organisasi. Inovasi dan inisiatif yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah NTB selama 5 (lima) tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Temukan Arsip Dalam 3 Menit

Pada Tahun 2016, Pelayanan Data dan Informasi Kearsipan melalui inovasi “Temukan Arsip Dalam 3 Menit” berhasil masuk menjadi Top Inovasi dengan kategori inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inovasi sederhana ini dengan melakukan langkah-langkah:

- Arsip dimasukkan ke dalam box arsip dan diberi stiker warna tertentu untuk menentukan siapa atau unit kerja mana pemilik arsip;
- Box arsip ditempatkan pada rak arsip yang telah diberi nomor tertentu;
- Menyusun Buku Daftar Pencarian Arsip sesuai kelompok pemilik arsip;
- Membuat aplikasi e-arsip.entebe.

2. e-SAMSAT

e-Samsat adalah alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja), dan Pengesahan STNK tahunan secara elektronik melalui *channel* PT. Bank NTB (ATM, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*). Untuk pengesahan secara elektronik dan pengambilan STNK asli dapat ditukarkan dengan struk ATM tersebut ke kantor-kantor Samsat. Melalui e-samsat pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan lebih cepat, aman, sederhana dan efisien karena wajib pajak cukup melakukan pembayaran di ATM terdekat.

3. Aplikasi Pendapatan dan Pelaporan Kendaraan Luar Daerah secara Online

Dikembangkan dalam rangka memudahkan pihak terkait untuk memonitor kendaraan luar daerah yang masuk ke NTB yang melewati batas tenggang untuk melakukan mutasi.

4. Penerapan Standar ISO pada pelayanan samsat

Peningkatan mutu pelayanan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dapat dirasakan oleh masyarakat, hal ini dilakukan melalui :

- Penambahan jam kerja pelayanan pada semua UPPD, untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat melakukan pembayaran di luar jam kerja.

- Perluasan pelayanan di semua UPPD, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat melakukan transaksi pembayaran di tempat yang mudah dicapai dan berorientasi ditempat/ dititik keramaian.
- Pelaporan pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain dari SKPD secara online, sebagai bentuk layanan internal pemerintah untuk memudahkan dalam mengkoordinasikan pendapatan daerah di semua organisasi perangkat daerah.
- Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Samsat, untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan guna melakukan perbaikan layanan.

5. Agen Samsat dan Samsat Gendong

- Agen Samsat :

Bertugas melakukan pendataan kendaraan bermotor dan melakukan penagihan tunggakan (TMDU) kendaraan bermotor.

- Samsat Gendong

Untuk menjangkau daerah yang tidak terjangkau pelayanan samsat induk maupun samsat keliling. Samsat gendong melayani pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) setiap tahun, pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Petugas samsat gendong adalah satu orang dari Polri dan satu petugas samsat, membuka stand seperti di Balai RW dan sebagainya.

6. Aplikasi Web GIS

Aplikasi Database perlengkapan jalan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk memantau dan menganalisa perlengkapan jalan yang ada di Provinsi NTB sehingga dapat direncanakan pembangunan perlengkapan jalan yang berkelanjutan. Aplikasi ini dibuat dalam rangka mensukseskan program *e-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasiskan teknologi. Adanya Web GIS ini, dapat direncanakan daerah mana yang membutuhkan dan harus dibangun suatu perlengkapan jalan. Dengan pembangunan terencana inilah dapat ditentukan tahapan pembangunan secara tertib berdasarkan prioritas sesuai dukungan anggaran yang tersedia.

7. Arsip Digital di Tangan (NTB in My Hand)

Pengembangan inovasi arsip terbaru melalui “Program Arsip Digital di Tangan” (NTB *in My Hand*) merupakan inovasi pencari arsip dapat menemukan arsip dalam

waktu kurang dari 1 menit, serta pembangunan “Diorama Pembangunan Arsip Gubernur NTB” secara bertahap.

8. Aplikasi Perijinan

Pemohon dapat melakukan akses secara online baik mengenai persyaratan sesuai standar operasional pelayanan minimal maupun besarnya biaya pengurusan ijin.

9. Aplikasi Masalah Potensi

Potensi investasi dibuat secara elektronik memudahkan para investor untuk mengakses potensi NTB dalam semua sektor sekaligus sebagai sarana promosi potensi investasi daerah secara online.

10. Sistem Database Perikanan Karang Online

Sistem dapat diakses sebagai acuan pengambilan kebijakan pengelolaan perikanan dan Pemrosesan data menggunakan aplikasi berbasis android dan internet sehingga data yang terkumpul di lapangan dapat diketahui secara *real time* oleh pengguna data.

11. Sistem Deposit Sampah Di Gunung Rinjani

Semakin meningkatnya jumlah pengunjung disertai dengan penumpukan sampah yang terkonsentrasi di Pos Peristirahatan, Pelawangan dan Danau Segara Anak. Cara efektif yang dilakukan dalam pengelolaan sampah hasil aktivitas wisata di Gunung Rinjani melalui penerapan Sistem Deposit Sampah dimana pengunjung menyimpan sejumlah uang yang telah ditentukan kepada petugas pengelola (berdasarkan banyaknya potensi sampah yang dibawa dalam pendakian) sebagai jaminan bahwa pengunjung akan mengembalikan alat yang dipinjamkan kontainer berupa tas dan kotak sampah guna pemilahan sampah daur ulang beserta sampah hasil dari aktivitas wisata alam tersebut. Penerapan inovasi ini berimplikasi positif terhadap penghasilan para porter dan keluarganya dan sebagai sentra pengelolaan sampah Rinjani dan sampah rumah tangga di sekitar kawasan Rinjani.

12. Kawasan Agroeduwisata

Kawasan Agroeduwisata mengoptimalkan fungsi lahan sebagai basis pengembangan dan penerapan teknologi berbasis peternakan dalam mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat baik lokal, regional dan nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagai

sarana pelatihan/pendidikan, meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk PIJAR sebagai komoditi unggulan daerah dan mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi kepada masyarakat dalam usaha budidaya dan pengolahan hasil.

13. Panen Pedet

Panen Pedet merupakan program peningkatan produksi dan produktifitas ternak, pelayanan kesehatan hewan secara menyeluruh dan penerapan teknologi kawin suntik melalui Inseminasi Buatan, disamping peningkatan manajemen usaha perbibitan secara berkelompok melalui pendekatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Sebagai wujud pengembangan kelompok dalam kawasan SPR, panen pedet merupakan apresiasi terhadap peternak dan kelompok ternak sapi dalam keberhasilan mengembangkan usaha perbibitan dan peternakan rakyat, baik usaha perbibitan mandiri maupun kelompok perbibitan yang didukung dan difasilitasi melalui kegiatan distribusi ternak indukan, bantuan pakan berkualitas dan sarana prasarana pendukung, disamping hal tersebut, peningkatan SDM kelompok termasuk pelatihan-pelatihan manajemen, pengolahan pakan sudah dilaksanakan dengan baik. Pada prinsipnya, pengembangan usaha peternakan rakyat diarahkan dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas ternak, pelayanan kesehatan hewan secara terkoordinir sehingga akan memperkuat daerah NTB sebagai gudang ternak bibit dan potong secara Nasional bagi daerah lain.

14. Kampung Unggas

Ternak unggas (ayam dan itik) memegang peranan penting dalam penyediaan protein hewani yang murah dan mudah didapat serta mendukung perekonomian masyarakat. Provinsi NTB memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan perunggasan, hal ini terlihat dari besarnya jumlah rumah tangga peternak khususnya yang memelihara ternak unggas (ayam dan itik). Untuk merespon peningkatan kebutuhan telur dan daging unggas lokal (bebek dan ayam kampung) seiring dengan meningkatnya popularitas dan penggemar kuliner (ayam taliwang, ayam puyung, dan lain-lain) untuk itu telah dibentuk Kampung Unggas yang diinisiasi di Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sebagai usaha yang berbasiskan pengembangan ayam lokal, dan kemudian telah direplikasi pada kabupaten lain yaitu pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi sumber bahan

baku pakan dalam memenuhi kebutuhan pakan sehingga akan mengurangi input biaya produksi yang dikeluarkan oleh kelompok masyarakat peternak unggas.

15. eNTeBeNOVIK

NTB Inovasi Pelayanan Publik

Kebijakan Gubernur NTB yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat minimal satu inovasi, menjadi pemicu semangat Perangkat Daerah untuk berkeaktifitas dan melakukan berbagai terobosan dalam memberikan pelayanan publik. Inovasi yang dilakukan terkait pelayanan langsung maupun tidak langsung berupa proses, administrasi, sistem hingga konsep perubahan dalam pelayanan publik.

Tujuan pengembangan NTB Inovasi Pelayanan Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengangkat kesejahteraan masyarakat NTB, mengangkat Provinsi NTB menjadi Provinsi yang inovatif berprestasi di kancan nasional bahkan Internasional dan memberikan penghargaan kepada para Inovator Top Inovasi dari Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Target pelaksanaan NTB Inovasi Pelayanan Publik adalah setiap perangkat daerah memiliki minimal satu Inovasi Pelayanan Publik, kuantitas dan kualitas Inovasi meningkat, serta peraih TOP SINOVIK meningkat.

16. Percepatan Pelayanan Produk Hukum Daerah

Percepatan Pelayanan Produk Hukum Daerah merupakan amanah yang harus dikedepankan dalam mengatasi akumulasi multi era yaitu era otonomi, era reformasi, era globalisasi dan teknologi informasi, mulai dari perencanaan hukum (*Legislation Planning*), proses pembuatan hukum (*Law Making Process*), penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum (*Law Awareness*) masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan, dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Tujuan Percepatan Pelayanan Produk Hukum Daerah memberikan pelayanan administrasi pembentukan/penyusunan produk hukum yang cepat, tepat dan akurat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan.

17. eNTeBeplan

Perencanaan Berbasis Elektronik Online

Di dalam komitmen pemberantasan korupsi, terdapat sepuluh komitmen yang ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi program, mulai dari proses perencanaan penganggaran yang mengakomodasikan kepentingan publik, proses pengadaan barang jasa berbasis elektronik, pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan, pengawasan internal pemerintah, pembentukan komite integritas pengendalian gratifikasi dan LHKPN, pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen lainnya perbaikan pengembangan SDM, penerapan tunjangan perbaikan penghasilan, perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi PAD, tata kelola dana desa yang efektif efisien dan akuntabel, serta membangun sinergi dan partisipasi masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

eNTeBeplan sebagai inovasi merupakan salah satu tindak lanjut dari penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya dan ikhtiar Pemerintah Daerah untuk membenahan perencanaan dan tata kelola keuangan daerah kearah yang lebih baik dan transparan, agar terhindar dari praktek-praktek yang kurang terhormat.

Tujuan pengembangan eNTeBeplan adalah menyusun dokumen perencanaan yang bersih dari intervensi kepentingan, menjaga konsistensi antar dokumen semakin baik, perencanaan berorientasi pada sasaran, tidak adanya duplikasi program, kegiatan, kejelasan struktur kinerja, tidak terdapat kesalahan penganggaran, dan APIP mampu melakukan pengawasan dari tahapan perencanaan.

Pengembangan eNTeBeplan diharapkan dapat menjaga konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam keseluruhan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RPJMD sampai APBD yang tepat waktu, melalui pengembangan 7 jenis aplikasi terintegrasi meliputi:

- a. e-RPJMD, untuk memfasilitasi perwujudan visi, misi gubernur terpilih dalam menjalankan kebijakan pembangunan.
- b. e-Renja, untuk memfasilitasi dan memastikan adanya sinergi antara perencanaan jangka menengah dengan rencana tahunan yang dikelola oleh SKPD.
- c. e-Musrenbang, untuk memfasilitasi proses perencanaan yang partisipatif.

- d. e-ASB, untuk memfasilitasi agar setiap anggaran yang direncanakan dapat ditetapkan secara lebih efektif dan efisien dan terstandar.
- e. e-Pokir, untuk memfasilitasi aspirasi dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
- f. e-RKPD, untuk memfasilitasi penyusunan perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
- g. e-KUA-PPAS, untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan makro pembangunan daerah yang ditetapkan setiap tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

18. e-Katalog Lokal

e-Katalog Lokal merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa dari berbagai penyedia, untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah. Penerapan e-Katalog Lokal melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah dalam proses katalogisasi produk-produk di daerah, termasuk produk-produk UMKM yang terstandar dan dapat dikatalogkan.

Pengembangan e-Katalog lokal di Provinsi NTB mendapatkan perlindungan *political will* yang kuat dari Pimpinan Daerah, inovasi ini berhasil mempercepat proses pengadaan, mendorong terbentuknya harga pasar yang lebih kompetitif, serta meminimalisasi disparitas harga akibat biaya pengiriman. e-Katalog lokal telah memacu tumbuh kembang iklim usaha dan memperkuat basis pasar pengadaan barang/jasa di daerah secara berkesinambungan.

19. Sistem Aplikasi Arsip

Temukan Arsip dalam Hitungan 3 Detik

Sebagai informasi yang terekam, arsip menyimpan berbagai informasi penting tentang memori kolektif bangsa dan daerah yang dapat dijadikan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kepada generasi yang akan datang. Pada era perkembangan informasi yang pesat ini, keberadaan arsip dapat mengikuti perkembangan zaman, dan memberikan manfaat optimal bagi Pemerintah Provinsi NTB.

Sistem aplikasi arsip telah memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan arsip lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Dengan sistem ini *image* mencari arsip yang sulit dan waktu yang lama, kini telah hilang. Saat ini mencari arsip hanya membutuhkan waktu dalam hitungan 3 detik.

Penggunaan Sistem Aplikasi Arsip telah mempermudah melaksanakan kegiatan akuisisi arsip dan menata berbagai jenis arsip secara tersistem termasuk memeliharanya. Dengan aplikasi arsip telah berhasil diakuisisi sebanyak 8.000 arsip untuk dokumen tahun 2015. Begitu juga dokumen arsip tahun 2016 sebanyak 15.000 arsip, dan tahun 2017 sebanyak 40.000 arsip.

20. URC (Unit Reaksi Cepat)

Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa

Pemerintah Provinsi NTB telah mengimplementasikan inovasi Unit Reaksi Cepat (URC) dalam pemeliharaan jalan di Pulau Sumbawa. Penerapan URC dihayatkan untuk pencegahan, perawatan dan perbaikan serta mempertahankan kondisi jalan agar tetap optimal. URC terus bekerja sepanjang tahun melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai kondisi kerusakan jalan. Upaya ini dilaksanakan untuk mewujudkan responsivitas Pemerintah Daerah dalam menanggapi segala bentuk keluhan masyarakat.

21. Program Percepatan Penurunan Kemiskinan (P2PK)

Menurunkan angka kemiskinan merupakan ikhtiar menata dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara eksplisit disebutkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Rumusan ini memberikan kepastian kepada Pemerintah Provinsi NTB bahwa percepatan penurunan angka kemiskinan di Desa, dan menjadikan desa sebagai arena utama melawan kemiskinan adalah cara baru dalam percepatan penurunan kemiskinan.

22. Digitalisasi

Foto, video/film dan naskah merupakan salah satu jenis *recorded information* (informasi terekam), yang dapat dijadikan *memory collective* dan dijadikan *memory corporate* Daerah NTB sekaligus *memory collective* bangsa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah membawa perubahan pada cara penataan dan penanganan arsip foto, video/film dan arsip naskah dari konvensional menjadi

digital atau elektronik file. Penanganan arsip secara digital/sistem elektronik file (*Electronic Filing System*) merupakan model pengelolaan kearsipan yang dikembangkan terhadap dokumen-dokumen yang saat ini ditangani untuk disimpan dalam *hard disk* atau *optical disk*.

23. Gempita Kreatif

Gerakan Membangun Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup Secara Kolaboratif dan Partisipatif.

Inovasi Gempita Kreatif adalah salah satu gerakan holistik integratif membangun pengelolaan hutan dan lingkungan hidup secara kolaboratif dan partisipatif. Inovasi ini diwujudkan sebagai lokomotif untuk mendorong akselerasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, baik dari sisi tata kelola, rehabilitasi, perlindungan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, sehingga mampu menjaga fungsi pokoknya meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Gempita Kreatif diikhtiarkan untuk mempercepat pencapaian program bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup diantaranya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, potensi sumber daya, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

24. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Berbasis Komoditas Cabe Terintegrasi Unggas (TANCAB GAS) Melalui Hatinya PKK"

Kawasan Rumah Pangan Lestari berbasis Komoditas Cabe Terintegrasi Unggas (TANCAB GAS) Melalui Hatinya PKK adalah bagian dari program pengembangan model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan (dusun, desa, kecamatan) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat.

Inovasi TANCAB GAS yang dilakukan melalui Hatinya PKK merupakan cara strategis pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling

berdekatan. Dengan demikian akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari optimalisasi pekarangan.

25. Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Struktural dan Edukasi Menuju Pendewasaan Usia Pernikahan

Komitmen Pemerintah Provinsi NTB mendukung pendewasaan usia pernikahan terus diperkuat. Berbagai terobosan serta inovasi terus dilakukan, salah satunya melalui pendidikan pranikah yang diikhtiarkan sebagai upaya struktural dan edukasi menuju pendewasaan usia pernikahan dan peningkatan kualitas tumbuh kembang anak. Pendidikan pranikah menjadi *trigger* untuk mensukseskan pendewasaan usia perkawinan di NTB. Pelaksanaan program ini terintegrasi dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKKBN, Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh adat serta LSM.

Pendewasaan usia perkawinan ditempuh melalui pendewasaan ilmu, ekonomi dan sosial. Memberikan penguatan pengetahuan, mental/psikologi, keterampilan, dan dukungan sosial kepada anak-anak remaja pra nikah usia di bawah 21 tahun sehingga mereka siap untuk membina rumah tangga dan membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas.

26. Penguatan BUMDesa dan Pasar Desa Percontohan

Komitmen penguatan ekonomi masyarakat di Desa terus diperkuat oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam bentuk mengembangkan BUMDesa dan Pasar Desa Percontohan, ikhtiar mengangkat perekonomian masyarakat desa. Untuk percepatan pencapaian, telah ditetapkan 1 (satu) BUMDesa dan 1 (satu) pasar desa di masing-masing Kabupaten sebagai percontohan.

27. Posyandu Keluarga

Posyandu Keluarga merupakan terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan keluarga melalui kegiatan rutin bulanan, dengan cakupan program utama yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi dan Diare, dan integrasi program lintas sektor yaitu kelas remaja, penyuluhan kesehatan reproduksi remaja/Pendewasaan Usia Perkawinan, program keluarga sakinah, ketahanan pangan, dan Da'i Kesehatan. Sasaran Program dan kegiatan Posyandu Keluarga adalah ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, bayi dan anak balita (0-59 bulan), remaja laki/perempuan (anak SMP dan SMA), Pasangan Usia Subur (PUS), dan Lanjut Usia (Lansia).

Tujuan Posyandu Keluarga untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif dan terintegrasi, meningkatkan kinerja pelayanan dalam memantau tumbuh kembang anak, kesehatan ibu hamil, nifas, menyusui dalam rangka meningkatkan status gizi balita serta menurunkan AKI dan AKB, meningkatkan status kesehatan remaja dan meningkatkan status kesehatan lanjut usia agar sehat, mandiri dan produktif.

28. PAK GURU

Pelayanan Aduan dan Keluhan Bagi Guru

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini berimplikasi pada kelembagaan dan sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana dan pendanaan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun 2017, jumlah tenaga pendidik 5.604 orang, tenaga kependidikan termasuk pegawai non guru pada Dinas, UPT dan Sekolah 1.204 orang, dan tenaga pengawas sekolah 193 orang tersebar pada 257 Sekolah Negeri SMA, SMK, SLB Negeri di Kabupaten/Kota se NTB.

Mengingat sumber daya manusia tenaga pendidik, tenaga kependidikan cukup banyak, dan dalam rangka keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan Inovasi Pak Guru. Inovasi berbasis Website online dengan situs <http://dikbud.ntbprov.go.id/>. Pengaduan ini dibangun sebagai sarana fasilitasi layanan aduan/aspirasi/keluhan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terkait pembiayaan, pelayanan publik, dan aduan lainnya yang berkenaan dengan proses pendidikan, baik di sekolah maupun pada instansi pendidikan. Semua jenis aduan tersebut akan mendapatkan *feedback* secara cepat dan tepat.

Inovasi PAK GURU mendapat penghargaan Top 10 Inovasi 2017 dan masuk ke dalam TOP 15 Inovasi terbaik di Provinsi NTB. Tujuan Inovasi Pengaduan Online PAK GURU adalah:

- a. Memberikan kemudahan dan kenyamanan pada layanan berbasis TIK agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dalam dunia pendidikan.

- b. Kemudahan dalam memantau pelaksanaan dan penerapan pendidikan di Provinsi NTB berdasarkan keluhan dan aduan serta masukan dari masyarakat/guru.
- c. Memberikan ruang interaksi bagi masyarakat/guru dalam menyampaikan masukan atau aduan terkait pelaksanaan pendidikan.
- d. Memberikan solusi cepat atas setiap permasalahan pendidikan.

29. BLUD PENGELOLAAN DANA BERGULIR KUMKM

Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM merupakan terobosan untuk penyempurnaan mekanisme pinjaman dana bergulir dalam penguatan modal KUMKM NTB yang bermitra dengan Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI. Penerapan pola BLUD selain mendorong percepatan peningkatan dan pengembangan KUMKM di Provinsi NTB juga sebagai ikhtiar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, juga untuk memenuhi kebutuhan modal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui mekanisme pinjaman dana bergulir yang efektif. Disamping itu memudahkan akses terhadap permodalan melalui mekanisme pinjaman dana bergulir APBD dengan pola investasi non permanen.

Pembentukan BLUD Perkuatan Modal KUMKM memberikan solusi pembiayaan bagi masyarakat kecil. BLUD Dana Bergulir sangat strategis dan diperlukan untuk membantu pengembangan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan atau permodalan yang fleksibel, cepat, murah dan mudah diperoleh dengan bunga rendah. Tujuan pengelolaan dana bergulir berbasis BLUD KUMKM adalah:

- 2.2.V.1.1 Membantu pengelolaan Dana Bergulir Usaha guna pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi daerah dan nasional.
- 2.2.V.1.2 Mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tidak memenuhi persyaratan perbankan melalui pola dana bergulir dalam bentuk pinjaman lunak (*soft loan*) melalui APBD Provinsi NTB.
- 2.2.V.1.3 Memberikan layanan pembiayaan secara mandiri bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

30. KAWASAN DESA BEBAS RIBA.

Inovasi Kawasan Desa Bebas Riba dilaksanakan pada Kabupaten/Kota se NTB merupakan bagian dari program pembentukan 500 koperasi syariah. Inovasi ini dimaksudkan untuk memacu dan memotivasi koperasi yang berbasis syariah dalam pemberdayaan dan pengembangan kawasan bebas riba. Pengembangan program didukung berbagai fakta lapangan seperti NTB sebagai Provinsi Seribu Masjid, 95 persen penduduk mayoritas muslim dan religius, terdapat sekitar 711 pondok pesantren, jumlah UMKM mencapai 541.246 dan 86 persen pengusaha mikro adalah muslim. Fakta ini menjadi potensi pasar potensial bagi pengembangan koperasi simpan-pinjam dan pembiayaan syariah.

Tiga Desa Bebas Riba yang dibentuk tahun 2017 menjadi percontohan telah memiliki koperasi berbasis syariah yang menjadi embrio penguat, yaitu Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur telah terbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nur Hayyu Ambara, Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, terdapat Koperasi Tani Syariah Bina Usaha, dan Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, telah dibangun sejumlah koperasi dan pondok pesantren.

Pemerintah Provinsi NTB telah membantu pembentukan dan memfasilitasi pelatihan sumber daya manusia untuk pengembangan kawasan bebas riba dan penguatan kelembagaan koperasi syariah. Jumlah koperasi syariah yang sudah terbentuk sebanyak 225 dari target 500 koperasi syariah hingga 2018.

31. I - SHOP NTB (*Integrated Shop* NTB)

I-shop adalah situs baru dalam dunia jual beli online di NTB, melalui situs ini dapat melakukan kontak personal yang menghubungkan antara pembeli dengan penjual. Transaksi menggunakan alamat email dari masing-masing usaha kecil menengah (IKM). Dengan I-shop Pemerintah Provinsi NTB atau masyarakat tahu perkembangan transaksi yang sudah terjadi. Kontak personal berupa alamat email hanya akan menggunakan alamat I-shop. Setelah masuk, pembeli (*buyer*) akan dihubungkan dengan pemilik produk yang akan dibeli. Dengan I-SHOP NTB dapat menjembatani pihak produsen dan pembeli dari mulai afirmasi, konfirmasi, memberi notifikasi, mengurus pembayaran sampai pada penyerahan kepada pihak Kantor Pos.

32. Pelor Mas

Peloppor Online Transportasi Oleh Masyarakat

Masalah konektivitas, aksesibilitas, keselamatan transportasi darat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB. Tahun 2017 terjadi 1.458 kejadian kecelakaan lalu lintas, dengan korban jiwa 469 orang. Untuk menekan angka kecelakaan tersebut telah dilakukan pemasangan, pengadaan, pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu, marka jalan, *warning light*, *traffic light* ataupun *guardrail* yang berfungsi untuk mengatur, merekayasa dan manajemen arus lalu lintas sehingga diharapkan bisa mengurangi tingkat kecelakaan.

Tahun 2017 melalui FLLAJ telah diluncurkan sebuah inovasi berupa aplikasi di smartphone berbasis Android dengan nama PELOR MAS atau Pelaporan Online Transportasi Berbasis Masyarakat, yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Melalui Inovasi Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan dan pengaduannya dan dapat mengetahui tindak lanjut dari keluhannya. Inovasi Pelor Mas ini masuk dalam top 10 inovasi pelayanan publik (eNTeBe Novik) 2017 tingkat provinsi NTB yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi NTB. Atas kesuksesan dari program-program yang dibuat FLLAJ NTB dijadikan sebagai Forum LLAJ percontohan Nasional.

33. SiMadu (Sistem Informasi Manajemen ASN Terpadu) dan SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Penataan)

Aplikasi pengalihan media dan tata naskah kepegawaian "Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SiMadu) dan Sistem Informasi Manajemen Penataan ASN (SIMATA) adalah aplikasi data kepegawaian berbasis online. Penerapan Aplikasi Pengelolaan Alih Media Tata Naskah Kepegawaian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS.

BKD sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan arsip kepegawaian, terus berupaya mengikuti perkembangan dan dinamika teknologi informasi, salah satunya melalui pengembangan tata kelola naskah kepegawaian berbasis elektronik yang disebut Sistem Informasi Manajemen ASN Terpadu (SiMADU) dan Sistem Informasi Manajemen Penataan ASN (SIMATA). SiMADU merupakan integrasi data seluruh kepegawaian baik masalah e-cuti, e-

kenaikan pangkat, e-absen yang dirancang sedemikian rupa, sehingga semua ASN akan bertanggung jawab atas data mereka sendiri, karena mereka menjadi admin langsung dalam mengakses data tersebut. SiMADU berintegrasi dengan SIMATA dalam urusan layanan kepegawaian.

34. POKMASWAS Perikanan

Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan merupakan mitra Pemerintah Provinsi NTB dalam pengelolaan Kawasan Konservasi. Pokmaswas didirikan sebagai aktualisasi partisipasi dan peran serta aktif masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelestarian, serta menjaga kelestarian wilayah sesuai bentuk dan bimbingan Pemerintah Daerah serta aparat keamanan laut, dalam melaksanakan tugas: pertama, kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan di beberapa wilayah pantai di NTB. Kedua, memantau kegiatan perikanan. Ketiga, mengawasi dan mencatat adanya dugaan tindak pidana perikanan, kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat. Kelima, mendorong pelaku kegiatan perikanan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan.

Tujuan Pokmaswas adalah meningkatkan peran serta stakeholders dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dan menciptakan unit usaha ekonomi Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas) Perikanan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, serta meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) perikanan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

35. SiMANTRA NTB (Sistem Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data Pemerintah Provinsi NTB)

Teknologi jaringan internet telah berkembang pesat dan setiap organisasi perangkat daerah telah memiliki akses internet sehingga dapat saling berkomunikasi melalui berbagai macam aplikasi layanan internet (*browsing, email, chating*). Perkembangan teknologi pemrograman komputer telah menyediakan teknologi layanan antar muka program aplikasi (*Aplication Program Interface – API Service*) yang memungkinkan setiap aplikasi dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara efektif dan efisien.

Membangun sistem elektronik yang menyediakan dan mengelola berbagai macam antar muka program aplikasi, yang dapat dimanfaatkan oleh setiap aplikasi

untuk saling berbagai pakai data dan informasi. Sistem elektronik yang dibangun dapat menggunakan akses jaringan internet yang telah ada untuk saling terhubung dengan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah, sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar untuk membangun jaringan komputer tersendiri.

Tujuannya SiMANTRA NTB adalah menyediakan layanan aplikasi yang memungkinkan integrasi informasi dan berbagi pakai data antar aplikasi atau sistem elektronik yang dimiliki organisasi perangkat daerah. Manfaat yang dapat diperoleh dari inovasi ini adalah:

- a. Mengurangi redudansi dan inefisiensi dalam pengelolaan data pada berbagai aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan oleh perangkat daerah.
- b. Menghasilkan data dan informasi yang berkualitas melalui verifikasi dan validasi otomatis oleh sistem elektronik OPD yang berwenang.
- c. Memungkinkan membangun aplikasi sistem informasi eksekutif atau strategis yang pengumpulan dan pengelolaan data dan informasinya beragam dari berbagai perangkat daerah.

36. SIPEPADU

Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu

SIPEPADU merupakan salah satu sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Perangkat Daerah Provinsi NTB terkait yang kewenangan perizinan dan non perizinannya telah dilimpahkan kepada DPMPTSP. SIPEPADU dilaksanakan sebagai implementasi dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, sederhana dan biaya murah bagi pengguna layanan jasa khususnya terkait pelayanan perizinan dan non perizinan dan pelayanan informasi penanaman modal (potensi daerah) maupun informasi lainnya. Layanan SIPEPADU dapat di akses melalui website <http://www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id> dan smartphone berbasis Android dan iPhone dengan *keyword* PERIZINAN DPMPTSP NTB. Aplikasi SIPEPADU bertujuan:

- Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, tepat sederhana, biaya murah, transparan dan akuntabel.
- Integrasi data dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Informasi publik.

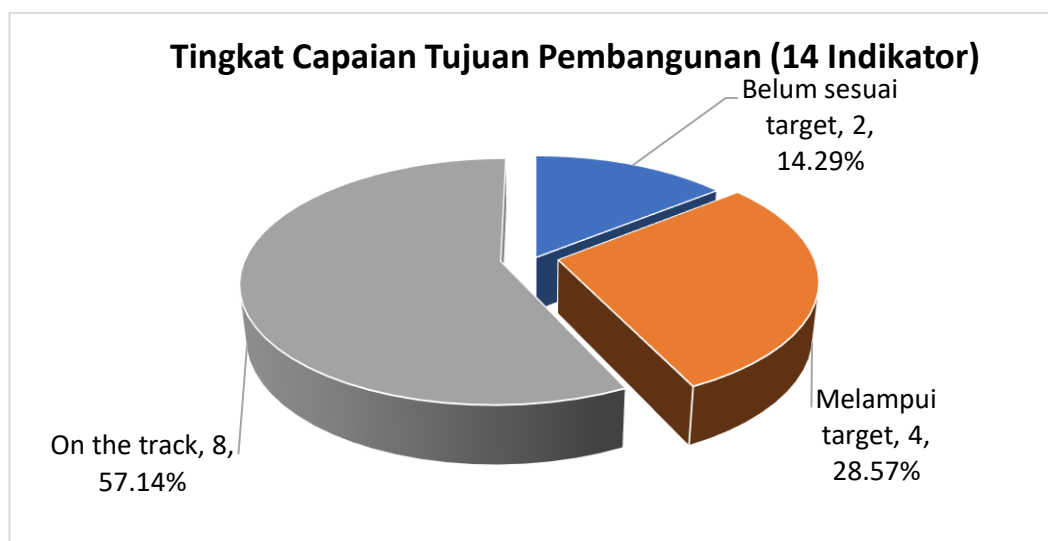
37. SIMAKSA

Dinas Sosial Provinsi NTB telah membangun sebuah pendekatan pendataan melalui Sistem Informasi Masalah Kesejahteraan Sosial (SIMAKSA) yang fokus pada analisis penanganan masalah kesejahteraan. SIMAKSA mencakup komponen pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial termasuk didalamnya terkait dengan sasaran penerima bantuan yang menyasar PMKS. Dalam pengelolaannya, data PMKS diproses dengan prinsip spesifik, memadai, relevan, akurat, terbaru, akuntabel serta tidak disalahgunakan.

SIMAKSA dapat meminimalisir penyaluran bantuan PMKS yang salah sasaran, dan memudahkan pendataan penerima bantuan PMKS yang terverifikasi dan valid karena pijakannya pada Basis data *by name by address* yang "bekerja/updating dalam SIMAKSA".

IV. Tahap IV RPJMD periode 2019-2023

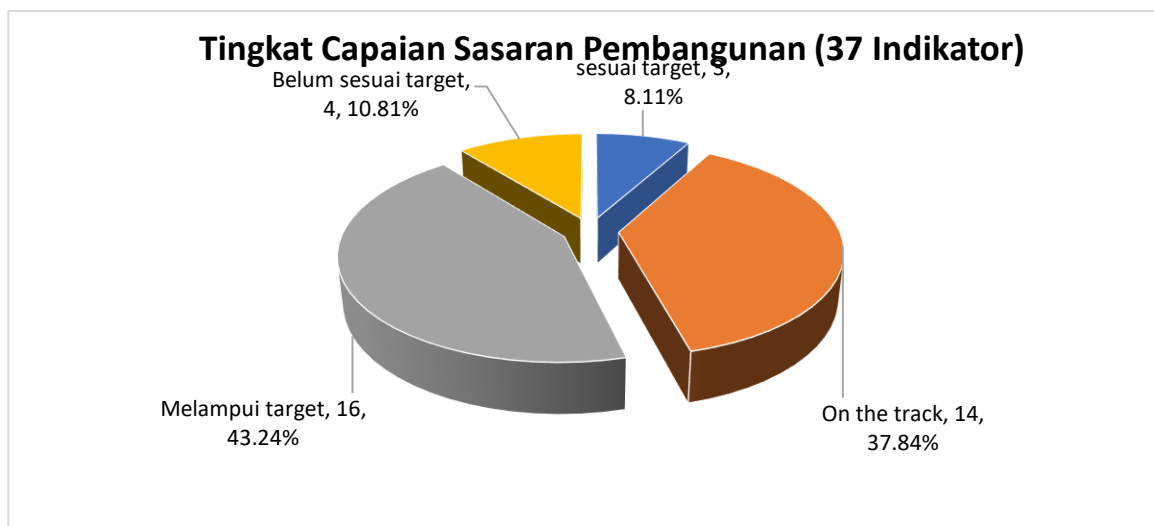
Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, pencapaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Tingkat Capaian Tujuan Pembangunan pada Periode RPJMD ke-4

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, dari 6 Misi pembangunan, terdapat 10 (sepuluh) tujuan pembangunan dengan 13 indikator kinerja daerah. Sampai dengan

tahun 2022 terdapat 4 tujuan pembangunan daerah yang telah memenuhi bahkan melampaui target akhir pembangunan pada tahun 2023, 5 tujuan dengan capaian on the track dengan tingkat capaian diatas 85% dan satu tujuan yang masih rendah pencapaiannya.



Gambar 3. 2 Tingkat Capaian Sasaran Pembangunan pada Periode RPJMD ke-4

Sedangkan berdasarkan sasaran pembangunan, terdapat 26 sasaran dengan 37 indikator kinerja sampai triwulan II tahun 2023, diketahui bahwa terdapat 16 indikator (43,24%) yang sudah memenuhi bahkan melampaui target, 14 indikator (37,84%) on the track dan masih terdapat 4 indikator yang belum sesuai target.

Tabel 3. 12 Pencapaian Indikator Kinerja RPJPD Berdasarkan Sasaran Pembangunan Pada Periode RPJMD KE-4

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2022		Kondisi Akhir (2023)	Tingkat Capaian		Ket
							2017	2018	Target Kinerja	Capaian Kinerja		Thd Target 2022	Thd Kondisi Akhir 2023	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	142,90	139,4	119,41	119,83	115,83	99,65	96,55	On the track
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,53	0,55	0,63	0,72	0,65	114,29	110,77	Melampaui target
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	73,69	74,6	79,84	81,31	81,17	101,84	100,17	Melampaui target
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	85,36	84,52	84,52	84,52	84,52	On the track
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	52,17	54,50	54,50	104,47	100,00	sesuai target
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	73,72	74,76	86,86	92,00	89,14	105,92	103,21	Melampaui target
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	CC	CC	BB	B	BB	95,67	95,67	On the track
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	sesuai target
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	36,97	43,18	38,65	116,80	111,72	Melampaui target
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	BB (76,01 - 80,00)	BB	A (80,01 - 90,00)	100,00	90,95	On the track
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,70	0,64	0,72	91,29	88,75	On the track
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	4,53	3,71	4,55	81,90	81,54	On the track
3						Point	70,08	70,57	72,43	72,42	73,05	99,99	99,14	On the track

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2022		Kondisi Akhir (2023)	Tingkat Capaian		Ket
							2017	2018	Target Kinerja	Capaian Kinerja		Thd Target 2022	Thd Kondisi Akhir 2023	
	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,87	67,08	67,07	67,48	100,00	99,39	On the track
					Persentase Balita Stunting	%	37,20	33,49	30,99	16,84	30,49	145,66	144,77	Melampaui target
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	60,39	60,85	62,74	64,14	63,10	102,24	101,66	Melampaui target
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,47	13,73	13,96	13,79	101,68	101,23	Melampaui target
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	7,03	7,04	7,61	7,07	108,10	107,64	Melampaui target
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	56,99	75,16	68,22	70,56	68,46	103,76	103,07	Melampaui target
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	42,93	43,39	43,03	101,07	100,84	Melampaui target
					Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	87,56	89,30	87,59	101,99	101,95	Melampaui target
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	70,89	89,48	71,48	102,11	125,18	Melampaui target
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	68,70	65,61	69,70	95,50	94,13	On the track
			Neraca pengelolaan sampah			%	-	-	85,00	54,98	100,00	64,68	54,98	Belum sesuai target
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	60,00	42,20	70,00	70,33	60,29	Belum sesuai target
					Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	25,00	12,78	30,00	51,12	42,60	Belum sesuai target
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	69,76	70,99	74,68	72,15	75,56	96,61	95,48	On the track
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	15.428	21.607	68.202	140,05	85,20	On the track
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,71	26,14	23,88	110,25	109,46	Melampaui target

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2022		Kondisi Akhir (2023)	Tingkat Capaian		Ket
							2017	2018	Target Kinerja	Capaian Kinerja		Thd Target 2022	Thd Kondisi Akhir 2023	
	pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Tingkat Kemiskinan				%	15,05	14,63	12,77	13,82	11,92	84,06	84,06	On the track
			Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	sesuai target
			Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	86,70	93,30	87,20	107,61	107,00	107,00	Melampaui target
			Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	-	70,48	78,45	79,11	80,59	100,84	98,16	98,16	On the track
				Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	80,91	81,83	82,46	101,14	99,24	99,24	On the track
				Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	99,88	99,98	99,99	100,10	99,99	99,99	On the track
				Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	65,80	62,30	68,95	94,68	90,36	90,36	On the track
			Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,70	3,16	3,0 - 4,0	6,23	3,0 - 4,0	44,25	44,25	44,25	Belum sesuai target
			Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	11.604	10681,00	11.944	92,05	89,43	89,43	On the track
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	7,27	-4,59	3,00	24,68	4,50	822,67	548,44	Melampaui target
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	112,36	76,13	129,78	282,70	137,24	217,83	205,99	Melampaui target
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	2,00	2,00	7,50	7,40	9,00	98,67	82,22	On the track
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	240,99	56,28	173,02	87,99	179,91	50,86	48,91	Belum sesuai target

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2022		Kondisi Akhir (2023)	Tingkat Capaian		Ket
							2017	2018	Target Kinerja	Capaian Kinerja		Thd Target 2022	Thd Kondisi Akhir 2023	
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,19	2,89	3,17	109,40	91,17	On the track
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	18,05	17,25	14,05	8,77	13,25	137,58	66,19	Belum sesuai target
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	8,70	38,10	20,00	50,00	0,00	150,00	150,00	Melampaui target
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	5,72	22,53	6,07	393,88	371,17	Melampaui target
			Partisipasi politik masyarakat			%	78,44	77,50	84,57	80,00	85,2	94,60	93,90	On the track
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,90	1,26	1,00	140,00	126,00	Melampaui target
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59,95	60,06	61,16	53,12	61,40	86,85	86,51	On the track
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	19,27	27,39	20,47	142,14	133,81	Melampaui target
					Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	0	10	80	70,00	100	87,50	70,00	On the track
Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja (%)												70,27	45,1	
Rata-rata capaian kinerja periode 2013-2018 (%)												122,28	111,60	
Predikat Kinerja (Kategori)												SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	

Berdasarkan data capaian pada periode tahun 2019-2022, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

I. Pencapaian Tujuan Pembangunan

Pencapaian tujuan pembangunan berdasarkan Misi Pembangunan 2019-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut: yaitu tujuan pembangunan Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan dengan indikator kinerja Indeks Aksesibilitas dari kondisi awal 74,60 pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,31 poin pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 81,17 poin atau dengan tingkat capaian sebesar 100,17%. Pencapaian ini didorong adanya Peraturan Daerah no 77 tahun 2022 tentang pembangunan infrastruktur jalan tahun jamak, meningkatnya akses air minum, rasio elektrifikasi, akses sanitasi, konektivitas antar wilayah, kemantapan irigasi, serta akses rumah layak huni. Kemudian tujuan pembangunan Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan dari 60,85 pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,14 pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 63,10.

Adapun tujuan pembangunan lain yang melampaui target adalah Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana capaian tahun 2018 sebesar 56,99 meningkat menjadi 70,56 pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 68,46. Selain itu tujuan pembangunan Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan dengan indikator kinerja Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) juga mengalami peningkatan yg sangat signifikan dari kontraksi 4,59% pada tahun 2018 meningkat menjadi 24,68%

II. Pencapaian Sasaran Pembangunan

Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,63 Point dengan realisasi 0,72, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 114,29%. Untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangana bencana, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 yaitu meningkatkan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana, meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta meningkatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Sampai dengan tahun 2022, Persentase perangkat daerah di provinsi NTB yang telah menerapkan kegiatan penanggulangan bencana sudah mencapai 100%, serta tetap meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana di lingkup perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kota.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana BPBD provinsi NTB memiliki 1 (satu) program kegiatan yaitu program penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana untuk mendukung penanggulangan bencana melalui beberapa kegiatan yaitu:
 1. Memfasilitasi Desa Tangguh Bencana
 2. Memfasilitasi Sekolah / Madrasah Aman Bencana
 3. Pelatihan Pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA)
 4. Menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
 5. Menyusun dokumen rencana kontijensi.
 6. Menyiapkan sarana dan prasarana beserta data laporan korban bencana
 7. Melakukan pemindahan warga/masyarakat dari zona berisiko bencana ke lokasi yang lebih aman
 8. Melakukan pencarian dan evakuasi korban terdampak bencana
 9. Penyediaan dan pendistribusian logistik sesuai dengan kebutuhan korban terdampak bencana
 10. Pengelolaan data dan informasi terkait kebencanaan.
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah, dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan dan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Pada tahun 2022, Persentase Kemantapan jalan ditargetkan sebesar 85,36% dengan

realisasi 85,36%, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi ditargetkan sebesar 52,17% dengan realisasi 54,50%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 104,47%

Ralisasi capaian tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar 80,05 %. Realisasi capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 84,01 % dan 85,36 %, hal ini tercapai karena adanya dukungan penanganan jalan melalui program percepatan jalan (Perda Percepatan Jalan) yang berasal dari pembiayaan APBD dan penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara pada tahun 2022 mencapai 540,56 Km, sehingga Panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 1.247,07 Km atau 85,36% dari total Panjang jalan 1.484,43 Km. sementara itu Kemantapan Sistem Irigasi sebagian besar didukung melalui dana alokasi khusus. Pada Tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 untuk mengelola 35 Daerah Irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha. Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57 %), rusak ringan 61,78 km (9 %), rusak sedang 86,05 km (12 %) dan rusak berat 161,03 km (22 %).

Adapun cakupan air minum, dapat ditingkatkan cakupannya pengelolaan SPAM dengan Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan sebanyak 30 unit dengan jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun pada tahun 2022 sebanyak 8.010 KK.

3. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,86% dengan realisasi 88,57%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,97%.

Pencapaian konektivitas antar di wilayah didukung oleh peningkatan persentase rute angkutan darat dan angkutan laut. Pada tahun 2022, persentase angkutan darat telah mencapai 98,33% dengan rute angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 122 rute dengan penambahan 2 (dua) rute angkutan yakni 1 (satu) rute angkutan perintis yaitu rute Terminal Mandalika – Leweng dan 1 (satu) rute

angkutan KSPN dengan rute BIZAM – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal. Adapun angkutan laut mencapai 84,62% dengan jumlah rute yang terpenuhi sejumlah 22 (dua puluh dua) rute dengan penambahan 1 (satu) rute angkutan Bali – Tawun

Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, dengan indikator kinerja Opini BPK. Pada tahun 2022 ditargetkan mempertahankan Opini BPK WTP dengan realisasi WTP, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini Audit yang diterbitkan jika Laporan Keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, walaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembalikan keputusan. Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah memenuhi kriteria:
 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
 2. Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
 4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, yaitu meliputi Keberadaan Aset, Kelengkapan Bukti dan Nilai Aset.

Pencapaian WTP Provinsi NTB merupakan Prestasi yang ke-11 secara berturut-turut dari tahun 2011-2022

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 36,97% dengan realisasi 43,18%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 116,80%.

Target PAD tahun 2022 yang semula sebesar Rp2.571.637.450.300,- bertambah dalam anggaran perubahan menjadi Rp2.735.041.230.300,- dan kemudian direvisi kembali menjadi Rp2.738.892.515.300,-. Target PAD tersebut merupakan 48,30 persen dari keseluruhan target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebesar

Rp5.670.486.399.401,- Sampai akhir tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan PAD telah mencapai Rp2.287.653.655.567,- atau 83,52 persen dari target tahun 2022 dan meningkat 21,14 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan PAD sebagian besar bersumber dari peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan BLUD.

Penerimaan PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP. Pada tahun 2022, kategori BB dengan realisasi BB, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi NTB oleh KemenPAN RB pada tahun 2022 menunjukkan nilai 72,77 dengan “predikat B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik yang ditandai dengan meningkatnya beberapa komponen yang dinilai antara lain perencanaan kinerja yang mencakup RPMD, Renstra, PK dan Dokumen lainnya telah disusun dengan baik dan telah dibuat secara berjenjang (cascading) oleh seluruh perangkat daerah sampai ke level operasional. Dalam pengukuran kinerja, telah dilakukan secara berkala triwulanan atas pencapaian kinerja dengan mengacu pada rencana aksi yang telah disusun. Sementara itu, dalam hal pelaporan kinerja, pemerintah provinsi telah menyusun akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai yang telah diperjanjikan dan telah dipublikasi dalam website PPID. Sedangkan terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTB untuk mengevaluasi implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur NTB nomor 77 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

3. Meningkatnya Profesionalisme ASN, dengan, dengan indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,70 point dengan realisasi 0,51 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 72,86%.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,53 point dengan

realisasi 3,71 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 81,90%.

Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup dan Persentase Balita *Stunting*. Pada tahun 2022, Angka Harapan Hidup ditargetkan 67,08 tahun dengan realisasi 67,07 tahun, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan Persentase Balita *Stunting* ditargetkan 30,99% dengan realisasi berdasarkan survey EPPGBM sebesar 16,99%, melalui target dengan tingkat capaian sebesar 145,18%.
2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Pendidikan, dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah dan Rata rata Lama Sekolah. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah ditargetkan sebesar 13,73 tahun dengan realisasi 13,96 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,68%. Sedangkan Rata rata Lama Sekolah ditargetkan sebesar 7,04 tahun dengan realisasi 7,61 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 108,10%

Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 42,93 point dengan realisasi 43,39 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,07%. Indeks Kualitas Udara ditargetkan sebesar 87,56 point dengan realisasi 89,30 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,99%. Indeks Kualitas Air Laut ditargetkan sebesar 70,89 point dengan realisasi 89,48 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 102,11%. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan ditargetkan sebesar 68,70 point dengan realisasi 65,61 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 95,50%.
2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Pada tahun 2022, Persentase Penanganan Sampah ditargetkan sebesar 60% dengan realisasi 42,20%,

belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 70,33%. Sedangkan Persentase Pengurangan Sampah ditargetkan sebesar 25% dengan realisasi 12,78%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 51,12%.

Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha), dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 15,43 Triliun dengan realisasi sebesar Rp.21,61 Triliun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 140,05%.
2. Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas, dengan indikator kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 23,71% dengan realisasi sebesar 26,14%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 110,25%.
3. Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 100%.
4. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, dengan indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,70 poin dengan realisasi sebesar 106,99%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 123,40%.
5. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, dan Cakupan Rumah Layak Huni (RLH). Pada tahun 2022, Cakupan Air Minum ditargetkan sebesar 78,45% dengan realisasi sebesar 95,40%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 121,61%. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak ditargetkan sebesar 80,91% dengan realisasi sebesar 83,12%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 102,73%. Rasio Elektrifikasi ditargetkan sebesar 99,88% dengan realisasi sebesar 99,98%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 100,10%. Cakupan Rumah

Layak Huni (RLH) ditargetkan sebesar 65,80% dengan realisasi sebesar 62,30%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 94,68%.

6. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok, dengan indikator kinerja Inflasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,0 - 4,0% dengan realisasi sebesar 6,23%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 44,25%.
7. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan indikator kinerja Pengeluaran per kapita. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 11,60 juta dengan realisasi sebesar Rp. 10,68 juta, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 92,05%.
8. Meningkatnya daya saing pariwisata, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 129,78 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 282,70 miliar, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 217,83%.
9. Meningkatnya daya saing industri, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.173,02 dengan realisasi sebesar Rp.87,90 miliar, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 50,80%.
10. Menurunnya pengangguran terbuka, dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,19% dengan realisasi sebesar 2,89%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 109,40%.

Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase penurunan konflik sosial. Pada tahun 2022 ditargetkan menurun sebesar 20% dengan realisasi meningkat sebesar 50%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 50%.
2. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan menurun sebesar 5,72% dengan realisasi menurun sebesar 55%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 961,54%.

3. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,90% dengan realisasi sebesar 0,80%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 88,89%.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada tahun 2022, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan ditargetkan sebesar 19,27% dengan realisasi sebesar 27,13%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 140,79%. Sedangkan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 70%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 87,50%

3.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2005-2025

Arah kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 diklasifikasikan dalam bidang-bidang sebagaimana berikut:

- a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama, terdiri dari:
 1. Mewujudkan Masyarakat yang Tangguh, Kompetitif dan Bermoral Tinggi Berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Nilai Budaya
 2. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
 3. Memantapkan Peranan Budaya dalam Pembangunan Daerah
 4. Menyediakan Lapangan Kerja
 5. Meningkatkan Kualitas Penduduk
 6. Meningkatkan Pelayanan Dasar Pendidikan
 7. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
 8. Mengurangi kemiskinan dalam masyarakat
 9. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Bidang Hukum dan Aparatur, terdiri dari:
 1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat
 2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

3. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia
 4. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola yang baik (good governance)
 5. Mengembangkan Kapasitas Pemerintah Daerah
 6. Meningkatkan Kerjasama Antardaerah
 7. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Baik dan Profesional
 8. Meningkatkan Peranan Komunikasi dan Informasi
- c. Bidang Politik, terdiri dari:
Mengembangkan Proses dan Budaya Politik
- d. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdiri dari:
Meningkatkan Penguasaan, Pemanfaatan dan Penciptaan Iptek
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
1. Menyediakan Kebutuhan Hunian dan Lingkungan Permukiman yang Layak
 2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan
 3. Mengurangi kemiskinan dalam masyarakat
 4. Membangun Jaringan Infrastruktur wilayah yang Handal dan Terintegrasi
 5. Memenuhi Pasokan Tenaga listrik di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat
- f. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan
 2. Mengurangi kemiskinan dalam masyarakat
 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah
- g. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Menjamin Ketersediaan Pangan dan Gizi Masyarakat
 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Terbarukan, seperti Hutan, Pertanian, Perikanan dan Perairan
 3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan SDA yang Tidak Terbarukan, seperti Bahan Tambang, Mineral, dan Sumber Daya Energi Fosil
 4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan SDA yang Tidak Terbarukan, seperti Bahan Tambang, Mineral, dan Sumber Daya Energi
 5. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan
 6. Mewujudkan Konservasi Sumber Daya Air
 7. Memperhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis dan Kekhasan SDA Hayati

8. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 9. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
 10. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup
- h. Bidang Wilayah dan Tata Ruang, terdiri dari:
1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan
 2. Mengurangi kemiskinan dalam masyarakat
 3. Membangun Jaringan Infrastruktur wilayah yang Handal dan Terintegrasi
- Skala prioritas pentahapan masing-masing periode RPJMD yang tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 dalam kaitannya dengan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2003-2008, RPJMD Tahun 2009-2013, RPJMD Tahun 2013-2018, RPJMD Tahun 2019-2023, sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Periode RPJMD ke-1

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-1 Tahun 2005-2009, akan dilakukan penataan kembali dan pembangunan NTB di segala bidang, terutama dengan titik tekan pada penciptaan pondasi yang kokoh bagi pembangunan periode berikutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar, peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, peletakan dasar pembangunan budaya, dan peletakan dasar pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pentahapan pembangunan pada periode RPJMD ke-1 dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 yang terkait dengan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2003-2008 adalah sebagai berikut:

a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-1, skala prioritas pada bidang sosial dan kehidupan beragama adalah:

1. Peningkatan fungsi dan peran tokoh-tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok agama dan kelompok masyarakat.
2. Peran masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Penataan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial yang berakar dan unik, seperti religius, kebersamaan, dan persatuan
4. Penyediaan pangan dan kesejahteraan pekerja.
5. Penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas pekerja melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
6. Penuntasan buta aksara, peningkatan rata-rata lama sekolah melalui penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun dilakukan pengembangan pendidikan satu atap (sembilan tahun), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah.
7. Pengembangan pendidikan menengah melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai keunggulan lokal pertanian, kelautan, industri dan pariwisata.
8. Penurunan angka kematian bayi dan kematian maternal
9. Peningkatan umur harapan hidup, penurunan angka morbiditas
10. Peningkatan persentase persalinan yang dilakukan oleh tenaga terampil (tenaga kesehatan)

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2003-2008 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-1 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 20 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang sosial dan kehidupan beragama diukur dengan pencapaian 30 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama pada Periode RPJMD ke-1

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2003	2008
1.	Menetapkan SPM dan mendorong penyelenggaraan proses pendidikan bermutu	1.	Jumlah Satuan Pendidikan	Sekolah	412	4913
		2.	Jumlah SLB	Sekolah	15	27
		3.	Jumlah TK/RA	Sekolah	783	1102
2.	Peningkatan kuantitas dan kualitas buku paket dan peralatan pendidikan	4.	Jumlah SD/MI	Sekolah	2912	2957
		5.	Jumlah SMP/MTs	Sekolah	309	453
3.	Penurunan angka drop out dan peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan	6.	Jumlah SMA/MA	Sekolah	169	239
		7.	Jumlah SMK	Sekolah	39	135

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2003	2008
4.	Peningkatan kuantitas dan kualitas SLB pada jenjang pendidikan menengah	8.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A	%	103	111,08
5.	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat terpencil, terbelakang dan tidak mampu	9.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A	%	92,48	94,2
6.	Pengembangan Perguruan Tinggi baik tingkat dan jenis	10.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/ Paket A	%	94,72	97,25
7.	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan kesehatan	11.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	%	69,5	87,6
8.	Peningkatan mutu lingkungan, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi terpadu	12.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	%	57,19	71,44
		13.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/ Paket B	%	72,27	85,57
9.	Fasilitasi penyediaan laboratorium lapangan	14.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/Paket C	%	42	57,95
10.	Peningkatan kompetensi, daya saing dan kemandirian tenaga kerja					
11.	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga menengah professional	15.	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/Paket C	%	33,45	48,38
		16.	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ MA/Paket C	%	42,97	57,22
12.	Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tenaga menengah professional	17.	Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	%	24,89	20,15

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2003	2008
13.	Meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga serta mengendalikan pertumbuhan penduduk	18.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	57,8	64,12
14.	Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam pembangunan daerah	19.	Usia Harapan Hidup	Tahun	NA	61,5
15.	Peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan, forum-forum kemasyarakatan, tokoh agama dan masyarakat	20.	Angka Kematian Bayi	Kasus	NA	72 kematian per 1000 kelahiran hidup
		21.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	NA	305,5 per 100.000 kelahiran hidup
16.	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan untuk dapat lebih berperan dalam pembangunan daerah	22.	Jumlah Puskesmas	Unit	124	142
		23.	Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	435	513
17.	Peningkatan pembinaan mental spritual aparat Pengembangan sendi-sendi dasar pembentukan keluarga sakinah	24.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Sendiri	%	31,33	37,76
18.	Pengembangan sendi-sendi dasar pembentukan keluarga sakinah	25.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,34	6,13
19.	Pengembangan dialog antar kelompok etnik, masyarakat, dan agama					
20.	Pengembangan kerjasama lintas kebudayaan	26.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,15	67,69
		27.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,82	1,17
		28.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	52,11	55,6
		29.	Jumlah Kriminalitas	Kasus	2580	6919
		30.	Rata-Rata Usia Kawin Pertama	Tahun	NA	19,67

Terdapat 4 indikator kinerja yang tidak ada data dasar tahun 2003, yaitu Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, dan Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama. Sebanyak 2 indikator kinerja dengan kinerja menurun (7,69%), yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan jumlah kriminalitas. Selebihnya, yaitu sebanyak 24 indikator kinerja atau 92,31% dalam status kinerja meningkat.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama Periode RPJMD ke-1 sudah dalam koridor pembangunan yang diharapkan.

b. Bidang Hukum dan Aparatur

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-1, skala prioritas pada bidang hukum dan aparatur adalah meningkatnya peran masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2003-2008 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-1 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 8 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang hukum dan aparatur diukur dengan pencapaian 2 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Hukum dan Aparatur pada Periode RPJMD ke-1

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2003	2008
1.	Peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan fungsional	1.	Kerugian Daerah dan Kewajiban setor terhadap APBD	%	NA	0,7
2.	Pengembangan dan pendayagunaan norma-norma sosial dan hukum positif					
3.	Peningkatan koordinasi pelayanan perlindungan, dan pengawasan	2.	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	%	53,74	60,53
4.	Pengembangan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota					

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2003	2008
5.	Pengembangan Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum serta peningkatan profesionalisme aparat perancang produk hukum daerah					
6.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat					
7.	Peningkatan peran pemerintah, institusi sosial dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen					
8.	Peningkatan peran dan fungsi perangkat pengelola informasi					

Terdapat 1 indikator kinerja yang tidak ada data dasar tahun 2003, yaitu Kerugian Daerah dan Kewajiban setor terhadap APBD dan 1 indikator lainnya dengan kinerja meningkat, yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Pidana. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Hukum dan Aparatur Periode RPJMD ke-1 sudah dalam koridor pembangunan yang diharapkan.

c. Bidang Politik

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-1, skala prioritas pada bidang politik adalah meningkatnya peran masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2003-2008 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-1 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 4 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang politik diukur dengan pencapaian 1 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Politik pada Periode RPJMD ke-1

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2003	2008
1.	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan public	1.	Pemilu yang Bebas dan Adil	Pelanggaran	NA	63
2.	Peningkatan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepentingan public					
3.	Peningkatan kapasitas aparatur dan rasionalisasi kelembagaan					
4.	Pengembangan kualitas organisasi sosial politik dalam melakukan pendidikan politik masyarakat					

d. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah:

1. Pengembangan pembangkit energi listrik tenaga fosil
2. Pengembangan energi alternatif terutama energi yang terbarukan (mikro hidro, panas bumi, biomass, arus laut, sinar matahari dan tenaga angin)
3. Kerjasama pengembangan energi ramah lingkungan

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2003-2008 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-1 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 adalah mendorong pengembangan pembangunan yang berbasis IPTEK. Kinerja arah kebijakan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diukur dengan pencapaian 1 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Periode RPJMD ke-1

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2003	2008
1.	Mendorong Pengembangan Pembangunan yang Berbasis IPTEK	1.	Website milik Pemerintah Daerah	Website	1	1

e. Bidang Sarana dan Prasarana

Tidak ada skala prioritas bidang sarana dan prasarana dalam Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 periode RPJMD ke-1 maupun arah kebijakan bidang sarana dan prasarana dalam periode RPJMD Tahun 2003-2008.

f. Bidang Ekonomi

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-1, skala prioritas pada bidang ekonomi adalah:

1. Meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pertanian (sarana irigasi, jalan usaha tani, pasar, dan ketersediaan sarana transportasi) yang memadai untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.
2. Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik jumlah maupun mutu gizinya, aman, dan terjangkau.
3. Pengembangan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal untuk mendukung diversifikasi pangan penduduk.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2003-2008 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-1 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 6 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang ekonomi diukur dengan pencapaian 11 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ekonomi pada Periode RPJMD ke-1

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2003	2008
1.	Pengembangan kemitraan usaha	1.	Jumlah Koperasi	Koperasi	2363	2898
2.	Peningkatan peran dan Koperasi dan Lembaga Keuangan dalam penyaluran kredit yang murah, mudah dan cepat	2.	Pengeluaran per Kapita	Rp.	169.607	372.466
		3.	Persentase Penduduk Miskin	%	26,34	23,81
		4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,41	6,95

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2003	2008
3.	Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatn dana pembangunan yang masuk ke NTB		Tanpa Pertambangan Bijih Logam			
4.	Pengurangan penduduk miskin secara konsisten dan terus menerus	5.	Pertmbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan Bijih Logam	%	3,9	2,82
5.	Penggalian dan pengalokasian sumber-sumber penerimaan daerah guna pengurangan penduduk miskin	6.	Realisasi Investasi PMDN	Rp.	874.082.433.000.000	0
		7.	Realisasi Investasi PMA	Rp.	3.086.749.000.000	4.601.000000
6.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang memperhatikan tata ruang	8.	Inflasi	%	1,82	8,76
		9.	Nilai Tukar Petani	%	87,15	98,84
		10.	Penerimaan Devisa dari Ekspor	US\$	551.493.223,96	760.354.616,84
		11.	Gini Ratio	Poin	NA	0,33

Terdapat 1 indikator kinerja yang tidak ada data dasar tahun 2003, yaitu Gini Ratio, 3 indikator kinerja dengan kinerja menurun (30%), yaitu Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan Bijih Logam, Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Inflasi. Selebihnya, yaitu sebanyak 7 indikator kinerja atau 70% dalam status kinerja meningkat.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Ekonomi Periode RPJMD ke-1 sudah dalam koridor pembangunan yang diharapkan.

g. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-1, skala prioritas pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah:

1. Pengelolaan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab terutama sumber daya alam terbarukan yang masih dalam kondisi baik.

2. Pemulihan daya dukung terhadap sumber daya alam terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis untuk pencadangan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
3. Pengkajian dan pengembangan kebutuhan konservasi dan reklamasi pada lahan kritis dan lahan pertambangan
4. Pengkajian potensi sumberdaya kelautan dan pemanfaatannya.
5. Pengkajian potensi dan kebutuhan sumber daya air, dan identifikasi potensi kelembagaan sosial untuk pengelolaan sumber daya air
6. Pengembangan pembangkit energi listrik tenaga fosil
7. Pengembangan energi alternatif terutama energi yang terbarukan (mikro hidro, panas bumi, biomass, arus laut, sinar matahari dan tenaga angin)
8. Kerjasama pengembangan energi ramah lingkungan

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2003-2008 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-1 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 2 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup diukur dengan pencapaian 11 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Periode RPJMD ke-1

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2003	2008
1.	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1.	Luas Lahan Kritis	Ha	NA	507.778
		2.	Produksi Padi Sawah	Ton	1.422.439	1.750.675
		3.	Produksi Jagung	Ton	64.228	196.263
2.	Peningkatan koordinasi, pengendalian dan pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	4.	Produksi Kedelai	Ton	76.331	95.086
		5.	Produksi Bawang Merah	Ton	161.889	68.748
		6.	Produksi Cabai	Ton	11.274	40.349
		7.	Produksi Perikanan Darat	Ton	15.120,3	29.469,5

Arah Kebijakan	Indikator		Satuan	Tahun	
				2003	2008
	8.	Produksi Perikanan Laut	Ton	29.595,3	116.622,2
	9.	Banyaknya Bencana Alam	Kasus	45	3
	10.	Populasi Sapi	Ekor	415.744	546.114
	11.	Populasi Unggas	Ekor	5.994.196	6.273.629

Terdapat 1 indikator kinerja yang tidak ada data dasar tahun 2003, yaitu Luas Lahan Kritis, 1 indikator dengan kinerja menurun, yaitu Produksi Bawang Merah Selbihnya sebanyak 9 indikator dengan kinerja meningkat (90%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Ekonomi Periode RPJMD ke-1 sudah dalam koridor pembangunan yang diharapkan.

h. Bidang Wilayah dan Tata Ruang

Tidak ada skala prioritas bidang wilayah dan tata ruang dalam Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 periode RPJMD ke-1 maupun arah kebijakan bidang wilayah dan tata ruang dalam periode RPJMD Tahun 2003-2008.

Kesimpulan pencapaian arah kebijakan periode RPJMPD ke-1:

1. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-1 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2003-2008.
 - b. Terdapat 30 indikator kinerja dengan rincian:
 - 4 indikator tanpa data dasar tahun 2003
 - 24 indikator dengan capaian kinerja meningkat (92,31%)
 - 2 indikator dengan capaian kinerja menurun
2. Bidang Hukum dan Aparatur:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-1 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2003-2008.
 - b. Terdapat 2 indikator kinerja dengan rincian:
 - 1 indikator tanpa data dasar tahun 2003
 - 1 indikator dengan capaian kinerja meningkat (100%)

3. Bidang Politik:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-1 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2003-2008.
 - b. Terdapat 1 indikator kinerja dan tanpa data dasar tahun 2003.
4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-1 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2003-2008.
 - b. Terdapat 1 indikator kinerja dan capaiannya meningkat
5. Bidang Sarana dan Prasarana:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, tidak terdapat skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-1 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan tidak terdapat arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2003-2008.
6. Bidang Ekonomi:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-1 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2003-2008.
 - b. Terdapat 11 indikator kinerja dengan rincian:
 - 1 indikator tanpa data dasar tahun 2003
 - 7 indikator dengan capaian kinerja meningkat (70%)
 - 3 indikator dengan capaian kinerja menurun
7. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-1 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2003-2008.
 - b. Terdapat 11 indikator kinerja dengan rincian:
 - 9 indikator dengan capaian kinerja meningkat (90%)
 - 1 indikator dengan capaian kinerja menurun
 - 1 indikator tanpa data dasar tahun 2003 (NA)

8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang:

Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, tidak terdapat skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-1 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan tidak terdapat arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2003-2008.

2. Periode RPJMD ke-2

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD Periode ke-2 Tahun 2009-2013, ditetapkan untuk melanjutkan dan memantapkan kembali program RPJMD ke-1 di segala bidang dengan penekanan pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Pentahapan pembangunan pada periode RPJMD ke-2 dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 terkait dengan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-2, skala prioritas pada bidang sosial dan kehidupan beragama diharapkan diharapkan adanya:

1. Pemantapan fungsi dan peran agama serta budaya dan kelembagaan masyarakat
2. Pengembangan kelompok-kelompok budaya dan kesenian
3. Peningkatan produktivitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi
4. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.
5. Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6. Pengembangan dan penataan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar

7. Penuntasan buta aksara, peningkatan rata-rata lama sekolah melalui penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun dilakukan pengembangan pendidikan satu atap (sembilan tahun) dengan penambahan kuantitas sekolah dan sarana dan prasarana pendidikan menengah.
8. Pengalokasian anggaran dan cakupan untuk penanganan pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi
9. Pembangunan pendidikan di perdesaan, daerah perbatasan, dan daerah terpencil
10. Pengembangan pendidikan menengah melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal dengan memperhatikan keunggulan komparatif
11. Penurunan angka kematian bayi dan kematian maternal,
12. peningkatan umur harapan hidup, penurunan angka morbiditas,
13. peningkatan persentase persalinan yang dilakukan oleh tenaga terampil (tenaga kesehatan)

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 yang terkait dengan skala prioritas RPJMD periode ke-2 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 7 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang sosial dan kehidupan beragama diukur dengan pencapaian 34 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama pada Periode RPJMD ke-2

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2008	2013
1.	Peningkatan kesadaran dan kerukunan beragama	1.	Jumlah Satuan Pendidikan	Sekolah	4913	7830
2.	Peningkatan kesadaran dan kerukunan hidup bermasyarakat	2.	Jumlah SLB	Sekolah	27	31
		3.	Jumlah TK/RA	Sekolah	1102	1491
		4.	Jumlah SD/MI	Sekolah	2957	3918
3.	Peningkatan tata susila, semangat dan perilaku masyarakat	5.	Jumlah SMP/MTs	Sekolah	453	1401
		6.	Jumlah SMA/MA	Sekolah	239	737

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2008	2013
4.	Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah	7.	Jumlah SMK	Sekolah	135	252
		8.	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kenristek Dikti (Negeri+ Swasta)	Kampus	NA	56
5.	Peningkatan kualitas pelayanan terhadap hak-hak dasar manusia.	9.	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenag (Negeri+ Swasta)	Kampus	NA	22
6.	Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan					
7.	Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A	%	111,08	107,9
		11.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A	%	94,2	96,71
		12.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/ Paket A	%	97,25	98,2
		13.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	%	87,6	88,72
		14.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	%	71,44	80,21

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2008	2013
		15.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/ Paket B	%	85,57	92,23
		16.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/ Paket C	%	57,22	66,4
		17.	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/ Paket C	%	48,38	58
		18.	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ MA/ Paket C	%	57,22	66,4
		19.	Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	%	20,15	15,33
		20.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,7	6,54
		21.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	NA	12,46
		22.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	64,12	63,76
		23.	Usia Harapan Hidup	Tahun	61,5	64,74
		24.	Angka Kematian Bayi	Kasus	72 kematian per 1000 kelahiran hidup	54,08 kematian per 1000 kelahiran hidup
		25.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	305,5 per 100.000 kelahiran hidup	240,9 per 100.000 kelahiran hidup

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2008	2013
		26.	Jumlah Puskesmas	Unit	142	157
		27.	Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	513	559
		28.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Sendiri	%	37,76	45,41
		29.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,13	5,3
		30.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,69	65,42
		31.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Unit	1,17	0,93
		32.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	55,6	89,44
		33.	Jumlah Kriminalitas	Kasus	6919	8739
		34.	Rata-Rata Usia Kawin Pertama	Tahun	19,67	20,52

Terdapat 3 indikator kinerja yang tidak ada data dasar tahun 2008, yaitu Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenristek Dikti (Negeri+Swasta), Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Agama (Negeri+Swasta), dan Harapan Lama Sekolah. Sebanyak 5 indikator dengan kinerja menurun, yaitu Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A, Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Kriminalitas. Selebihnya, yaitu sebanyak 26 indikator kinerja atau 83,87% dalam status kinerja meningkat.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama Periode RPJMD ke-2 sudah cukup baik dalam koridor pembangunan yang diharapkan.

b. Bidang Hukum dan Aparatur

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-2, tidak ada skala prioritas pada bidang hukum dan aparatur.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-2 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 4 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang hukum dan aparatur diukur dengan pencapaian 9 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Hukum dan Aparatur pada Periode RPJMD ke-2

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2008	2013
1.	Peningkatan harmonisasi perencanaan program pembangunan	1.	Kerugian Daerah dan Kewajiban setor terhadap APBD	%	0,7	0,016
2.	Peningkatan koordinasi penegakan hukum	2.	Produk hukum daerah yg terbentuk	Dok.	NA	10 Perda, 30 Pergub dan 700 Kpts
3.	Peningkatan kinerja lembaga pengawasan daerah					
4.	Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah	3.	Pendataan tanah-tanah terindikasi terlantar dan penetapan status tanah.	Lokasi	10	10
		4.	Opini LKPD	Status	WDP	WTP
		5.	Pelatihan aparatur pengawas	Orang	NA	23
		6.	Rangking LPPD	Poin	NA	2,6507
		7.	Jumlah Layanan TSP	Unit	0	1

Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Tahun	
			2008	2013
	8. Pembinaan dan pengembangan aparatur yang terlaksana secara optimal	Jabatan	NA	250 jabatan fungsional, 89 jabatan struktural, 40 kasus PNS
	9. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	NA	58,84

Terdapat 5 indikator kinerja yang tidak ada data dasar tahun 2008, yaitu Produk Hukum Daerah yang Terbentuk, Pelatihan aparatur pengawas, Ranking LPPD, Pembinaan dan pengembangan aparatur yang terlaksana secara optimal, dan Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dan sebanyak 4 indikator lainnya dengan kinerja meningkat (100%).

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Hukum dan Paratur Periode RPJMD ke-2 sudah baik.

c. Bidang Politik

Tidak ada skala prioritas dalam bidang politik dalam Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 periode RPJMD ke-2 maupun arah kebijakan bidang politik yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-2 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025.

d. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-2, skala prioritas pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah:

1. Pengembangan pembangkit energi listrik tenaga fosil
2. Penelitian untuk pengembangan energi alternarif terutama energi yang terbarukan
3. Pembangunan pilot project untuk pengembangan listrik yang bersumber dari pembangkit energi terbarukan.
4. Penjajakan kerja sama kegiatan riset dan pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan.

Tidak ada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 yang terkait dengan skala prioritas RPJMD periode ke-2 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025.

e. Bidang Sarana dan Prasarana

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-2, skala prioritas pada bidang sarana dan prasarana adalah:

1. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis
2. Percepatan pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi
4. Peningkatan panjang dan kemantapan jalan
5. Pembangunan pelabuhan darat dan udara
6. Peningkatan sarana transportasi umum untuk wilayah pedesaan dan perkotaan
7. Pembangunan waduk dan sarana irigasi pendukung lainnya
8. Pembangunan jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih dan sanitasi.
9. Pengembangan pembangkit energi listrik tenaga fosil.
10. Pembangunan pilot project untuk pengembangan listrik yang bersumber dari pembangkit energi terbarukan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-2 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 2 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang sarana dan prasarana diukur dengan pencapaian 8 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana pada Periode RPJMD ke-2

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2008	2013
1.	Peningkatan aksesibilitas wilayah	1.	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	%	79,23	99,69
2.	Peningkatan Kapasitas Terpasang	2.	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	44,25	67,56

Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Tahun	
			2008	2013
	3. Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)	%	33,1	64,43
	4. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	820	1992
	5. Cakupan layanan air bersih Perkotaan	%	74,36	80,23
	6. Cakupan layanan air bersih Perdesaan	%	65	72,15
	7. Cakupan layanan sanitasi Perkotaan	%	80	76,95
	8. Cakupan layanan sanitasi Perdesaan	%	65	62,54

Terdapat 3 indikator dengan kinerja menurun, yaitu Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Cakupan Layanan Sanitasi Perkotaan, dan Cakupan Layanan Sanitasi Perdesaan, sedangkan 5 indikator lainnya dengan kinerja meningkat (62,5%).

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Sarana dan Prasarana Periode RPJMD ke-2 cukup baik.

f. Bidang Ekonomi

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-2, skala prioritas pada bidang ekonomi adalah:

1. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan daerah
2. Pemanfaatan dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari lembaga keuangan formal dan non-formal.
3. Peningkatan nilai tambah dan pertumbuhan sektor pertanian dengan mengembangkan produk unggulan dan program terobosan.

4. Peningkatan arus investasi dengan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki daya tarik dan daya saing seperti sektor pariwisata, perdagangan, hotel, restoran, dan jasa keuangan.
5. Pembangunan sektor pertanian melalui optimalisasi fasilitasi pembangunan perdesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan kapasitas SDM pengembangan jaringan infrastruktur penunjang
6. Peningkatan akses informasi dan pemasaran
7. Pengembangan lembaga keuangan
8. Peningkatan kesempatan kerja, pengembangan teknologi, dan pengembangan sosial capital dan human capital.
9. Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-2 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 2 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang ekonomi diukur dengan pencapaian 10 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ekonomi pada Periode RPJMD ke-2

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2008	2013
1.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber modal, sarana prasarana ekonomi	1.	Jumlah Koperasi	Koperasi	2898	3851
2.	Peningkatan pendapatan masyarakat	2.	Pengeluaran per Kapita	Rp.	372.466	555.843
		3.	Persentase Penduduk Miskin	%	23,81	17,97
		4.	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	6,95	5,42

Arah Kebijakan	Indikator		Satuan	Tahun	
				2008	2013
	5.	Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan Bijih Logam	%	2,82	5,15
	6.	Realisasi Investasi PMDN	Rp.	0	1.537.177.419
	7.	Realisasi Investasi PMA	Rp.	4.601.000.000	3.374.844.350
	8.	Inflasi	%	8,76	9,51
	9.	Nilai Tukar Petani	%	98,84	94,23
	10.	Penerimaan Devisa dari Ekspor	US\$	760.354.616,84	402.071.003.942,56
	11.	Gini Ratio	Poin	0,33	0,36

Terdapat 6 indikator dengan kinerja menurun, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam, Realisasi Investasi PMA, Inflasi, Nilai Tukar Petani, Penerimaan Devisa dari Ekspor, dan Gini Ratio, sedangkan 5 indikator lainnya dengan kinerja meningkat (45,45%).

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Ekonomi Periode RPJMD ke-2 perlu ditingkatkan.

g. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-2, skala prioritas pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah:

1. Peningkatan nilai tambah dan pertumbuhan sektor pertanian dengan mengembangkan produk unggulan dan program terobosan.
2. Peningkatan pemulihan daya dukung terhadap sumber daya alam terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis baik di sektor kehutanan, pertanian, perikanan dan perairan.
3. Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggungjawab pada konservasi sumber daya alam.

4. Sosialisasi pengelolaan SDA yang terbarukan dan tak terbarukan diikuti dgn penegakan hukum dalam sengketa lahan.
5. Pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif
6. Untuk konservasi sumber daya air dilakukan pengembangan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management, pendekatan supply management, dan peningkatan kegiatan perlindungan mata air dan air tanah

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-2 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 adalah peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan pada Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kinerja arah kebijakan pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup diukur dengan pencapaian 13 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Periode RPJMD ke-2

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2008	2013
1.	Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan pada Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	NA	67,77
		2.	Luas Lahan Kritis	Ha	507.778,17	444.409,19
		3.	Pola Pangan Harapan	Skor	NA	79,4
		4.	Produksi Padi Sawah	Ton	1.750.675	1.969.252
		5.	Produksi Jagung	Ton	196.263	633.773
		6.	Produksi Kedelai	Ton	95.086	91.065
		7.	Produksi Bawang Merah	Ton	68.748	109.313
		8.	Produksi Cabai	Ton	40.349	39.922
		9.	Produksi Perikanan Darat	Ton	29.469,5	123.190,75

Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Tahun	
			2008	2013
	10. Produksi Perikanan Laut	Ton	116.622,2	762.944,7
	11. Banyaknya Bencana Alam	Kasus	3	11330
	12. Populasi sapi	Ekor	546.114	1.002.731
	13. Populasi unggas	Ekor	6.273.629	11.795.972

Terdapat 2 indikator yang tidak ada tahun dasar 2008 dan 3 indikator dengan kinerja menurun, yaitu Produksi Cabai, Produksi Kedelai, dan Banyaknya Bencana Alam. Sedangkan 8 indikator lainnya dengan kinerja meningkat (72,73%).

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Periode RPJMD ke-2 sudah cukup baik.

h. Bidang Wilayah dan Tata Ruang

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-2, skala prioritas pada bidang wilayah dan tata ruang adalah:

1. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis
2. Percepatan pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil

Tidak ada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-2 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025.

Kesimpulan pencapaian arah kebijakan periode RPJMPD ke-2:

1. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-2 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2008-2013.
 - b. Terdapat 34 indikator kinerja dengan rincian:
 - 3 indikator tanpa data dasar tahun 2008
 - 26 indikator dengan capaian kinerja meningkat (83,87%)
 - 5 indikator dengan capaian kinerja menurun.

2. Bidang Hukum dan Aparatur:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-2 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2009-2013.
 - b. Terdapat 9 indikator kinerja dengan rincian:
 - 5 indikator tanpa data dasar tahun 2008
 - 4 indikator dengan capaian kinerja meningkat (100%)
3. Bidang Politik:

Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, tidak terdapat skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-2 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan tidak terdapat arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2008-2013.
4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, terdapat skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-2 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan tidak terdapat arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2008-2013.
5. Bidang Sarana dan Prasarana:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-2 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2008-2013.
 - b. Terdapat 8 indikator kinerja dengan rincian:
 - 5 indikator dengan capaian kinerja meningkat (62,5%)
 - 3 indikator dengan capaian kinerja menurun
6. Bidang Ekonomi:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-2 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2010-2013.
 - b. Terdapat 11 indikator kinerja dengan rincian:
 - 5 indikator dengan capaian kinerja meningkat (45,45%)
 - 6 indikator dengan capaian kinerja menurun

7. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:

- a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-2 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2008-2013.
- b. Terdapat 13 indikator kinerja dengan rincian:
 - 2 indikator tanpa data dasar tahun 2008
 - 8 indikator dengan capaian kinerja meningkat (72,73%)
 - 3 indikator dengan capaian kinerja menurun

8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang:

Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, terdapat skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-2 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan tidak terdapat arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2008-2013.

3. Periode RPJMD ke-3

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, ditetapkan bahwa dalam periode RPJMD ke-3 Tahun 2013-2018 Pemerintah Daerah akan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat dalam rangka memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Pentahapan pembangunan pada periode RPJMD ke-3 dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 terkait dengan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-3, skala prioritas pada bidang sosial dan kehidupan beragama adalah:

1. Pengembangan pendidikan satu atap untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun terus dilakukan dengan menambah kuantitas sekolah dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan menengah terutama di daerah-daerah pedesaan, daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah terisolasi.

2. Pengalokasian anggaran dan cakupan untuk penanganan pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi
3. Pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal dengan memperhatikan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh berbagai wilayah.
4. Pembangunan sekolah kejuruan terus dilakukan agar proporsi jumlah sekolah kejuruan dan sekolah umum pada periode ini mencapai 40:60.
5. Memperkuat peningkatan upaya pencegahan melalui peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan serta pengendalian penyakit menular serta tidak menular.
6. Peningkatan jenis, mutu, jumlah tenaga kesehatan dilakukan seiring dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
7. Pengembangan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan untuk mendukung pendanaan pelayanan kesehatan

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-3 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 35 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang sosial dan kehidupan beragama diukur dengan pencapaian 33 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama pada Periode RPJMD ke-3

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
1.	Pembangunan sarana prasarana ibadah, aktivitas keagamaan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat	1.	Jumlah Satuan Pendidikan	Sekolah	7830	10046
		2.	Jumlah SLB	Sekolah	31	41
		3.	Jumlah TK/RA	Sekolah	1491	3024
2.	Peningkatan kegiatan ibadah	4.	Jumlah SD/MI	Sekolah	3918	4036
3.	Pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi umat	5.	Jumlah SMP/MTs	Sekolah	1401	1765
				Sekolah		

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
4.	Pengembangan dan Peningkatan kualitas lembaga-lembaga keagamaan	6.	Jumlah SMA/MA		737	869
		7.	Jumlah SMK	Sekolah	252	311
5.	Pengembangan metode dakwah dan ceramah	8.	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenristek Dikti (Negeri+ Swasta)	Kampus	56	56
6.	Pengembangan wawasan Pembangunan daerah					
7.	Kurikulum sekolah berbasis muatan lokal					
8.	Masyarakat rawan konflik					
9.	Nilai-nilai keagamaan	9.	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenag (Negeri+ Swasta)	Kampus	22	27
10.	Ideologi nasional dan budaya daerah					
11.	Awig-awig dan seluruh aspek kehidupan masyarakat					
12.	Nilai-nilai Budaya Lokal	10.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A	%	107,9	108,82
13.	Museum, Taman Budaya maupun lokasi peninggalan budaya lainnya	11.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A	%	96,71	98,86
		12.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/ Paket A	%	98,2	99,43
		13.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	%	88,72	93,83
14.	Penciptaan kreasi seni dan budaya	14.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	%	80,21	83,88
15.	Ragam adat istiadat dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari					
16.	Khasanah budaya					

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
		15.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/ Paket B	%	92,23	97,72
17.	Rehabilitasi dan renovasi situs-situs dan peninggalan budaya lainnya pada wilayah obyek-obyek wisata budaya	16.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/M A/ Paket C	%	65	89,64
18.	Kajian, pengembangan dan pemanfaatan Bahasa Sasak, Samawa dan Mbojo	17.	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/M A/ Paket C	%	58	65,77
		18.	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/M A/ Paket C	%	66,4	76,89
19.	Karya seni budaya dan nilai kearifan lokal	19.	Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	%	15,33	12,58
20.	Naskah kuno/klasik dan koleksi deposit daerah NTB					
21.	Naskah Khasanah NTB	20.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,54	7,03
22.	Mencegah penyebaran dan penggunaan narkotik di kalangan generasi muda, aparaturnya dan masyarakat	21.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	63,76	67,3
		22.	Usia Harapan Hidup	Tahun	64,74	65,87
		23.	Angka Kematian Bayi	Kasus	54,08 kematian per 1000 kelahiran hidup	7,91 kematian per 1000 kelahiran hidup
23.	Standar pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan	24.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	240,9 per 100.000 kelahiran hidup	90,49 per 100.000 kelahiran hidup

Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Tahun	
			2013	2018
pendidikan yang merata dan berkualitas	25. Jumlah Puskesmas	Unit	157	166
	26. Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	559	562
	27. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Sendiri	%	45,41	66,50
24. Pendidikan pra nikah, Kesehatan anak dan ibu melahirkan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, gizi buruk, sanitasi, air bersih layak minum, penderita gangguan jiwa, penyandang cacat, pendidikan universal, PAUD, pendidikan non formal, keaksaraan usaha mandiri dan keluarga berencana	28. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,3	3,58
	29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,42	66,68
	30. Laju Pertumbuhan Penduduk	Unit	0,93	1,17
	31. Indeks Pembangunan Gender	Poin	89,44	90,37
	32. Jumlah Kriminalitas	Kasus	8739	5983
	33. Rata-Rata Usia Kawin Pertama	Tahun	20,52	20,23
25.	Tenaga medis, tenaga pendidik dan pekerja social yang memadai dan kompeten			
26.	Sarana Prasarana: pendidikan dan kesehatan termasuk RSUD Provinsi dan UPT sosial dan tenaga kerja			
27.	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mewujudkan usia kawin pertama perempuan			

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
28.	Cabang olah raga unggulan					
29.	Layanan kesehatan, pendidikan, latihan kerja dan kesempatan kerja bagi penyandang masalah kesejahteraan social					
30.	Transmigrasi luar daerah					
31.	Database daerah rawan bencana dan perubahan iklim untuk menyediakan data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana					
32.	Early Warning System, Pusdalops untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana					
33.	Masyarakat disekitar kawasan rawan bencana, dan organisasi kemasyarakatan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana					
34.	Kawasan rawan bencana untuk mewujudkan kawasan tangguh bencana					

Terdapat 1 indikator dengan kinerja tetap, yaitu Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenrisetek Dikti (Negeri+Swasta) dan 2 indikator dengan kinerja menurun, yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rata-Rata Usia Kawin Pertama. Selebihnya sebanyak 30 indikator dengan kinerja meningkat

(90,91%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama sudah sesuai harapan.

b. Bidang Hukum dan Aparatur

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada bidang hukum dan aparatur adalah adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-3 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 25 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang hukum dan aparatur diukur dengan pencapaian 12 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Hukum dan Aparatur pada Periode RPJMD ke-3

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
1.	Pemasyarakatan budaya tertib	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	C	CC
2.	Tata Kelola Pelayanan Publik SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota	2.	Produk hukum daerah yg terbentuk	Dok.	10 Perda, 30 Pergub dan 700 Kpts	56 Perda, 171 Pergub dan 3138 Kpts
3.	Peningkatan kompetensi pelayan public	3.	Pembinaan dan pengembangan aparatur yang terlaksana secara optimal	Jabatan	250 jabatan fungsional, 89 jabatan struktural, 40 kasus PNS	1250 jabatan fungsional, 446 jabatan struktural, 150 kasus
4.	Penerapan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)					
5.	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana termasuk Informasi	4.	Pendataan tanah-tanah terindikasi terlantar dan penetapan status tanah. Tertibnya regulasi perijinan yang diberikan	Kab/Kota	10	10
6.	Pengembangan e-Government					
7.	Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat					
8.	Aparat penegak hukum Peraturan Daerah/Perundangan lainnya					

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
9.	Sistem komunikasi terpadu antar aparat penegak hukum	5.	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	58,84	100
10.	Penyadaran perbuatan melanggar hukum	6.	Opini LKPD	Opini	WTP	WTP
11.	Pencegahan dan penanganan masalah tanah terlantar dan tanah konflik	7.	Ranking LPPD	Angka	2,6507	3,2034
		8.	Jumlah layanan TSP	Unit	0	11
12.	Proses perencanaan dan proses monitoring evaluasi program/kegiatan utama dan program/kegiatan terobosan serta kegiatan pendataan/ informasi pembangunan daerah	9.	Indeks Pelayanan Publik	Poin	NA	4,56
		10.	Nilai SAKIP	Kategori	NA	B
		11.	Indeks Profesionalisme ASN	Poin	0,49	0,6
13.	Administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah	12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	NA	3,3
14.	Peningkatan kualitas SDM auditor					
15.	Penyelenggaraan pemerintahan daerah					
16.	Kamtibmas dan tertib hukum untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum					
17.	Pendidikan mental dan spiritual untuk mewujudkan aparat penegak hukum yang bersih dan profesional					
18.	Rekrutmen Satpol PP, PPNS dan Jagawana/PolHut					
19.	Sinergi kegiatan pembangunan sosial					
20.	BLK, KKK dan lembaga pendidikan keterampilan usaha lainnya yang memadai					

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
21.	Kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang lebih profesional					
22.	Sinergi keg.pemb.ekonomi					
23.	Sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah					
24.	Sinergi kegiatan pemb.lingkungan hidup untuk mewujudkan rencana pemb.lingkungan hidup yang berkualitas					

Terdapat 3 indikator tanpa tahun dasar 2008, yaitu Indeks Pelayanan Publik, Nilai SAKIP, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 9 indikator dengan dengan kinerja meningkat (100%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Hukum dan Aparatur sudah baik.

c. Bidang Politik

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-3 tidak ada skala prioritas pada bidang politik. Sedangkan, dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 terdapat 2 arah kebijakan pada bidang politik. Kinerja arah kebijakan pada bidang politik diukur dengan pencapaian 1 indikator kinerja capaian kinerjanya meningkat 4,65 poin, sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Politik pada Periode RPJMD ke-3

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
1.	Pendidikan kesadaran politik masyarakat	1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	70,47	77,5
2.	Kepekaan terhadap masalah sosial politik					

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Hukum dan Aparatur sudah baik.

d. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-3, skala prioritas pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat ditingkatkan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 yang terkait dengan agenda kebijakan periode RPJMD ke-3 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 adalah Pengembangan Literasi Media pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Arah kebijakan ini tidak sinkron dengan skala prioritas bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan dalam pentahapan periode RPJMD ke-3 dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025.

Kinerja arah kebijakan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diukur dengan pencapaian 1 indikator kinerja dan capaian kinerjanya meningkat 88,89%, sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Periode RPJMD ke-3

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
1.	Pengembangan Literasi Media pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	1.	Aplikasi SIP-PPID Provinsi NTB dan Kab/Kota se- NTB yang terbangun	SKPD	4	45

e. Bidang Sarana dan Prasarana

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-3, skala prioritas pada bidang sarana dan prasarana adalah:

1. Pengupayaan distribusi infrastruktur pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat yang produktif dan memiliki daya saing.
2. Peningkatan akses dan mutu infrastruktur

3. Pembangunan perluasan landasan pacu Bandara Internasional Lombok
 4. Pembangunan Pelabuhan Nusantara di Lombok Selatan dan Lombok Utara
 5. Kondisi jalan sebagian besar mantap
 6. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerah dan keandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan yang memadai.
 7. Pengoperasian beberapa pembangkit tenaga dengan energi terbarukan
- Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-3 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 3 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang sarana dan prasarana diukur dengan pencapaian 10 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana pada Periode RPJMD ke-3

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
1.	Sistem perhubungan udara, sistem perhubungan darat, sistem perhubungan laut, sumber air baku dan air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sanitasi dan prsampahan/limbah	1.	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	%	99,69	96,7
		2.	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	67,56	83,65
		3.	Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)	%	64,43	93,83
2.	Sistem jaringan lokal, nasional dan internasional untuk peningkatan penumpang angkutan udara dan laut	4.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	1992	1673
		5.	Indeks Aksesibilitas	Poin	NA	74,6
		6.	Persentase Kemantapan Irigasi	%	NA	50,63
3.	Rumah tidak layak huni dan kampung kumuh untuk permukiman yang sehat dan nyaman	7.	Cakupan Air Minum	%	NA	70,48
		8.	Persentase konektivitas transportasi public	%	NA	74,76

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
		9.	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	NA	56,75
		10.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota	%	NA	73,82

Terdapat 6 indikator tanpa tahun dasar 2008, yaitu Indeks Aksesibilitas, Persentase Kemantapan Irigasi, Cakupan Air Minum, Persentase konektivitas transportasi publik, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota. Sedangkan 1 indikator dengan capaian kinerja menurun, yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Nasional, dan 3 indikator lain dengan capaian kinerja meningkat (75%), yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi, Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi), Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas.

f. Bidang Ekonomi

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-3, skala prioritas pada bidang ekonomi adalah:

1. Peningkatan pertumbuhan dan nilai tambah sektor pertanian terus diupayakan dengan mengembangkan agroindustri untuk beberapa komoditi unggulan
2. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat ditingkatkan.
3. Pengembangan sektor jasa dan sektor industri
4. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 yang terkait dengan agenda kebijakan periode RPJMD ke-3 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 18 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan

pada bidang ekonomi diukur dengan pencapaian 11 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ekonomi pada Periode RPJMD ke-3

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
1.	Koperasi, UMKM dan Badan Usaha Milik Daerah yang akuntabel	1.	Jumlah Koperasi	Koperasi	3851	4110
		2.	Pengeluaran per Kapita	Rp.	555.843	918.119,2
2.	Kualitas pengelolaan usaha	3.	Persentase Penduduk Miskin	%	17,97	14,75
3.	Jenis usaha pariwisata dan agroindustri dalam rangka kerjasama antar provinsi dan dunia usaha	4.	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	5,42	3,2
4.		5.	Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan Bijih Logam	%	5,15	-4,5
5.	Obyek wisata unggulan	6.	Realisasi Investasi PMDN	Rp.	1.537.177.419	9.972.551.780.172
6.	Meningkatkan kualitas atraksi dan daya tarik wisata	7.	Realisasi Investasi PMA	Rp.	3.374.844.350	3.552.186.910.956
7.	Pasar wisata dunia dalam rangka promosi/ pemasaran obyek pariwisata	8.	Inflasi	%	9,51	3,16
		9.	Nilai Tukar Petani	%	94,23	108,37
8.	Peralatan industri kecil menengah	10.	Penerimaan Devisa dari Ekspor	US\$	402.071.003.942,56	336.294,82
9.	Pendampingan petani, peternak, nelayan dan masyarakat pesisir serta masyarakat sekitar kawasan hutan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah	11.	Gini Ratio	%	0,36	0,372
10.	Pengembangan ekonomi kreatif dalam edukasi dan fasilitasi tenaga kerja terampil untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah					

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
11.	UMKM dan IKM untuk berkembangnya wirausaha dan investasi daerah					
12.	BUMD dan Swasta untuk berkembangnya wirausaha dan investasi daerah					
13.	Database investasi					
14.	PTSP Online					
15.	Komoditi Unggulan Daerah untuk ekspor daerah					
16.	Database sumber-sumber PAD					
17.	Sistem Pelayanan Online PAD					
18.	Database dana non pemerintah daerah					
19.	Sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran					

Terdapat 4 indikator dengan capaian kinerja menurun, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam, Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan Bijih Logam, Penerimaan Devisa dari Ekspor, dan Gini Ratio. Sedangkan 7 indikator lainnya dengan capaian kinerja meningkat (63,64%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Ekonomi cukup baik.

g. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-3, skala prioritas pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah:

1. Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi sumber daya alam daerah.
2. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang terkait dengan agenda kebijakan periode RPJMD ke-3 pada Dokumen

RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 16 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup diukur dengan pencapaian 13 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Periode RPJMD ke-3

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
1.	Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan dalam rangka diversifikasi konsumsi pangan	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,77	75,16
2.	Tanaman padi dan palawija dalam intensifikasi produk SDA berkualitas untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah	2.	Luas Lahan Kritis	Ha	444.409,19	65.771
		3.	Pola Pangan Harapan	Skor	79,4	82,8
		4.	Produksi Padi Sawah	Ton	1.969.252	1.460.801,77
		5.	Produksi Jagung	Ton	633.773	2.084.929
3.	Lahan kering dan sawah dalam ekstensifikasi produk SDA berkualitas untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah	6.	Produksi Kedelai	Ton	91.065	70.933
		7.	Produksi Bawang merah	Ton	109.313	212.885
		8.	Produksi Cabai	Ton	39.922	41.535
4.	Padi, jagung, kentang, kedelai, kopi, kakao dan jambu mete intensif untuk ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman dan hasil ikutannya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah	9.	Produksi Perikanan Darat	Ton	123.190,75	242.080
		10.	Produksi Perikanan Laut	Ton	762.944,7	1.055.240
		11.	Banyaknya Bencana Alam	Kasus	11330	14999
		12.	Populasi sapi	Ekor	100.231	1.183.570
5.	Komoditi gaharu, ketak, kemiri, madu dan rotan untuk ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah	13.	Populasi unggas	Ekor	11.795.972	25.473.859

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
6.	Komoditas ekspor rumput laut, udang dan kerapu untuk ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk budidaya perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah					
7.	Komoditi sapi untuk ekstensifikasi dan intensifikasi ternak untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah					
8.	Komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta hasil hutan bukan kayu dalam ekstensifikasi pemasaran produk SDA berkualitas untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah					
9.	Hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta hasil hutan bukan kayu untuk fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah					
10.	Kerajinan industri dan makanan olahan untuk fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah					
11.	Penyiapan bahan baku, olahan dan pemasaran untuk kerjasama ekonomi					

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
	antar kawasan, antar kota dan antar wilayah					
12.	Masyarakat perkotaan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan SDA dan LH					
13.	Masyarakat kawasan hutan, bantaran sungai, kawasan rawan bencana pesisir laut dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan					
14.	Dampak penambangan liar terhadap lingkungan hidup untuk menyediakan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)					
15.	Kawasan Geopark, Kawasan hutan, kawasan bantaran sungai, kawasan rawan bencana, kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, KSP fungsi lindung dan konservasi serta berbagai sumber daya hayati, keanekaragaman hayati dan plasma nutfah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari					
16.	Database potensi SDA					

Terdapat 3 indikator dengan capaian kinerja menurun, yaitu Produksi Padi Sawah, Produksi Kedelai, dan Banyaknya Bencana Alam. Sedangkan 10 indikator dengan kinerja meningkat (76,92%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup cukup baik.

h. Bidang Wilayah dan Tata Ruang

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-3, skala prioritas pada bidang wilayah dan tata ruang adalah pengupayaan distribusi infrastruktur pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat yang produktif dan memiliki daya saing.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang terkait dengan agenda kebijakan periode RPJMD ke-3 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 2 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang wilayah dan tata ruang diukur dengan pencapaian 2 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada Periode RPJMD ke-3

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2013	2018
1.	Kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas Kabupaten/Kota untuk rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	1.	Cakupan Penanganan Pelanggaran Tata Ruang	%	100	100
		2.	Rencana Detil Kawasan Strategis Provinsi	Dok.	1	2
2.	Aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk perwujudan masyarakat yang sadar tata ruang					

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Wilayah dan Tata Ruang Periode RPJMD ke-3 sudah baik.

Kesimpulan pencapaian arah kebijakan periode RPJMPD ke-3:

1. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-3 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018.
 - b. Terdapat 30 indikator kinerja dengan rincian:
 - 29 indikator dengan capaian kinerja meningkat (90,63%)
 - 2 indikator dengan capaian kinerja menurun
 - 1 indikator dengan capaian kinerja tetap
2. Bidang Hukum dan Aparatur:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-3 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018.
 - b. Terdapat 12 indikator kinerja dengan rincian:
 - 3 indikator tanpa data dasar tahun 2013
 - 9 indikator dengan capaian kinerja meningkat (100%)
3. Bidang Politik:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, tidak terdapat skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-3 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan terdapat arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018.
 - b. Terdapat 1 indikator kinerja dan dengan capaian kinerja meningkat (100%)
4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-3 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018.
 - b. Terdapat 1 indikator kinerja dan dengan capaian kinerja meningkat (100%)
5. Bidang Sarana dan Prasarana:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-3 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018.

- b. Terdapat 10 indikator kinerja dengan rincian:
 - 6 indikator tanpa data dasar tahun 2013
 - 3 indikator dengan capaian kinerja meningkat (75%)
 - 1 indikator dengan capaian kinerja tetap
- 6. Bidang Ekonomi:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-3 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018.
 - b. Terdapat 11 indikator kinerja dengan rincian:
 - 7 indikator dengan capaian kinerja meningkat (63,64%)
 - 4 indikator dengan capaian kinerja tetap
- 7. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-3 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018.
 - b. Terdapat 13 indikator kinerja dengan rincian:
 - 10 indikator dengan capaian kinerja meningkat (76,92%)
 - 3 indikator dengan capaian kinerja menurun
- 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-3 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018.
 - b. Terdapat 2 indikator kinerja dengan kinerja meningkat.

4. Arah Kebijakan Periode RPJMD ke-4

Dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, ditetapkan bahwa dalam periode RPJMD Periode ke-4 Tahun 2018-2023 Pemerintah Daerah akan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Pentahapan pembangunan pada periode RPJMD ke-4 dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 terkait dengan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk Periode RPJMD ke-4, skala prioritas pada bidang sosial dan kehidupan beragama adalah:

1. Peningkatan fasilitasi lembaga jaminan sosial
2. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif.
3. Peningkatan umur harapan hidup
4. Penurunan angka morbiditas
5. Peningkatan kesetaraan gender
6. Peningkatan penanganan anak terlantar
7. Penguatan peran para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 yang terkait dengan skala prioritas bidang sosial dan kehidupan beragama pada RPJMD periode ke-4 dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 30 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang sosial dan kehidupan beragama diukur dengan pencapaian 38 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama pada Periode RPJMD ke-4

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
1.	Melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana	1.	Indeks Pendidikan	Poin	60,85	64,14
		2.	Jumlah Satuan Pendidikan	Sekolah	10046	10109
		3.	Jumlah SLB	Sekolah	41	44
		4.	Jumlah TK/RA	Sekolah	3024	2691
		5.	Jumlah SD/MI	Sekolah	4036	4154
		6.	Jumlah SMP/MTs	Sekolah	1765	1947
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia	7.	Jumlah SMA/MA	Sekolah	869	936
		8.	Jumlah SMK	Sekolah	311	337
		9.	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah	Kampus	56	55

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
3.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan		Kemenristek Dikti (Negeri+ Swasta)			
		10.	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenag (Negeri+ Swasta)	Kampus	27	30
4.	Meningkatkan kapasitas Tim Kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah kesehatan	11.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A	%	107,83	107,21
		12.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A	%	99,68	99,98
5.	Meningkatkan luasan fasilitas kesehatan yang terstandar	13.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/ Paket A	%	99,43	99,17
6.	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	14.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	%	93,83	92,59
7.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat	15.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	%	83,88	86,05
		16.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/ Paket B	%	97,72	97,74
8.	Meningkatkan layanan Posyandu yang unggul dan berkualitas	17.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA /Paket C	%	89,64	93,68
9.	Mengembangkan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS)	18.	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA /Paket C	%	65,77	67,61

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
	dan lingkungan kerja sehat	19.	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA /Paket C	%	76,89	77,43
10.	Meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau	20.	Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	%	12,58	11,03
11.	Mewujudkan pemerataan penyebaran, ketercukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan	21.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,03	7,61
		22.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,3	69,46
		23.	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,87	67,07
12.	Mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan	24.	Angka Kematian Bayi	Kasus	7,91 kematian per 1000 kelahiran hidup	8,27 kematian per 1000 kelahiran hidup
13.	Mengirim seribu putra/putri NTB sekolah ke luar negeri	25.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	90,49 per 100.000 kelahiran hidup	101,82 per 100.000 kelahiran hidup
14.	Memfasilitasi keminatan siswa melalui Program "Ayo Bercita-cita"	26.	Jumlah Puskesmas	Unit	166	176
15.	Memfasilitasi pelatihan TOEFL/IELT bagi putra/putri NTB yang akan melanjutkan sekolah ke Luar negeri	27.	Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	562	555
		28.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Sendiri	%	66,50	73,32
16.	Melakukan Re-engineering SMK		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,58	2,89
17.	Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas					
18.	Meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih	30.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,68	70,93

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
19.	Meningkatkan ketersediaan sarana olahraga					
		31.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Unit	1,17	1,82
		32.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,37	91,08
20.	Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin					
		33.	Jumlah Kriminalitas	Kasus	5983	6963
21.	Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja	34.	Rata-Rata Usia Kawin Pertama	Tahun	20,23	20,39
		35.	Desa Tangguh Bencana	Desa/ Kel.	187	301
22.	Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja	36.	Indeks Resiko Bencana	Poin	136,78	119,83
		37.	Persentase Balita Sunting	%	33,49	16,84
23.	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja	38.	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	10	70
24.	Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan					
25.	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat					
26.	Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya dan cagar budaya dengan menjadikan Islamic Center, Istana Dalam Loka, Asi Mbojo, dan cagar budaya lainnya sebagai pusat peradaban					
27.	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak					

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
	Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice					
28.	Meningkatkan Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat					
29.	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga					
30.	Meningkatkan pemenuhan Hak anak melalui 5 Klaster KLA					

Terdapat 10 indikator dengan kinerja menurun, yaitu Jumlah TK/RA, Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenristek Dikti (Negeri+Swasta), Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Jumlah Puskesmas Pembantu, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kriminalitas Selebihnya, sebanyak 28 indikator dengan capaian kinerja meningkat (75,68%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Sosial dan Kehidupan Bergama Periode RPJMD ke-3 sudah cukup baik.

b. Bidang Hukum dan Aparatur

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk Periode RPJMD ke-4, skala prioritas pada bidang hukum dan aparatur adalah penguatan peran para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-4 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 18 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan

pada bidang hukum dan aparatur diukur dengan pencapaian 12 indikator kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3. 33 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Hukum dan Aparatur
pada Periode RPJMD ke-4**

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
1.	Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporan Keuangan Daerah, koordinasi unsur pendukung pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD tepat waktu	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC	B
		2.	Produk hukum daerah yg terbentuk	Dok.	56 Perda, 171 Pergub dan 3138 Kpts	9 Perda, 114 Pergub dan 928 Kpts
2.	Meningkatkan konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dengan menerapkan perencanaan berbasis elektronik	3.	Pembinaan dan pengembangan aparatur yang terlaksana secara optimal	Jabatan	1250 jabatan fungsional, 446 jabatan struktural, 150 kasus	827
3.	Mendorong perencanaan yang berorientasi kepada hasil (outcome) yang terukur dan relevan	4.	Pendataan tanah-tanah terindikasi terlantar dan penetapan status tanah.	Lokasi	10	10
4.	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	5.	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100
5.	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme APIP	6.	Opini LKPD	Opini	WTP	WTP
6.	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan	7.	Ranking LPPD	Angka	3,2034	3,2048
7.	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	8.	Jumlah layanan TSP	Unit	11	11

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
8.	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan	9.	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,56	3,71
9.	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur	10.	Nilai SAKIP	Kategori	B	BB
10.	Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN	11.	Indeks Profesionalisme ASN	Poin	0,6	0,64
11.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi serta Manajemen Kinerja dan Disiplin dengan Menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,3	3,24
12.	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur					
13.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan public					
14.	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan					
15.	Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan public					

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
16.	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik					
17.	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum					
18.	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah					

Terdapat 4 indikator dengan kinerja menurun, yaitu Produk hukum daerah yg terbentuk, Pembinaan dan pengembangan aparatur yang terlaksana secara optimal, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selebihnya sebanyak 8 indikator dengan kinerja meningkat (66,67%). Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pada Bidang Hukum dan Aparatur Periode RPJMD ke-3 masih perlu ditingkatkan.

c. Bidang Politik

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-4 tidak ada skala prioritas pada bidang politik. Sedangkan, dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 terdapat arah kebijakan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik. Kinerja arah kebijakan pada bidang politik diukur dengan pencapaian 1 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Politik pada Periode RPJMD ke-4

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
1.	Meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam politik	1.	Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	75,12	Tidak ada pelaksanaan Pemilu Pemilukada

d. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-4, skala prioritas pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peningkatan pelayanan pendidikan, dan kemampuan iptek yang mendukung perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 yang terkait dengan agenda kebijakan periode RPJMD ke-4 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 3 arah kebijakan.

Kinerja arah kebijakan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diukur dengan pencapaian 3 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 35 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Periode RPJMD ke-4

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
1.	Pengujian dan sertifikasi alat produksi	1.	Indeks inovasi daerah	Skor	NA	80,93
2.	Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis	2.	Persentase rekomendasi hasil	%	NA	34,78
3.	Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan		kelitbangan dan inovasi yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah			
		3.	Persentase wirausaha berbasis inovasi, teknologi dan digitalisasi	%	NA	24

e. Bidang Sarana dan Prasarana

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-4, skala prioritas pada bidang sarana dan prasarana adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik, air bersih, perumahan dan pemukiman, dan sarana telekomunikasi dan informasi.
2. Peningkatan rasio elektrifikasi (sudah di atas 95%)

3. Peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih (sudah mencapai 95%)
 4. Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian seperti irigasi, dam, sumur bor, dan jalan usaha tani.
 5. Peningkatan ketersediaan perumahan dan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat
- Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 yang terkait dengan skala prioritas periode RPJMD ke-4 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 10 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang sarana dan prasarana diukur dengan pencapaian 11 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana pada Periode RPJMD ke-4

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
1.	Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis	1.	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	%	96,7	97,04
		2.	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	83,65	84,52
2.	Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern	3.	Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)	%	93,83	99,98
		4.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	1673	1775
3.	Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku	5.	Indeks Aksesibilitas	Poin	74,6	81,31
		6.	Persentase Kemantapan Irigasi	%	50,63	54,5
4.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	7.	Cakupan Air Minum	%	70,48	79,11
		8.	Persentase konektivitas transportasi publik	%	74,76	92

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
5.	Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah	9.	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	56,75	62,3
6.	Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	10.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota	%	73,82	81,83
7.	Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan	11.	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	NA	19,16
8.	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik					
9.	Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pemb.perumahan layak huni					
10.	Diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman					

Terdapat 1 indikator dengan tanpa data dasar tahun 2018, 1 indikator dengan kinerja menurun yaitu Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, dan 9 indikator dengan capaian kinerja meningkat (90%). Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pada Sarana dan Prasarana Periode RPJMD ke-4 sudah baik.

f. Bidang Ekonomi

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-4, skala prioritas pada bidang ekonomi adalah penguatan struktur perekonomian daerah melalui:

- peningkatan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan, sumber daya alam, dan sektor jasa.

- kelembagaan dan pranata ekonomi
- peningkatan pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang mendukung perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi
- pengembangan usaha dan investasi dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 yang terkait dengan agenda kebijakan periode RPJMD ke-4 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 17 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang ekonomi diukur dengan pencapaian 12 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 37 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Ekonomi pada Periode RPJMD ke-4

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
1	Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan	1.	Jumlah Koperasi	Koperasi	4110	4620
		2.	Pengeluaran per Kapita	Rp.	918.119,2	1.197.548
2	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	3.	Persentase Penduduk Miskin	%	14,75	13,68
		4.	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	3,2	3,42
3	Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan Pengembangan produk pertanian	5.	Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan Bijih Logam	%	-4,5	6,95
		6.	Realisasi Investasi PMDN	Rp.	9.972.551.780.172	14.205.757.776.940
4	Meningkatkan kapasitas SDM pertanian	7.	Realisasi Investasi PMA	Rp.	3.552.186.910.956	7.429.012.296.895
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan	8.	Inflasi	%	3,16	6,23
		9.	Nilai Tukar Petani	%	108,37	105,7
		10.	Penerimaan Devisa dari Ekspor	US\$	336.294,82	232.322.051
		11.	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	33,60	43,18

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
6	Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah	12.	Gini Ratio	%	0,372	0,374
7	Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi					
8	Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang-barang kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok					
9	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perdagangan daerah					
10	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan perdagangan daerah					
11	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah					
12	Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal					
13	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata					
14	Meningkatan kualitas atraksi pariwisata					
15	Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan					
16	Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM					
17	Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah					

Terdapat 4 indikator dengan kinerja menurun, yaitu Inflasi, Nilai Tukar Petani, Penerimaan Devisa dari Ekspor, dan Gini Ratio. Selebihnya sebanyak 8 indikator dengan kinerja meningkat (66,67%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Ekonomi Periode RPJMD ke-4 sudah baik.

g. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-4, skala prioritas pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah:

1. Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi sumber daya alam daerah.
2. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2022 yang terkait dengan agenda kebijakan periode RPJMD ke-4 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 15 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup diukur dengan pencapaian 15 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 38 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Periode RPJMD ke-4

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
1.	Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan dalam rangka diversifikasi konsumsi pangan	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	75,16	70,56
		2.	Luas Lahan Kritis	Ha	65.799	490.314
2.	Tanaman padi dan palawija dalam intensifikasi produk SDA berkualitas untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah	3.	Pola Pangan Harapan	Skor	82,8	94,4
		4.	Produksi Padi Sawah	Ton	1.460.801,77	1.456.922,74
		5.	Produksi Jagung	Ton	2.084.929	959.973
3.	Lahan kering dan sawah dalam eksensifikasi produk SDA berkualitas untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah	6.	Produksi Kedelai	Ton	70.933	125.036
		7.	Produksi Bawang Merah	Ton	212.884	203.623,23
		8.	Produksi Cabai	Ton	41.535	22.107,161

Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Tahun	
			2018	2022
	9. Produksi Perikanan Darat	Ton	242.080	958.132,48
	10. Produksi Perikanan Laut	Ton	1.055.240	249.656,93
	11. Banyaknya Bencana Alam	Kasus	14999	48
4. Padi, jagung, kentang, kedelai, kopi, kakao dan jambu mete intensif untuk ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman dan hasil ikutannya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah	12. Populasi sapi	Ekor	1.183.570	1.474.536
	13. Populasi unggas	Ekor	25.473.859	12.867.645
	14. Indeks Resiko Bencana	Poin	136,78	119,83
	15. Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	NA	19,16
5. Komoditi gaharu, ketak, kemiri, madu dan rotan untuk ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah				
6. Komoditas ekspor rumput laut, udang dan kerapu untuk ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk budidaya perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah				
7. Komoditi sapi untuk ekstensifikasi dan intensifikasi ternak untuk meningkatkan				

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
	kemampuan keuangan daerah					
8.	Komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta hasil hutan bukan kayu dalam ekstensifikasi pemasaran produk SDA berkualitas untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah					
9.	Hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta hasil hutan bukan kayu untuk fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah					
10.	Kerajinan industri dan makanan olahan untuk fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah					
11.	Penyiapan bahan baku, olahan dan pemasaran untuk kerjasama ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah					
12.	Masyarakat perkotaan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan SDA dan LH					
13.	Masyarakat kawasan hutan, bantaran sungai, kawasan rawan					

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
	bencana pesisir laut dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan					
14.	Dampak penambangan liar terhadap lingkungan hidup untuk menyediakan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)					
15.	Kawasan Geopark, Kawasan hutan, kawasan bantaran sungai, kawasan rawan bencana, kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, KSP fungsi lindung dan konservasi serta berbagai sumber daya hayati, keanekaragaman hayati dan plasma nutfah untuk mewujudkan LH yang lestari					

Terdapat 1 indikator yang tidak ada data dasar tahun 2018, yaitu persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%) dan 7 indikator dengan capaian kinerja menurun, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, luas lahan kritis, produksi padi sawah, produksi jagung, produksi bawang merah, produksi cabai, dan populasi unggas. Selebihnya sebanyak 7 indikator dengan kinerja meningkat (50%). Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pada Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Periode RPJMD ke-4 masih harus ditingkatkan.

h. Bidang Wilayah dan Tata Ruang

Dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD ke-4, skala prioritas pada bidang wilayah dan tata ruang adalah pengupayaan distribusi infrastruktur pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat yang produktif dan memiliki daya saing.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 yang terkait dengan agenda kebijakan periode RPJMD ke-4 pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 sebanyak 2 arah kebijakan. Kinerja arah kebijakan pada bidang wilayah dan tata ruang diukur dengan pencapaian 2 indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 39 Pencapaian Kinerja Arah Kebijakan Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada Periode RPJMD ke-4

Arah Kebijakan		Indikator		Satuan	Tahun	
					2018	2022
1.	Kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas Kabupaten/Kota untuk rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	1.	Cakupan Penanganan Pelanggaran Tata Ruang	%	100	100
		2.	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang	%	NA	14,54
2.	Aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk perwujudan masyarakat yang sadar tata ruang					

Terdapat 1 indikator tanpa data dasar tahun 2018 dan 1 indikator dengan kinerja meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja arah kebijakan pada Bidang Wilayah dan Tata Ruang Periode RPJMD ke-4 sudah sangat baik.

Kesimpulan pencapaian arah kebijakan periode RPJMD ke-4:

1. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-4 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
 - b. Terdapat 37 indikator kinerja dengan rincian:
 - 28 indikator dengan capaian kinerja meningkat (75,68%)
 - 9 indikator dengan capaian kinerja menurun

2. Bidang Hukum dan Aparatur:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-4 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
 - b. Terdapat 12 indikator kinerja dengan rincian:
 - 8 indikator dengan capaian kinerja meningkat (66,67%)
 - 4 indikator dengan capaian kinerja menurun
3. Bidang Politik:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, tidak terdapat skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-4 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan terdapat arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
 - b. Terdapat 1 indikator kinerja dan tanpa data tahun dasar 2018.
4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-4 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
 - b. Terdapat 3 indikator kinerja dan tanpa data tahun dasar 2018.
5. Bidang Sarana dan Prasarana:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-4 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
 - b. Terdapat 11 indikator kinerja dengan rincian:
 - 1 indikator tanpa data dasar tahun 2018
 - 9 indikator dengan capaian kinerja meningkat (90%)
 - 1 indikator dengan capaian kinerja menurun
6. Bidang Ekonomi:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-4 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
 - b. Terdapat 12 indikator kinerja dengan rincian:
 - 8 indikator dengan capaian kinerja meningkat (66,67%)
 - 4 indikator dengan capaian kinerja menurun

7. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-4 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
 - b. Terdapat 15 indikator kinerja dengan rincian:
 - 1 indikator tanpa data tahun dasar 2018
 - 7 indikator dengan capaian kinerja meningkat (50%)
 - 7 indikator dengan capaian kinerja menurun
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang:
 - a. Terdapat arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada pentahapan di periode RPJMD ke-4 pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
 - b. Terdapat 2 indikator kinerja dengan rincian:
 - 1 indikator tanpa data tahun dasar 2018
 - 1 indikator dengan capaian kinerja meningkat (50%)

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa:

1. Terdapat ketidaksinkronan antara arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada tahapan-tahapan periode RPJMD dalam RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam masing-masing dokumen RPJMD, sebagai berikut:
 - a. Terdapat arah kebijakan bidang Sarana dan Prasarana, dan Wilayah dan Tata Ruang pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, namun tidak terdapat skala prioritas bidang Sarana dan Prasarana, dan Wilayah dan Tata Ruang pada tahapan Periode RPJMD ke-1 (Tahun 2005-2008) dalam RPJPD Tahun 2005-2025 maupun pada arah kebijakan bidang Sarana dan Prasarana, dan Wilayah dan Tata Ruang pada Periode RPJMD Tahun 2003-2008.
 - b. Terdapat arah kebijakan bidang Politik pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, namun tidak terdapat skala prioritas bidang Politik pada tahapan Periode RPJMD ke-2 (Tahun 2009-2013) dalam RPJPD Tahun 2005-2025 maupun pada arah kebijakan bidang Politik pada Periode RPJMD Tahun 2009-2013.

- c. Terdapat arah kebijakan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan wilayah dan tata ruang pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, terdapat pula skala prioritas bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan wilayah dan tata ruang pada tahapan Periode RPJMD ke-2 (Tahun 2009-2013) dalam RPJPD Tahun 2005-2025, namun tidak terdapat arah kebijakan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan wilayah dan tata ruang pada Periode RPJMD Tahun 2009-2013.
 - d. Terdapat arah kebijakan bidang Politik pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, namun tidak terdapat skala prioritas bidang Politik pada tahapan Periode RPJMD ke-3 (Tahun 2014-2018) dalam RPJPD Tahun 2005-2025, namun terdapat arah kebijakan bidang Politik pada Periode RPJMD Tahun 2013-2018.
 - e. Terdapat arah kebijakan bidang Politik pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, namun tidak terdapat skala prioritas bidang Politik pada tahapan Periode RPJMD ke-4 (Tahun 2019-2023) dalam RPJPD Tahun 2005-2025, sementara itu terdapat arah kebijakan bidang Politik pada Periode RPJMD Tahun 2019-2023.
2. Pada periode RPJMD ke-1 Tahun 2003-2008:
- a. Terdapat 56 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:
 1. Empat puluh (42) indikator dengan capaian kinerja meningkat (87,50%):
 - a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama (92,31%), terdiri dari:
 1. Jumlah Satuan Pendidikan
 2. Jumlah SLB
 3. Jumlah TK/RA
 4. Jumlah SD/MI
 5. Jumlah SMP/MTs
 6. Jumlah SMA/MA
 7. Jumlah SMK
 8. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A
 9. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A
 10. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A
 11. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

12. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
 13. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B
 14. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
 15. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C
 16. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C
 17. Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
 18. Indeks Pembangunan Manusia
 19. Jumlah Puskesmas
 20. Jumlah Puskesmas Pembantu
 21. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Sendiri
 22. Tingkat Pengangguran Terbuka
 23. Laju Pertumbuhan Penduduk
 24. Indeks Pembangunan Gender
- b. Bidang Hukum dan Aparatur (100%): Persentase Penyelesaian Tindak Pidana
 - c. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (100%): Website milik Pemerintah Daerah
 - d. Bidang Ekonomi (70%), terdiri dari:
 1. Jumlah Koperasi
 2. Pengeluaran per Kapita
 3. Persentase Penduduk Miskin
 4. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam
 5. Realisasi Investasi PMA
 6. Nilai Tukar Petani
 7. Penerimaan Devisa dari Ekspor
 - e. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (90%), terdiri dari:
 1. Produksi Padi Sawah
 2. Produksi Jagung
 3. Produksi Kedelai
 4. Produksi Cabai
 5. Produksi Perikanan Darat

6. Produksi Perikanan Laut
7. Banyaknya Bencana Alam
8. Populasi Sapi
9. Populasi Unggas
2. Enam (6) indikator dengan capaian kinerja menurun (12,50%):
 - a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama (7,69%), terdiri dari:
 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 2. Jumlah Kriminalitas
 - b. Bidang Ekonomi (30%):
 1. Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan Bijih Logam
 2. Realisasi Investasi PMDN
 3. Inflasi
 - c. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (10%):
Produksi Bawang Merah
3. Delapan (8) indikator dengan tanpa data tahun dasar (NA):
 - a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama, terdiri dari:
 1. Usia Harapan Hidup
 2. Angka Kematian Bayi
 3. Angka Kematian Ibu Melahirkan
 4. Rata-Rata Usia Kawin Pertama
 - b. Bidang Hukum dan Aparatur: Kerugian Daerah dan Kewajiban Setor Terhadap APBD
 - c. Bidang Politik: Pemilu yang Bebas dan Adil
 - d. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Luas Lahan Kritis
3. Pada periode RPJMD ke-2 Tahun 2009-2013:
 - a. Terdapat 75 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:
 1. Empat puluh delapan (48) indikator dengan capaian kinerja meningkat (73,85%):
 - a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama (83,87%), terdiri dari:
 1. Jumlah Satuan Pendidikan
 2. Jumlah SLB
 3. Jumlah TK/RA

4. Jumlah SD/MI
5. Jumlah SMP/MTs
6. Jumlah SMA/MA
7. Jumlah SMK
8. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A
9. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A
10. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
11. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
12. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B
13. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
14. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C
15. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C
16. Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
17. Usia Harapan Hidup
18. Angka Kematian Bayi
19. Angka Kematian Ibu Melahirkan
20. Jumlah Puskesmas
21. Jumlah Puskesmas Pembantu
22. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Sendiri
23. Tingkat Pengangguran Terbuka
24. Laju Pertumbuhan Penduduk
25. Indeks Pembangunan Gender
26. Rata-Rata Usia Kawin Pertama
- b. Bidang Hukum dan Aparatur (100%):
 1. Kerugian Daerah dan Kewajiban setor terhadap APBD
 2. Pendataan Tanah-Tanah Terlantar dan Penetapan Status Tanah
 3. Opini LKPD
 4. Jumlah Layanan TSP
- c. Bidang Sarana dan Prasarana (62,50%):
 1. Tingkat Kemantapan Jalan Nasional
 2. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi
 3. Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)

4. Cakupan layanan air bersih Perkotaan
5. Cakupan layanan air bersih Perdesaan
- d. Bidang Ekonomi (45,45%), terdiri dari:
 1. Jumlah Koperasi
 2. Pengeluaran per Kapita
 3. Persentase Penduduk Miskin
 4. Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan Bijih Logam
 5. Realisasi Investasi PMDN
- e. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (72,73%), terdiri dari:
 1. Luas Lahan Kritis
 2. Produksi Padi Sawah
 3. Produksi Jagung
 4. Produksi Bawang Merah
 5. Produksi Perikanan Darat
 6. Produksi Perikanan Laut
 7. Populasi Sapi
 8. Populasi Unggas
2. Tujuh Belas (17) indikator dengan capaian kinerja menurun (26,15%):
 - a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama (16,13%), terdiri dari:
 1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A
 2. Rata-Rata Lama Sekolah
 3. Indeks Pembangunan Manusia
 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 5. Jumlah Kriminalitas
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana (37,50%):
 1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
 2. Cakupan Layanan Sanitasi Perkotaan
 3. Cakupan Layanan Sanitasi Perdesaan
 - c. Bidang Ekonomi (54,55%):
 1. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam
 2. Realisasi Investasi PMA
 3. Inflasi

4. Nilai Tukar Petani
5. Penerimaan Devisa dari Ekspor
6. Gini Ratio
- d. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (27,27%):
 1. Produksi Kedelai
 2. Produksi Cabai
 3. Banyaknya Bencana Alam
6. Sepuluh (10) indikator dengan tanpa data tahun dasar/NA:
 - a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama:
 1. Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenristek Dikti (Negeri+Swasta)
 2. Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenag (Negeri+Swasta)
 3. Harapan Lama Sekolah
 - b. Bidang Hukum dan Aparatur:
 1. Produk Hukum Daerah yang Terbentuk
 2. Pelatihan Aparatur Pengawas
 3. Ranking LPPD
 4. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang Terlaksana Secara Optimal
 5. Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
 - c. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 2. Pola Pangan Harapan
4. Pada periode RPJMD ke-3 Tahun 2013-2018:
 - a. Terdapat 83 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:
 1. Enam puluh dua (62) indikator dengan capaian kinerja meningkat (83,78%):
 - a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama (87,88%), terdiri dari:
 1. Jumlah Satuan Pendidikan
 2. Jumlah SLB
 3. Jumlah TK/RA
 4. Jumlah SD/MI
 5. Jumlah SMP/MTs

6. Jumlah SMA/MA
7. Jumlah SMK
8. Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenag (Negeri+Swasta)
9. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A
10. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A
11. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A
12. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
13. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
14. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B
15. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
16. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C
17. Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
18. Rata-Rata Lama Sekolah
19. Indeks Pembangunan Manusia
20. Usia Harapan Hidup
21. Angka Kematian Bayi
22. Angka Kematian Ibu Melahirkan
23. Jumlah Puskesmas
24. Jumlah Puskesmas Pembantu
25. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Sendiri
26. Tingkat Pengangguran Terbuka
27. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
28. Indeks Pembangunan Gender
29. Jumlah Kriminalitas
- b. Bidang Hukum dan Aparatur (100%):
 1. Indeks Reformasi Birokrasi
 2. Produk Hukum Daerah yang Terbentuk
 3. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang Terlaksana Secara Optimal
 4. Pendataan tanah-tanah terindikasi terlantar dan penetapan status tanah. Tertibnya regulasi perijinan yang diberikan (Kab/Kota)

5. Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
6. Opini LKPD
7. Ranking LPPD
8. Jumlah Layanan TSP
9. Indeks Profesionalisme ASN
- c. Bidang Politik (100%): Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik
- d. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (100%): Aplikasi SIP-PPID Provinsi NTB dan Kab/Kota se NTB yang terbangun
- e. Bidang Sarana dan Prasarana (75%):
 1. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi
 2. Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)
 3. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
- f. Bidang Ekonomi (63,64%), terdiri dari:
 1. Jumlah Koperasi
 2. Pengeluaran per Kapita
 3. Persentase Penduduk Miskin
 4. Realisasi Investasi PMDN
 5. Realisasi Investasi PMA
 6. Inflasi
 7. Nilai Tukar Petani
- g. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (76,92%), terdiri dari:
 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 2. Luas Lahan Kritis
 3. Pola Pangan Harapan
 4. Produksi Jagung
 5. Produksi Bawang Merah
 6. Produksi Cabai
 7. Produksi Perikanan Darat
 8. Produksi Perikanan Laut
 9. Populasi Sapi
 10. Populasi Unggas

- h. Bidang Wilayah dan Tata Ruang (100%), terdiri dari:
 1. Cakupan Penanganan Pelanggaran Tata Ruang
 2. Rencana Detil Kawasan Strategis Provinsi
2. Sepuluh (10) indikator dengan capaian kinerja menurun (13,51%):
 - a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama (6,06%):
 1. Laju Pertumbuhan Penduduk
 2. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana (25%): Tingkat Kemantapan Jalan Nasional
 - c. Bidang Ekonomi (36,36%):
 1. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam
 2. Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan Bijih Logam
 3. Penerimaan Devisa dari Ekspor
 4. Gini Ratio
 - d. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (23,08%):
 1. Produksi Padi Sawah
 2. Produksi Kedelai
 3. Banyaknya Bencana Alam
3. Satu (1) indikator dengan capaian kinerja tetap (3,03%):
 Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama: Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenristek Dikti (Negeri+Swasta)
4. Sembilan (9) indikator dengan tanpa data tahun dasar (NA):
 - a. Bidang Hukum dan Aparatur:
 1. Indeks Pelayanan Publik
 2. Nilai SAKIP
 3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana:
 1. Indeks Aksesibilitas
 2. Persentase Kemantapan Irigasi
 3. Cakupan Air Minum
 4. Persentase konektivitas transportasi publik
 5. Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)

6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota

5. Pada periode RPJMD ke-4 Tahun 2019-2023:

a. Terdapat 93 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Enam puluh satu (61) indikator dengan capaian kinerja meningkat (70,93%):

a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama (73,68%), terdiri dari:

1. Indeks Pendidikan
2. Jumlah Satuan Pendidikan
3. Jumlah SLB
4. Jumlah SD/MI
5. Jumlah SMP/MTs
6. Jumlah SMA/MA
7. Jumlah SMK
8. Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenag (Negeri+Swasta)
9. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A
10. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
11. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B
12. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
13. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C
14. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C
15. Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
16. Rata-Rata Lama Sekolah
17. Indeks Pembangunan Manusia
18. Usia Harapan Hidup
19. Jumlah Puskesmas
20. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Sendiri
21. Tingkat Pengangguran Terbuka
22. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
23. Indeks Pembangunan Gender
24. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan
25. Desa Tangguh Bencana

26. Indeks Risiko Bencana
 27. Persentase Balita Stunting
 28. Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak
- b. Bidang Hukum dan Aparatur (66,67%):
1. Indeks Reformasi Birokrasi
 2. Pendataan tanah-tanah terindikasi terlantar dan penetapan status tanah. Tertibnya regulasi perijinan yang diberikan (Kab/Kota)
 3. Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
 4. Opini LKPD
 5. Ranking LPPD
 6. Jumlah Layanan TSP
 7. Nilai SAKIP
 8. Indeks Profesionalisme ASN
- c. Bidang Sarana dan Prasarana (90%):
1. Tingkat Kemantapan Jalan Nasional
 2. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi
 3. Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)
 4. Indeks Aksesibilitas
 5. Persentase Kemantapan Irigasi
 6. Cakupan Air Minum
 7. Persentase Konektivitas Transportasi Publik
 8. Cakupan Rumah Layak Huni
 9. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota
- d. Bidang Ekonomi (66,67%), terdiri dari:
1. Jumlah Koperasi
 2. Pengeluaran per Kapita
 3. Persentase Penduduk Miskin
 4. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam
 5. Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertambangan Bijih Logam
 6. Realisasi Investasi PMDN

7. Realisasi Investasi PMA
8. Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD
- e. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (50,00%), terdiri dari:
 1. Pola Pangan Harapan
 2. Produksi Kedelai
 3. Produksi Perikanan Darat
 4. Produksi Perikanan Laut
 5. Banyaknya Bencana Alam
 6. Populasi Sapi
 7. Indeks Risiko Bencana
- f. Bidang Wilayah dan Tata Ruang (100%): Cakupan Penanganan Pelanggaran Tata Ruang
2. Dua puluh enam (26) indikator dengan capaian kinerja menurun (29,89%):
 - a. Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama (26,32%):
 1. Jumlah TK/RA
 2. Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kemenristek Dikti (Negeri+Swasta)
 3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A
 4. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A
 5. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
 6. Angka Kematian Bayi
 7. Angka Kematian Ibu Melahirkan
 8. Jumlah Puskesmas Pembantu
 9. Laju Pertumbuhan Penduduk
 10. Jumlah Kriminalitas
 - b. Bidang Hukum dan Aparatur (33,33%):
 1. Produk hukum daerah yg terbentuk
 2. Pembinaan dan pengembangan aparatur yang terlaksana secara optimal
 3. Indeks Pelayanan Publik
 4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- c. Bidang Sarana dan Prasarana: Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
 - d. Bidang Ekonomi (33,33%):
 - 1. Inflasi
 - 2. Nilai Tukar Petani
 - 3. Penerimaan Devisa dari Ekspor
 - 4. Gini Ratio
 - e. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (50,00%):
 - 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - 2. Luas Lahan Kritis
 - 3. Produksi Padi Sawah
 - 4. Produksi Jagung
 - 5. Produksi Bawang Merah
 - 6. Produksi Cabai
 - 7. Populasi Unggas
5. Tujuh (7) indikator dengan tanpa data tahun dasar (NA) atau tanpa data capaian:
- a. Bidang Politik: Partisipasi Masyarakat Dalam Politik
 - b. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 1. Indeks Inovasi Daerah
 - 2. Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dan inovasi yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah
 - 3. Persentase wirausaha berbasis inovasi, teknologi dan digitalisasi
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana: Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi
 - d. Bidang Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi
 - e. Bidang Wilayah dan Tata Ruang: Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang
6. Pencapaian kinerja dengan status meningkat sebanyak 42 indikator (87,50%) pada periode RPJMD ke-1 Tahun 2003-2008, 48 indikator (73,85%) pada periode RPJMD ke-2 Tahun 2009-2013, 62 indikator (83,78%) pada periode

RPJMD ke-3 Tahun 2013-2018, dan 61 indikator (70,11%) pada periode RPJMD ke-4 Tahun 2019-2023.

7. Pencapaian kinerja dengan status menurun sebanyak 6 indikator (12,50%) pada periode RPJMD ke-1 Tahun 2003-2008, 17 indikator (26,15%) pada periode RPJMD ke-2 Tahun 2009-2013, 11 indikator (14,86%) pada periode RPJMD ke-3 Tahun 2013-2018, dan 26 indikator (29,89%) pada periode RPJMD ke-4 Tahun 2019-2023.
8. Pencapaian kinerja dengan status tetap sebanyak 1 indikator (3,03%) hanya pada periode RPJMD ke-3 Tahun 2013-2018.

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

RPJPD Provinsi NTB 2005-2025 yang bersifat kualitatif sehingga pengukuran pencapaian kinerja menggunakan pendekatan pencapaian pada beberapa indikator makro yang secara implisit disebutkan dalam RPJPD tersebut serta dengan pendekatan pencapaian rata-rata pada pentahatapan RPJMD dan arah kebijakan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian dalam 4 (empat) periode RPJMD yaitu periode 2003-2008, periode 2009-2013, periode 2013-2018, dan periode 2019-2023 maka dapat rata capaiannya sebesar 74,4% berdasarkan tingkat ketercapaian indikator dari target akhir, sedangkan tingkat capaiannya sebesar 105,27% dengan predikat **SANGAT TINGGI**. Tingginya capaian itu dipengaruhi oleh seberapa besar capaian dari indikator-indikator kinerja jauh melampaui dari yang ditargetkan. Keberhasilan dalam pencapaian yang sangat tinggi ini didukung oleh berbagai faktor pendorong. Namun demikian, meskipun capaian kinerja tinggi juga diwarnai dengan beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis dari data dan informasi yang telah dikumpulkan, faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

I. Periode RPJMD Tahun 2003-2008

Pada periode ini berbagai peluang dan tantangan dihadapi daerah diantaranya menguatnya tuntutan reformasi dan adanya komitmen politik untuk menerapkan otonomi daerah yang memberi kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah, termasuk bagi daerah Nusa Tenggara Barat untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera yang didukung oleh prinsip-prinsip moralitas yang kuat. Globalisasi dan otonomi daerah yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar negara dan daerah dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya lokal untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Untuk menghadapi hal tersebut, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat telah menggeser dan memberi perhatian pada pengembangan paradigma baru

pembangunan, yaitu paradigma administrasi publik dan paradigma baru pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah yang selama ini berperan dominan selaku dan pendorong utama pembangunan melalui instrumen kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting), harus mampu digeser perannya sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator.

Secara geografis, letak geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada posisi sangat strategis dalam simpul pengembangan ekonomi Kawasan timur Indonesia. Selain itu, potensi sumber daya alam yang dimiliki Nusa Tenggara Barat merupakan potensi ekonomi yang sangat potensial menghasilkan produk barang dan jasa yang memiliki keunggulan yang komparatif maupun kompetitif. dari aspek sosial, Nusa Tenggara Barat juga memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dan keanekaragaman sumberdaya sosial, yang memiliki daya saing tinggi dan memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Beberapa sektor unggulan pembangunan daerah telah memberikan kontribusi nyata. Sektor unggulan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah telah menjadi perhatian Pemerintah daerah. Secara makro pencapaian pembangunan pada periode 2003-2028 terutama pada sektor ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi dengan tidak memperhitungkan Sektor Pertambangan mencapai lebih dari 6%. Tingginya pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan pada Komoditi Produk Jasa Usaha (KPJu) Unggulan, terdapat 10 KPJu unggulan lintas sektor di Provinsi NTB, yaitu: (1) Padi Sawah, (2) Sapi, (3) Jambu Mete, (4) Kelapa, (5) Anyaman Bambu dan Tenun Gedogan, (6) Angkutan Pedesaan, (7) Konveksi/ Penjahit, (8) Usaha Dagang, (9) Restoran/Penginapan, dan (10) Budidaya Rumput Laut dan Ikan Kerapu.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, juga telah mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini tampak dari realisasi capaian indikator kinerja pada masing-masing program kegiatan setiap bidang urusan selama periode 2003-2008. Proses penyelenggaraan berbagai program kegiatan pembangunan di Provinsi NTB memberikan ruang bagi berkembangnya partisipasi masyarakat dan para pemangku amanah lainnya. Hal ini sebagai wujud sinergi antara aktivitas masyarakat dengan pemerintah daerah dan adanya perhatian pemerintah yang mendukung percepatan untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Disamping itu, peran aktif para anggota DPRD Provinsi NTB dalam ikut mengawal disetiap tahapan

pembangunan menjadi sumbangsih besar dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTB.

Harmoni kebersamaan yang tercipta dari wujud sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara eksekutif, legislatif, masyarakat serta Pemerintah kabupaten/kota tercermin dari semakin kondusifnya situasi daerah bagi investasi. Indikator dari terciptanya hubungan yang harmonis antar Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten adalah ditandatanganinya MoU antar Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam bidang pendidikan.

Secara sektoral, terdapat beberapa faktor pendorong dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah diantaranya pada sektor Pendidikan, dalam mendorong peningkatan partisipasi sekolah, kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga swasta dan masyarakat terutama dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas keaksaraan fungsional, peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru, serta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa miskin sampai dengan tingkat SMA/MA/SMK melalui budget sharing antara Pemerintah, provinsi dan kabupten/kota. Pembangunan/reabilitasi sarana dan prasarana pendidikan khususnya SMK Mengembangkan program keahlian pada SMK yang ada. Pada sektor kesehatan, adanya pengembangan Desa Siaga Model, peningkatan jumlah bidan desa melalui PTT pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Pelatihan Desa Siaga, Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Desa Siaga, Pemberian bantuan Beasiswa pendidikan tenaga yang dibutuhkan melalui kerjasama NGO, pemerintah, dan pemerintah daerah, peningkatan insentif bagi tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pengembangan desa mandiri pangan, peningkatan kerjasama dengan NGO dalam penanggulangan masalah gizi, peningkatan program revitalisasi Posyandu, Desa Siaga dan operasi sadar gizi, serta peningkatan program promosi kesehatan khususnya PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), dan upaya percontohan dari pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam PHBS.

II. Periode RPJMD Tahun 2009-2013

Pada periode ini, tingkat ketercapaian indikator sesuai target akhir pada tahun 2013 mencapai 72,63% dengan tingkat capaian kinerja sangat tinggi mencapai 156,37%. Tingginya tingkat capaian ini terutama dipengaruhi banyaknya indikator

kinerja jauh melampaui target diakhir periode RPJMD pada tahun 2013. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor pendorong dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi NTB. Pada bidang Pendidikan dengan memberikan Beasiswa Siswa Miskin (BSM), selama kurun waktu 2009-2013 sekurangnya 499.364 siswa miskin kepada seluruh jenjang pendidikan, dari SD sebanyak 217.919 siswa, SLTP 163.390 siswa dan SMA sederajat negeri ataupun swasta sebanyak 118.005 siswa. Pemberian beasiswa siswa miskin dilaksanakan dengan pola sharing anggaran antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sedikitnya 30 hingga 40 persen anak usia sekolah dari SD hingga SMA sederajat di provinsi NTB telah menerima manfaat dari BSM tersebut. Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah provinsi telah memberikan beasiswa kepada 6.634 mahasiswa S1, mahasiswa S2 sebanyak 298 dan mahasiswa S3 sebanyak 59 orang.

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pemerintah telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang memberikan pelayanan persalinan gratis bagi ibu melahirkan di Puskesmas dan Rumah Sakit milik pemerintah dan swasta serta menetapkan anggaran pelayanan kesehatan gratis bagi 301.176 warga miskin yang belum terjangkau Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas). Disamping itu, pemerintah provinsi juga melakukan sejumlah intervensi kebijakan untuk menekan kematian ibu dan anak, buta aksara dan drop out yang lebih dikenal dengan Gerakan 3-A yaitu AKINO (Angka Kematian Ibu dan Anak Nol), ABSANO (Angka Buta Aksara Nol) dan ADONO (Angka Drop Out Nol), dengan melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan para camat, desa/kelurahan guna mengawasi pelaksanaan gerakan AKINO tersebut. Bahkan pemenuhan 100 persen Bidan Desa secara bertahap dan meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) NTB yang memberikan pelayanan persalinan gratis bagi ibu melahirkan di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah.

Pada aspek ekonomi, terdapat beberapa terobosan untuk mewujudkan target pembangunan di tahun 2013 yaitu pada bidang pariwisata, dengan Pencanangan *Visit Lombok- Sumbawa* dengan Target kunjungan wisatawan sejumlah 1 juta orang. Pada bidang pertanian, melalui revitalisasi penyuluh pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan dan perikanan, Pencanangan NTB sebagai **Provinsi Bumi Sejuta Sapi**, serta pemerintah provinsi NTB berkomitmen untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan dalam bentuk penciptaan wirausaha baru yang berbasis ekonomi kerakyatan sebanyak 100.000 wirausaha baru melalui pembentukan Pokja

penumbuhan WUB baik di tingkat Provinsi, kabupaten/kota, melaksanakan kegiatan yang menunjang program WUB seperti bintek wub, bantuan modal usaha, mencetak kader penggerak wub di 116 kecamatan, kemitraan dengan BUMN untuk meningkatkan ketrampilan dan Kabupaten; melakukan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota, serta bantuan peralatan usaha.

III. Periode RPJMD Tahun 2013-2018

Pada periode ini, tingkat capaian kinerja sangat tinggi mencapai 140,65%. Tingginya tingkat capaian ini terutama dipengaruhi banyaknya indikator kinerja jauh melampaui target diakhir periode RPJMD pada tahun 2018. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai factor pendorong dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi NTB. Untuk mendukung pencapaian pada misi pertama yaitu Mempercepat perwujudan masyarakat yang berakarakter, telah dilakukan terobosan melalui Gerakan Membangun Masyarakat Agamis, Jujur dan Damai yang diharapkan dapat menurunkan kasus konflik sosial serta meningkatnya Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah.

Upaya pencegahan yang dilakukan bersama seluruh elemen masyarakat guna meredam terjadinya konflik sosial akibat adanya gerakan atau isu yang berpotensi konflik. Keberhasilan dalam menurunkan jumlah konflik dilakukan dengan mitra Bakesbangpoldagri khususnya FKDM, dan Jejaring Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) NTB. Tindakan yang telah dilakukan untuk meredam dan meminimalisir potensi konflik dengan melakukan mediasi antar warga kampung yang berkonflik maupun yang berpotensi terjadinya konflik terutama di daerah-daerah yang dipetakan rawan konflik. adanya peran Mitra Kerja Bakesbangpoldagri seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jejaring, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) untuk mendeteksi dan cegah dini setiap potensi konflik yang ada di lapangan, serta adanya koordinasi yang intensif dengan semua Kesbangpol seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mencegah lebih dini potensi konflik maupun untuk mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi. Sementara itu, dalam upaya peningkatan capaian pendidikan karakter dan nilai budaya lokal pada sekolah dan madrasah yaitu menyelesaikan proses lahirnya

kurikulum muatan lokal yang didalamnya termuat akhlaq mulia dan budaya lokal disekolah dan madrasah dalam bentuk Peraturan Gubernur NTB dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam program peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam hal pendidikan karakter dan penerapan nilai budaya lokal di sekolah.

Pada misi kedua yaitu mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan, dengan terobosan Gerakan Masyarakat Sadar Wisata dan Budaya. Dengan Gerakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan di NTB. Dengan mengusung branding *Pesona Lombok Sumbawa* sebagai turunan dari program pusat dalam pembangunan pariwisata Indonesia yaitu "*Pesona Indonesia*". Memaksimalkan potensi budaya, alam serta karakter masyarakat yang religius merupakan modal yang kuat untuk pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Gelar Destinasi Pariwisata Halal yang telah disandang Nusa Tenggara Barat, semakin memperkuat arah pengembangan Pariwisata Nusa Tenggara Barat.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kunjungan wisatawan adalah:

a. Pemulihan A3, yaitu Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi

Dengan melakukan perbaikan pada pintu-pintu masuk wisatawan yaitu Teluk Nara, Dermaga Gili trawangan, Dermaga Publik Senggigi, Pelabuhan Bangksa, dan Dermaga Gili Air;

b. Pemulihan SDM Kepariwisata

Program Trauma Healing merupakan program untuk memulihkan kembali mental pekerja pariwisata dan masyarakat ke kondisi normal.

c. Pemulihan Pemasaran (BAS)

Mengikutsertakan industri pariwisata Lombok dalam kegiatan farmtrip, event, dan roadshow di dalam dan luar negeri.

Pada misi ketiga yaitu melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan dengan terobosan NTB MELAYANI melalui E-PUBLIK, RKPD Online, NTB Satu data, dan *Desk Pelayanan Publik*. Dengan mengoptimalkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan melakukan Penyelesaian pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu tindakan *preventif non*

yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pencegahan tindak kriminal dan perlindungan masyarakat bukanlah pekerjaan mudah, kerjasama dan keikutsertaan semua pihak dalam mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman mutlak diperlukan.

Sementara itu, dalam mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat, dengan dukungan dan kerjasama dengan DPRD dalam pembinaan Partai Politik. Dampak langsung yang diharapkan dari pembinaan partai politik adalah terwujudnya Partai Politik yang professional sehingga dapat menginspirasi partisipasi masyarakat.

Pada periode ini juga, pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan, hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kebijakan reformasi birokrasi yang efisien, efektif, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Program NTB *Online* merupakan satu model implementasi sistem *e-government* (e-gov), dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas layanan publik, transparansi dan pencegahan korupsi maupun mendukung manajemen pengambilan keputusan oleh pimpinan, yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, dengan sasaran tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pada misi keempat yaitu Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing dengan terobosan NTB SEHAT DAN CERDAS melalui Aksi Seribu Hari Kehidupan. Penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan dalam panti dan pendekatan diluar panti. Dengan dukungan sumber dana APBD dan APBN serta kolaborasi dari berbagai pihak penanganan PMKS melalui sumber dana APBD dapat menangani 13.773 jiwa PMKS (2,09%) dan melalui sumber dana APBN dapat menangani 133.861 jiwa PMKS (20,33%).

Adapun untuk memenuhi sanitasi dasar yang diukur dari cakupan jamban keluarga dimana dititikberatkan pada akses penggunaan jamban keluarga dilakukan dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan melibatkan tokoh agama, da'i kesehatan, tokoh masyarakat, untuk merubah perilaku masyarakat

menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan yang telah mencapai BASNO, mendorong penyusunan awig-awig atau peraturan desa bagi desa yang telah mendeklarasikan Desa BASNO sehingga PHBS tetap terjaga, melakukan penilaian Lomba Bersih dan Sehat (LBS) bekerja sama dengan TP PKK, koordinasi lintas sektor khususnya dengan DPMPD, PU, BAPPEDA dalam program rehabilitasi rumah, pemukiman kumuh dan pembangunan MCK Komunal, serta adanya kerjasama dengan Ormas, NGO dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Sementara itu untuk mewujudkan kualitas kesehatan ibu dan anak, dilakukan pemberian suplemen gizi dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita gizi kurang dan gizi buruk serta ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), adanya konseling/penyuluhan gizi bagi keluarga khususnya pada kelompok rawan gizi (ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita), adanya dukungan dan kerjasama lintas sektor terkait seperti TP PPK, BP3AKB, BPMPD, Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB, Organisasi Profesi (PERSAGI, IDI, IBI), TOMA, TOGA, Forum Peduli ASI (FPA), Bappeda, Biro Administrasi Kesra, Biro Hukum, dan lainnya dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan pada sasaran prioritas seperti pengasuh balita yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/KEK, ibu menyusui dll.

Pada misi kelima yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan dan mengembangkan keunggulan daerah, dengan terobosan Gerakan Membangun Masyarakat Sejahtera. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan terus meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang baru untuk mengatasi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif, dengan melakukan pengendalian inflasi melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Provinsi NTB bekerjasama dengan TPID Kota Mataram dengan melaksanakan operasi pasar terpadu khususnya bahan kebutuhan pokok masyarakat pada saat tingginya permintaan masyarakat menjelang hari-hari besar keagamaan seperti bulan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul fitri. Pengendalian harga ini dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Dalam rangka mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di NTB telah didukung oleh adanya sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan baik lintas Kabupaten/Kota maupun lintas Perangkat Daerah melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial)

sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Wakil Gubernur NTB selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi NTB dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku TKPKD Kabupaten/Kota. Disamping itu, juga dilakukan dengan mendorong pemenuhan konsumsi pangan yang tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi yang juga kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang. Untuk itu, ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang sudah dikhtiarkan dalam upaya peningkatan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat melalui pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui pengembangan Vertikultur tanaman sayuran, dan pengembangan Outlet Pangan Lokal, serta promosi produk olahan pangan lokal melalui event pameran.

Pada misi keenam yaitu Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang dengan terobosan Gerakan Membangun Sarpras Aman dan Lancar. Upaya untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas terutama infrastruktur jalan dilakukan dengan mendorong melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Preservasi Infrastruktur Jalan Provinsi Melalui Hibah Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, sehingga meningkatkan kemantapan jalan dari 67,56% pada tahun 2013 menjadi 83,62% tahun 2018. Sedangkan untuk memenuhi akses listrik rumah tangga, telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang bersumber dari dana APBD, APBN, dukungan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta swasta yang memiliki usaha di bidang ketenagalistrikan. Sampai tahun 2018 peningkatan Rasio Elektrifikasi mencapai sebesar 84,55 persen sedangkan dari Non PLN (EBT) dicapai sebesar 1,56 persen. Sementara itu, peningkatan capaian pelayanan sistem penyediaan prasarana dan sarana air bersih (SPAM) pada setiap tahunnya bersumber dari anggaran APBN (untuk perkotaan) terus meningkat. Adapun terkait penyediaan Rumah Layak Huni merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam penyediaan papan. Berkenaan dengan hal itu diperlukan program

inovasi dengan menggerakkan para pihak dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pada seluruh tingkatan untuk mengambil bagian dalam rangka mewujudkan masyarakat miskin agar dapat menempati Rumah Yang Layak Huni (RLH) melalui Pendekatan Partisipatif Berbasis Pemberdayaan masyarakat. Maka dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor perumahan dan permukiman Pemerintah Provinsi NTB melalui OPD Teknis melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan dan Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (RLH) yang pendanaan bersumber dari APBD Provinsi NTB.

Dalam rangkai meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi di Provinsi NTB, Dinas Perhubungan berkerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI membuka layanan angkutan perintis baik angkutan darat maupun angkutan laut. Angkutan perintis merupakan angkutan yang melayani daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani transportasi secara memadai dan layanan ini juga memiliki tarif yang terjangkau

Pada misi ketujuh yaitu Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan terobosan Sadar Lingkungan dan Siaga Bencana. Untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup diantaranya melakukan Bimbingan teknis dan pemberian bantuan kepada 54 bank sampah, mendirikan TPA Regional di kawasan hutan, serta pengolahan sampah organik berbasis teknologi biokonversi. Sementara itu, untuk meningkatkan tutupan lahan dan pengurangan lahan kritis, telah dilakukan penguatan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB yang terdiri dari Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati NTB. Sedangkan untuk melindungi mata air agar tidak menyusut sebanyak 438 titik, upaya yang dilakukan untuk melalui beberapa kegiatan antara lain Perlindungan Mata Air, Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air dan Pengamanan kawasan hulu melalui Patroli rutin. Kegiatan perlindungan mata air dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk turut serta melaksanakan perlindungan dan pemanfaatan mata air yang ada di sekitar wilayah mereka. Masyarakat ditingkatkan kesadarannya melalui pembinaan kelompok-kelompok Perlindungan Mata Air (PERMATA).

IV. Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Pada periode ini, tingkat ketercapaian indikator sesuai target akhir pada tahun 2023 mencapai 45,1% dengan menggunakan data capaian tahun 2022, tetapi jika dibandingkan dengan target 2022 mencapai 70,27% dengan tingkat capaian kinerja sangat tinggi mencapai 122,28%. Tingginya tingkat capaian ini terutama dipengaruhi banyaknya indikator kinerja jauh melampaui target diakhir periode RPJMD pada tahun 2013. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor pendorong dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi sebagai berikut:

Pada Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah, yang diindikasikan dengan meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana, meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah, dan meningkatnya konektivitas antar wilayah. Pencapaian ini didorong oleh adanya dukungan dan komitmen Bupati dan Walikota serta kepala Desa untuk mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana, adanya dukungan dan komitmen Bupati dan Walikota serta kepala Desa untuk mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana, adanya peran Forum PRB sebagai wadah koordinasi lintas sector, adanya peraturan daerah tentang percepatan peningkatan kemantapan jalan tahun majemuk dengan dukungan anggaran lebih Rp. 700 miliar, adanya dukungan peningkatan kemantapan jalan dan irigasi melalui Dana Alokasi Khusus, adanya penambahan 2 (dua) rute angkutan yakni 1 (satu) rute angkutan perintis yaitu rute Terminal Mandalika-Leweng dan 1 (satu) rute angkutan KSPN dengan rute BIZAM – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal dan rute angkutan laut 1 (satu) rute angkutan Bali – Tawun sehingga rute angkutan darat dan laut menjadi 144 rute.

Pada Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi, yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meningkatnya Profesionalisme ASN, dan meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian ini didorong oleh adanya komitmen pemerintah provinsi NTB untuk melakukan reformasi birokrasi dengan ditetapkannya rencana aksi reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN, Bebas dari salah saji materil (akuntansi), dengan menerapkan SAP (standar Akuntansi

Pemerintahan) , Sistem Pengendalian Internal berjalan dengan baik, Pengungkapan laporan keuangan sangat jelas (penatausahaan aset di semua OPD), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-Undangan, adanya peningkatan Obyek dan wajib pajak, adanya penurunan dana transfer pusat yang bersumber dari dana DAK, adanya dukungan dan komitmen semua kepala perangkat daerah untuk meingkatkan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah, Semakin meningkatnya tingkat disiplin dan kinerja ASN lingkup Pemprov NTB, serta adanya komitmen pemerintah provinsi NTB untuk melakukan reformasi birokrasi dengan ditetapkannya rencana aksi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Pada Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah, yang diindikasikan dengan meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dan meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan. Pencapaian ini didorong oleh Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terus meningkat setiap tahunnya, Pola hidup sehat masyarakat terus meningkat yang ditandai dengan penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang telah mencapai 100%, adanya Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait seperti TP PPK, DP3AP2KB, DPMPD Dukcapil, Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB, Organisasi Profesi (PERSAGI, IDI, IBI dll), TOMA, TOGA, Forum Peduli ASI (FPA), dan lainnya dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan pada sasaran prioritas seperti pengasuh balita yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/KEK, dan ibu menyusui, semakin meningkatnya amino masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pendidikan, serta adanya pembebasan biaya pendidikan kepada peserta didik miskin atau tidak mampu pemegang KIP melalui layanan PIP

Pada Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, yang diindikasikan dengan meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan meningkatnya Pengelolaan Persampahan. Pencapaian ini didorong oleh menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan, meningkatnya kualitas udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien, adanya penyusunan dan penertiban ruang darat laut sesuai rencana tata ruang, penerapan baku mutu, daya dukung dan daya tampung, perizinan pembuangan limbah cair ke laut, pengelolaan

B3 dan limbah B3, pengelolaan sampah, command and control, koordinasi para pihak dalam peningkatan kualitas air laut, sosialisasi dan edukasi, pelebagaan masyarakat lokal dan sampai kepada insentive dan disinsentive, adanya pendampingan dan pembinaan terhadap 486 desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, adanya reward dan punishment dalam pengelolaan lingkungan dalam bentuk regulasi pengelolaan lingkungan, adanya pembentukan Bank Sampah sebanyak 492 unit di NTB dan didorong untuk mengolah sampah 321 indicat, adanya dukungan berbagai pihak dalam penanganan persampahan mulai perusahaan, perguruan tinggi, dan NGO terkait, adanya penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office), adanya Gerakan nol sampah di setiap event yang diselenggarakan di NTB, baik skala nasional hingga internasional, serta adanya PILSADAR (Pilah Sampah Dari Rumah).

Pada Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, yang diindikasikan dengan meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha), meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas, meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin, meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin, terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatnya daya saing pariwisata, meningkatnya daya saing industri, dan menurunnya pengangguran terbuka. Pencapaian ini didorong oleh adanya Bantuan program Keluarga Harapan bagi masyarakat miskin, danya operasi pasar (pasar murah) untuk menstabilkan harga, adanya event-event international yang terus bertambah di NTB mendorong investor baru untuk berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan yang baru di NTB, sektor pertanian, perikanan & kehutanan masih menjadi sektor utama dalam perekonomian NTB, adanya gerakan multi pihak yang secara bersama-sama menangani kemiskinan, adanya program Jamkesmas, PKH dan Bantuan Non Tunai yang menysasar seluruh penduduk Miskin, Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis mencapai lebih 275,37%, Pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah tidak layak huni disertai dengan akses air minum yang layak, adanya komitmen dan kolaborasi dari seluruh

stakeholder baik Pemerintahan maupun Non Pemerintahan dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil dan beralih menggunakan energi terbarukan, adanya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkit listrik yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang bauran energi, adanya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama untuk menyediakan rumah layak huni, adanya Jaminan Pengaman Sosial yang melibatkan peran aktif IKM, adanya beberapa Event Internasional yang memanfaatkan produk IKM.

Pada Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakhlak dan penegakan hukum yang berkeadilan, yang diindikasikan dengan meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat, meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah, meningkatnya kesadaran politik masyarakat, serta meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pencapaian ini didorong oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan keamanan Bersama, adanya komitmen bersama baik pemerintah provinsi, kabupaten/Kota, dan Desa untuk mewujudkan Desa Bersih dari Narkoba, terjalinnya sinergitas dengan mitra Bakesbangpoldagri NTB seperti FKDM, Jejaring Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) NTB, FPK, FKUB, Bale Mediasi, dan PPWK dan kesiapan lintas OPD yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) baik instansi vertikal maupun daerah, semakin intensifnya koordinasi dan adanya pembentukan Tim Satgas guna mewujudkan daerah yang kondusif, aman dan tentram, partisipasi politik masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki komitmen untuk memberikan hak suara dalam pemilihan baik Gubernur, Bupati maupun Wali Kota tercermin dalam menunjukkan capaian sebesar 81 persen, mulai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam partai politik, adanya Komitmen pimpinan dan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender di segala bidang kehidupan dan seluruh aspek pelaksanaan pembangunan, adanya penataan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi mengingat bahwa PUG sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus mendapat perhatian karena memegang peran penting, serta adanya dukungan dan

komitmen Bupati dan Walikota untuk mendorong pembentukan Kabupaten/Kota layak anak

4.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

I. Periode RPJMD Tahun 2003-2008

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai terdapat pula kelemahan-kelemahan. Di bidang pendidikan, masalah yang dihadapi adalah jumlah lembaga PAUD dan tenaga kependidikan masih kurang, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan menengah masih rendah (54%), jumlah guru masih kurang terutama untuk unit sekolah baru, Angka buta aksara masih tinggi (316.000 penduduk diatas 15 tahun), belum semua kabupaten/kota memprogramkan biaya kualifikasi dan sertifikasi guru, masih terdapat sekolah yang membutuhkan bantuan rehab dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), masih terdapat sekolah yang belum menerapkan MBS dengan baik, masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi, masih kurangnya bantuan media pembelajaran baru pada jenjang SMP karena terbatasnya dana untuk pengadaan, serta hasil pengembangan model belum dimanfaatkan secara optimal oleh SKB dan PBKM dalam meningkatkan kualitas pembelajaran program PNF karena keterbatasan dana untuk penggandaan model

Selanjutnya di bidang kesehatan, masalah yang dihadapi antara lain masih belum optimalnya akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, kasus kurang gizi pada kelompok penduduk usia di bawah lima tahun, yang menyebabkan derajat kesehatan masyarakat rendah, belum beroperasinya desa siaga diseluruh desa/kelurahan sebagai upaya peningkatan kesehatan dasar di masyarakat, terbatasnya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan dan perawat, serta belum idealnya pencapaian prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ditataran keluarga, terutama kurangnya sarana jamban keluarga, kebiasaan konsumsi sayur dan buah, kebiasaan merokok serta aktifitas olah raga. Karena itu diperlukan upaya pelayanan kesehatan dasar oleh pemerintah dan swasta, yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan yang sesuai dan mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, lambatnya pengembangan pembangunan daerah juga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kualitas tenaga kerja, lemahnya

penegakan hukum, dan masih adanya kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang belum diselesaikan secara tuntas.

Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah diletakkan sebagai kebijakan pembangunan daerah, namun implementasinya selama ini justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang kurang terkendali. Hal ini berakibat pada kerusakan lingkungan dan mengganggu kelestarian alam, yang pada akhirnya mengurangi daya dukung lingkungan terhadap pembangunan. Secara kumulatif, berbagai aspek ini telah berimplikasi pada rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB dibanding IPM daerah lainnya di Indonesia.

II. Periode RPJMD Tahun 2009-2013

Pada periode ini, meskipun capaian kinerja sangat tinggi, tetapi dalam pencapaiannya diharapkan pada beberapa kendala sebagai faktor penghambatnya. Adapun faktor-faktor yang penghambat pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Masih kurangnya Ruang Kelas Belajar pada sekolah-sekolah negeri
2. Ruang praktek siswa SMA dan SMK masih kurang jumlahnya
3. Belum terdatanya secara rinci kebutuhan guru di masing-masing sekolah negeri
4. Program keahlian pada SMK belum tertata sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah
5. Pemenuhan/distribusi kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang belum optimal.
6. Belum optimalnya koordinasi, kerjasama dan dukungan pelaksanaan Program Unggulan (GEN dan ASHAR) dan program lainnya oleh lintas sektor dan kabupaten/kota.
7. Rekomendasi terhadap pelanggaran tata ruang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
8. Belum sepenuhnya RTRWP NTB menjadi acuan secara optimal dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR)
9. Belum terbitnya peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan Pembangunan RLH dan juklak juknis penyelenggaraan Pembangunan RLH
10. Belum terkoordinasi dan terintegrasinya dengan baik pengembangan perumahan antara Kabupaten / Provinsi dengan pusat.

11. Semakin meningkatnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah karena kurangnya kesadaran, kepatuhan serta partisipasi masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12. Belum maksimalnya koordinasi lintas sector yang menangani kebencanaan (Rencana kontinjensi belum sepenuhnya diterapkan)
13. Kurang tersedianya data yang akurat di Kabupaten Kota utamanya data by name dan address sehingga Sistem informasi Kesejahteraan Sosial dalam hal pendataan penanganan masalah kesejahteraan sosial kurang akurat
14. Belum terbinanya secara komprehensif perusahaan penyedia jasa (perusahaan out sourcing) sehingga banyak terjadi kasus-kasus tenaga out sourcing
15. Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman
16. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kondisi sungai, sehingga menyebabkan nilai Indeks Kualitas Air menurun
17. Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan e-KTP dan akses layanan e-KTP masih rendah.
18. Kurangnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
19. Terbatasnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat guna pengembangan konektivitas antar wilayah
20. Belum tersedianya gedung kantor yang handal dan terintegrasi sebagai pusat pengelolaan informasi dan publikasi (Data Center)
21. Keterbatasan Akses informasi pemasaran produk dan jaringan usaha KUMKM
22. Kesadaran investor PMDN/PMA tentang kewajibannya untuk menyampaikan LKPM masih kurang
23. Saprass Olah raga di kabupaten/Kota termasuk di sekolah terbatas, sehingga pengembangan bakat olah raga pada anak tidak dapat dikembangkan
24. Belum adanya regulasi terkait pelaksanaan urusan perpustakaan di daerah
25. Kapasitas SDM Kearsipan untuk pengelolaan, pembinaan, akuisisi dan penilaian kearsipan sangat terbatas

26. Belum Optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata mulai dari tingkat kelompok masyarakat hingga perangkat Pemerintah di Daerah.
27. Sumber daya Manusia yang tersedia masih Kurang/lemah dalam pengawasan pemotongan ternak betina produktif sehingga mempengaruhi capaian kinerja pembangunan peternakan terutama dalam hal peningkatan populasi ternak.
28. Banyak diantara fasilitas energi baru terbarukan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan
29. Provinsi NTB belum memiliki infrastruktur pelabuhan ekspor import, sehingga ekspor yang dilakukan bersifat indirect (Pelabuhan Bali, Tanjung Perak, Tanjung Priok dan Makassar) Sehingga nilai ekspor tidak tercatat
30. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terutama IKM tentang pentingnya HKI, untuk melindungi kekayaan intelektual pada produk yang dihasilkannya
31. Kurangnya pengendalian belanja atas target penerimaan yang masuk ke rekening kas umum daerah yang berdampak pada serapan anggaran belanja dan menimbulkan beban pada APBD tahun berikutnya

III. Periode RPJMD Tahun 2013-2018

Pada periode ini, meskipun capaian kinerja sangat tinggi, tetapi dalam pencapaiannya diharapkan pada beberapa kendala sebagai faktor penghambatnya. Adapun factor-faktor yang penghambat pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Masih minimnya bantuan anggaran bagi mitra-mitra kerja bakesbangpol seperti FKUB, FPK, FKDM dsb.
2. Masih minimnya sarana dan prasarana keamanan di tingkat desa/kelurahan.
3. Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang didukung kelembagaan yang mandiri, sarana dan prasarana yang memadai belum terpenuhi secara optimal dalam mendukung pembangunan kepariwisataan, sehingga perlu upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya dimaksud melalui pendidikan dan pelatihan atau penyuluhan.

4. Pengelolaan destinasi pariwisata yang didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kondisi keamanan yang kondusif belum memadai, sehingga kenyamanan dan keamanan berada di kawasan wisata belum terjamin.
5. Pemasaran pariwisata belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga aktivitas pemasaran pariwisata belum mampu secara efektif menjangkau pasar yang jauh lebih luas. Hal ini disebabkan karena kurang terpadunya pelaksanaan pemasaran bersama dengan para pelaku pariwisata atau stakeholder pariwisata lainnya.
6. Pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap perkembangan kepariwisataan dengan segala implikasi yang ditimbulkan masih kurang, sehingga perlu upaya yang lebih serius untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat serta melakukan pendampingan kelembagaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pembangunan kepariwisataan.
7. Investasi pada sektor pariwisata belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kurang kondusifnya iklim investasi, sehingga perlu ada upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta penyediaan informasi potensi kepariwisataan yang memadai
8. Kemitraan atau kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pelaku pariwisata atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lain, dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif, sehingga kemitraan atau kerjasama dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung perkembangan kepariwisataan daerah.
9. Perkembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata belum maksimal seperti yang diharapkan dalam menanggulangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya yang tinggal di lingkaran destinasi.
10. Asupan gizi yang tidak memadai pada masyarakat khususnya masyarakat miskin merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gizi kurang. Karena pola makan sering kali seiring dengan kondisi kesejahteraan.
11. Adanya penyakit penyerta yaitu penyakit infeksi seperti TB, Diare, ISPA, kecacangan yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan balita.
12. Pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) yang belum optimal.

13. Tingginya jumlah penduduk miskin
14. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi konsumsi pangan dan gizi;
15. Masih dominannya konsumsi sumber karbohidrat yang berasal dari beras; 4) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.
16. Data rumah tidak layak huni yang belum diupdate secara berkala.
17. asih tingginya prosentase Kawasan Perumahan dan Lingkungan Permukiman Yang Tidak Layak Huni
18. Terbatasnya kemampuan Masyarakat Golongan Miskin dan Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau.
19. Pembangunan rumah layak huni terkendala kondisi geografis dan lokasi pembangunan yang tersebar dengan jarak jangkauan yang cukup jauh.
20. Terbatasnya Akses Kredit bagi MBR dalam hal Sistem Penyediaan Perumahan dan Permukiman serta Belum melembaganya Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang berbasis Kawasan.
21. Infrastruktur bandara dan pelabuhan belum optimal untuk pelayanan penumpang
22. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kondisi sungai di sekitar wilayah
23. Pemberian bantuan peralatan dari Kementerian terkait untuk membangun IPAL, belum termamfaatkan dengan baik karena masyarakat masih terbiasa membuang limbah dan sampahnya langsung ke sungai.
24. Untuk tutupan lahan, pembatasan kewenangan bagi pemerintah provinsi yang hanya boleh melakukan RHL di luar kawasan hutan, turut menghambat upaya pemerintah untuk mendorong penutupan lahan melalui kegiatan RHL.

IV. Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Pada periode ini, meskipun capaian kinerja sangat tinggi, tetapi dalam pencapaiannya diharapkan pada beberapa kendala sebagai faktor penghambatnya. Adapun factor-faktor yang penghambat pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Kejadian bencana tidak dapat dipastikan
2. Dukungan sarana prasarana pemetaan dan peringatan dini bencana masih minim

3. Kapasitas SDM TRC/ TSB kurang memadai baik dari segi kuantitas (dibandingkan luas wilayah yang ditangani) maupun kualitas (penguasaan teknis kedaruratan)
4. Menurunnya tingkat kemantapan jalan akibat minimnya anggaran pemeliharaan jalan serta beban kendaraan yang melintasi jalan tidak sesuai dengan kapasitas jalan
5. minimnya anggaran pemeliharaan irigasi dan OP irigrasi kewenangan Provinsi
6. Angkutan kendaraan umum terus berkurang seiring dengan semakin berkembangnya ojek dan taksi online
7. Belum optimalnya peranan agen perubahan di masing-masing perangkat daerah
8. masih terdapat temuan-temuan akibat adanya kesalahan administrasi
9. Dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19 sehingga adanya penurunan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
10. Dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sulit dilakukan penyesuaian pada saat adanya perbaikan indikator kinerja daerah yang belum berorientasi hasil dan butuh proses yang lama
11. Ketaatan setiap ASN untuk melaporkan dari setiap kegiatan peningkatan Kompetensi atau kapasitas masih rendah
12. Adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan tidak optimalnya dalam pemberian pelayanan
13. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi yang mencapai rata-rata diatas 90 kasus dan 750 kasus setiap tahunnya
14. Masih tingginya pernikahan usia dini, adanya anggota keluarga yang merokok, pola asuh keluarga balita/pemberian makan bayi balita yang tidak tepat, konsumsi gizi seimbang dan tablet tambah darah Ibu hamil serta remaja putri masih rendah
15. Ketersediaan ruang kelas masih belum terpenuhi
16. Penerapan SPM belum maksimal karena ketersediaan dana yang terbatas
17. Kualitas tutupan lahan terus mengalami penurunan yang diakibatkan adanya perambahan hutan dan masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya

18. Masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya
19. rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
20. minimnya sarpras pengangkutan sampah, reaktivasi TPS 3R, dan pembangunan serta pengembangan pusat-pusat pengolahan sampah skala desa
21. Belum optimalnya pencatatan data pengurangan sampah di sebagian besar Kab/Kota dan masih banyaknya timbunan sampah illegal di sungai, pantai, dan hutan
22. Adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan kenaikan BBM yang mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat.
23. Belum optimalnya ketaatan para investor untuk melaporkan kegiatan investasinya melalui LKPM
24. Lambannya verifikasi dan validasi data penduduk miskin
25. Tingkat konsumsi pangan belum berimbang yang ditandai dengan tingginya konsumsi padi-padian khususnya beras
26. Tingkat pertumbuhan ketersediaan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk
27. Data jumlah keluarga yang belum mempunyai akses listrik masih belum di update
28. Pembinaan narapidana belum optimal yang ditandai dengan kasus kejahatan sebagian besar dilakukan oleh residivis
29. Heterogitas komunitas NTB yang begitu tinggi telah diikuti pula oleh tingginya tingkat potensi terjadinya konflik serta adanya potensi konflik historis yang bersifat laten
30. Lemahnya koordinasi antar OPD driver dan OPD yang tergabung sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) PUG baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
31. Lemahnya koordinasi OPD yang tergabung sebagai anggota GUGUS TUGAS KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK di tingkat kabupaten/ kota

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen yang bersifat kualitatif yang ditandai dengan setiap sasaran pokok pembangunan daerah tidak memiliki indikator dan target kinerja. Hanya sebagian kecil target-target pembangunan yang secara implisit ditetapkan untuk dicapai pada akhir periode RPJPD PADA TAHUN 2025
2. Pentahapan RPJPD sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD sangat operasional dan cenderung sama antar setiap tahapannya sehingga sulit menjadi acuan untuk dijabarkan kedalam setiap periode RPJMD
3. Pentahapan RPJPD tidak konsisten antar periodisasi RPJMD yang ditandai dengan tahap I dalam bentuk RENSTRADA tahun 2003-2008, tahap II dalam bentuk RPJMD tahun 2009-2013, tahap III RPJMD tahun 2013-2018, tahap IV RPJMD 2019-2023, dan tahap V dalam bentuk RPD tahun 2024-2026
4. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah sangat umum dan tidak mengandung unsur *specific, measurable, achievable, relevant*, sehingga sulit diterjemahkan kedalam suatu indikator kinerja
5. Penjabaran RPJPD kedalam RPJMD setiap periodenya tidak sepenuhnya mengacu pada RPJPD, hal ini ditandai dengan ketidak-konsistensinya indikator kinerja antar periode RPJMD
6. Keberlanjutan program-program antar periodisasi RPJMD tidak kontinu dilakukan, padahal sebagian besar program-program pada periode sebelumnya dapat mendorong percepatan pencapaian target-target kinerja.
7. Pencapaian kinerja berdasarkan indikator makro sebagian besar belum memenuhi sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJPD Provinsi NTB 2005-2025 diantaranya tingkat kemiskinan ditargetkan dibawah 10%, IPM NTB setara dengan IPM Nasional, angka buta huruf nol, rata-rata lama sekolah 12 tahun, dan ketimpangan pendapatan (gini ratio) semakin tinggi.

8. Rata-rata tingkat capaian kinerja berdasarkan pencapaian RPJMD setiap periodenya sangat tinggi karena sebagian besar indikator kinerja tingkat capaiannya jauh melampaui target (diatas 100%), namun keberhasilan pencapaian seluruh indikator kinerja sesuai target akhir pada setiap periode RPJMD rata-rata berkisar antara 70-80%.
9. Terdapat ketidaksinkronan antara arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2005-2025, skala prioritas pada tahapan-tahapan periode RPJMD dalam RPJPD Tahun 2005-2025, dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam masing-masing dokumen RPJMD, sebagai berikut:
 - a. Terdapat arah kebijakan bidang Sarana dan Prasarana, dan Wilayah dan Tata Ruang pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, namun tidak terdapat skala prioritas bidang Sarana dan Prasarana, dan Wilayah dan Tata Ruang pada tahapan Periode RPJMD ke-1 (Tahun 2005-2008) dalam RPJPD Tahun 2005-2025 maupun pada arah kebijakan bidang Sarana dan Prasarana, dan Wilayah dan Tata Ruang pada Periode RPJMD Tahun 2003-2008.
 - b. Terdapat arah kebijakan bidang Politik pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, namun tidak terdapat skala prioritas bidang Politik pada tahapan Periode RPJMD ke-2 (Tahun 2009-2013) dalam RPJPD Tahun 2005-2025 maupun pada arah kebijakan bidang Politik pada Periode RPJMD Tahun 2009-2013.
 - c. Terdapat arah kebijakan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan wilayah dan tata ruang pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, terdapat pula skala prioritas bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan wilayah dan tata ruang pada tahapan Periode RPJMD ke-2 (Tahun 2009-2013) dalam RPJPD Tahun 2005-2025, namun tidak terdapat arah kebijakan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan wilayah dan tata ruang pada Periode RPJMD Tahun 2009-2013.
 - d. Terdapat arah kebijakan bidang Politik pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, namun tidak terdapat skala prioritas bidang Politik pada tahapan Periode RPJMD ke-3 (Tahun 2014-2018) dalam RPJPD Tahun 2005-2025, namun terdapat arah kebijakan bidang Politik pada Periode RPJMD Tahun 2013-2018.

- e. Terdapat arah kebijakan bidang Politik pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, namun tidak terdapat skala prioritas bidang Politik pada tahapan Periode RPJMD ke-4 (Tahun 2019-2023) dalam RPJPD Tahun 2005-2025, sementara itu terdapat arah kebijakan bidang Politik pada Periode RPJMD Tahun 2019-2023.
10. Berdasarkan Arah Kebijakan Pencapaian kinerja dengan sebanyak 42 indikator (87,50%) pada periode RPJMD ke-1 Tahun 2003-2008, 48 indikator (73,85%) pada periode RPJMD ke-2 Tahun 2009-2013, 62 indikator (83,78%) pada periode RPJMD ke-3 Tahun 2013-2018, dan 61 indikator (70,11%) pada periode RPJMD ke-4 Tahun 2019-2023.
11. Berdasarkan Arah Kebijakan Pencapaian kinerja dengan status menurun sebanyak 6 indikator (12,50%) pada periode RPJMD ke-1 Tahun 2003-2008, 17 indikator (26,15%) pada periode RPJMD ke-2 Tahun 2009-2013, 11 indikator (14,86%) pada periode RPJMD ke-3 Tahun 2013-2018, dan 26 indikator (29,89%) pada periode RPJMD ke-4 Tahun 2019-2023.
12. Berdasarkan Arah Kebijakan Pencapaian kinerja dengan status tetap sebanyak 1 indikator (3,03%) hanya pada periode RPJMD ke-3 Tahun 2013-2018

5.2 Rekomendasi Dan Tindak Lanjut

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025, dapat disusun rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam menyusun Dokumen RPJPD Provinsi NTB yang baru (periode tahun 2025 – 2045) perlu sasaran pokok pembangunan daerah mengandung unsur *specific, measurable, achievable, relevant*, serta memiliki indikator dan target kinerja pada setiap pentahapannya.
2. Dalam menyusun Dokumen RPJPD perlu didukung oleh ketersediaan data yang komprehensif dengan series data yang cukup sebagai dasar menentukan sasaran, arah kebijakan serta target pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun kedepan
3. Perlu konsisten dan kontinuitas antar periodisasi RPJMD sesuai dengan pentahapan RPJPD baik dari sasaran pembangunan, arah kebijakan, program, indikator kinerja serta target pembangunan untuk menjamin keberlanjutan

pembangunan daerah serta pemenuhan target-target pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

4. Perlu menjamin adanya keselarasan antar dokumen perencanaan baik RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten/Kota serta dengan dokumen perencanaan lain agar terwujud sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder dalam mewujudkan target-target pembangunan.
5. Terhadap indikator kinerja makro yang memenuhi target pada periode RPJPD 2005-2025 diantaranya tingkat kemiskinan ditargetkan dibawah 10%, IPM NTB setara dengan IPM Nasional, angka buta huruf nol, rata-rata lama sekolah 12 tahun, dan ketimpangan pendapatan (gini ratio) semakin tinggi untuk menjadi prioritas dalam rumusan RPJPD periode yang akan datang.